

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

(Studi pada Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ALITHA INDRASWARI GUNUR

105030500111021



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2014**

MOTTO

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”

(Thaahaa: 25-28)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



“Tak ada kebaikan dalam hidup seseorang, jika tak ada sesuatu yang bernilai dari dirinya.”

(Aidh al-Qarni)

“Harapan adalah sebuah awal. Tapi bila berhenti hanya pada harapan, maka kaki kita hanya berpijak, bukan melangkah!”

(Yusuf Mansur)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi dalam
Perspektif *Sustainable Development* (Studi pada Desa
Panggunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Alitha Indraswari Gunur

NIM : 105030500111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 16 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003



Drs. Moch. Rozikin, M.AP
NIP. 19630503198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 14 Agustus 2014
 Pukul : 09.00
 Skripsi atas nama : Alitha Indraswari Gunur
 Judul : Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi dalam Perspektif *Sustainable Development* (Studi pada Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

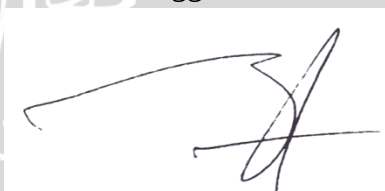
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Suryadi, MS
 NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



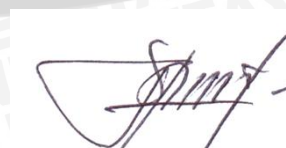
Drs. Moch. Rozikin, M.AP
 NIP. 19630503198802 1 001

Anggota



Dr. Sarwono, M.Si
 NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
 NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 16 Juni 2014

METERAI
TEMPEL
6000
6006AACF139192809
Alitha Indraswari Gunur
105030500111021

RINGKASAN

Alitha Indraswari Gunur, 2014, **Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi dalam Perspektif Sustainable Development** (Studi pada Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), Dr. Suryadi, MS., Drs. Moch. Rozikin, M.AP, 140 Hal + cxi

Penelitian ini dilakukan karena Desa Panggungrejo merupakan salah satu desa energi terbarukan yang dikembangkan oleh Kementerian ESDM serta program DME merupakan kebijakan yang didasarkan pada potensi suatu daerah yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan. Perlu adanya upaya dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu (1) pelaksanaan program DME yang berbasis PLTMH dalam perspektif *sustainable development* dan (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program DME di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungrejo dan situs penelitian dilaksanakan di Kantor Balai Desa Panggungrejo, zona usaha produktif di masing-masing krajan, masyarakat, Dinas ESDM Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program DME “KUNING EMAS” perspektif *sustainable development* melibatkan tiga aktor, yaitu pemerintah (seluruh SKPD se-Kabupaten Malang), swasta dan masyarakat. Program DME “KUNING EMAS” berlandaskan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi DME “KUNING EMAS.” Program ini masih belum terealisasi dengan baik. Dinas ESDM sebagai lembaga teknis belum mampu menjadi *leading sector* untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan, selain itu tidak adanya koordinasi antar SKPD menyebabkan pelaksanaan program ini mengalami beberapa kendala, seperti PLTMH Kali Sukun yang tidak dapat difungsikan karena ada beberapa kerusakan seperti jaringan mesin yang bocor serta pembangunan sistem penyaring air (*trashrack*). Selain itu, masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif mengalami kesulitan modal. Mereka masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam pengembangan industri.

Guna mencapai tujuan program pembangunan, sebaiknya dibuat sistem perencanaan, serta menguatkan koordinasi antar SKPD. Hendaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur dan sistem PLTMH, serta adanya renovasi, sehingga PLTMH dapat dimanfaatkan kembali. Sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan swasta dalam pemberian modal dan pemasaran hasil industri masyarakat. Pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan kinerja, agar program DME ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kata Kunci: Desa Mandiri Energi (DME), Sustainable Development

SUMMARY

Alitha Indraswari Gunur, 2014, **The Implementation of Energy Independent Village Program in Sustainable Development Perspective** (Study at Panggungrejo Village Kepanjen Sub-District Malang District), Dr. Suryadi, MS., Drs. Moch. Rozikin, M.AP, 140 page + cxi

This research was conducted as Panggungrejo Village is one of the renewable energy village developed by the Ministry of Energy and Mineral Resources and the DME program is a policy that is based on the potential of an area that is expected to improve people's lives by taking into account the environmental aspect. Need the effort in implementation a program DME "KUNING EMAS" in the perspective of sustainable development.

This study used a qualitative approach with descriptive and limited to two research focus, namely (1) the implementation of PLTMH-based DME program in the perspective of sustainable development and (2) what are the factors that support and hinder the DME program in Panggungrejo Village Kepanjen Sub-District Malang District. This research was conducted at Panggungrejo Village and site research conducted at Panggungrejo Village hall office, productive enterprise zones in their respective krajan, society, Department of Energy and Mineral Resources Malang District.

The results of the study showed that DME "KUNING EMAS" program sustainable development perspective involves three actors, namely government (all SKPD in Malang), private and society. DME "KUNING EMAS" program based on a Decree No. 180/57/KEP/412.013/2012 on the Determination of the Panggungrejo Village Kepanjen Sub-District Become Energy Independent Village "KUNING EMAS." The program is still not well realized. Department of Energy and Mineral Resources as technical institutes have not been able to be a leading sector to develop the program on an ongoing basis, in addition to the lack of coordination between the DME on SKPD which led to the implementation of the "KUNING EMAS" having some problems, such as PLTMH Sukun River that can not be used because there is some tissue damage as well as the construction of a machine that is leaking water filter system (trashrack). In addition, the society of productive economic entrepreneurs have difficulty capital. They still have not been able to meet the needs of industrial development.

In order to achieve the goal of the development program, should be made good planning system, and strengthen coordination between SKPD. Should do a review of the structure and the PLTMH system, as well as the renovation, so the PLTMH can be recovered. The government should cooperate with the private sector in the provision of capital and marketing of industrial society. Government, the private and the public together to monitor performance, so that the DME program can be run in accordance with expectations.

Keywords: Independent Village Energy (DME), Sustainable Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi dalam Perspektif *Sustainable Development* (Studi pada Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”**. Penulis mengambil tema dan judul tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah dalam rangka memberikan masukan melalui penelitian tentang Desa Mandiri Energi (DME), karena Kabupaten Malang memiliki potensi besar dalam bidang energi terbarukan yang perlu dikembangkan melalui perspektif *sustainable development*.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

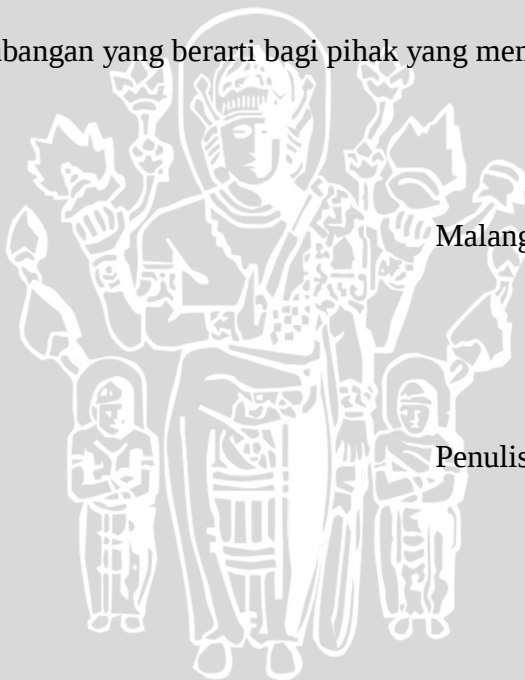
3. Bapak Dr, Luqman Hakim, M.Sc., selaku Ketua Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Suryadi, MS., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu setia membimbing serta memberikan kritikan dan saran terhadap proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Drs. Moch. Rozikin, M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu setia membimbing serta memberikan kritikan dan saran terhadap proses pengerjaan skripsi.
6. Bapak Drs. Suwondo, MS., selaku dosen pengajar mata kuliah di minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selalu memberi masukan dan motivasi dalam skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Perangkat Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, khususnya Bapak Ir. Edi Isnomo dan Bapak Hariyono yang telah bersedia menjadi sumber informan serta memberikan data-data penelitian.
9. Bapak Hanafi selaku Ketua Karang Taruna Desa panggungrejo Kecamatan Kepanjen yang bersedia memberikan informasi dan dokumen data penelitian.
10. Bapak Wahyudi beserta staff Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang yang telah membantu dalam proses penelitian dan memperoleh data.

11. Kedua orang tuaku Papa Edy Guritno dan Mama Nurmanah serta adik-adikku Enjelika, Nancy dan Berlin, terima kasih atas do'a dan motivasinya selama ini.
12. Teman-teman mahasiswa Administrasi Pemerintahan angkatan 2010
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Juni 2014

Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUANSKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan	15
1. Peran Pemerintah Daerah di Era Otonomi	15
2. Pembangunan	18
B. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	25
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	25
2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	27
C. Desa Mandiri Energi (DME).....	31
1. Pengertian Desa Mandiri Energi (DME)	31
2. Dasar Hukum Desa Mandiri Energi (DME)	33
3. Tujuan DesaMandiri Energi (DME)	34
D. Faktor-Faktor dalam Pelaksanaan Pembangunan	34
1. Faktor Pendorong Pembangunan	34
2. Faktor Penghambat Pembangunan.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Metode Analisis	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	49
a. Profil Kabupaten Malang.....	49
b. Sejarah.....	51
c. Visi dan Misi.....	55
d. Potensi Energi.....	59
2. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Malang.....	61
a. Profil Dinas ESDM.....	61
b. Visi dan Misi.....	62
c. Tugas dan Fungsi	63
d. Sumber Daya Manusia.....	65
3. Gambaran Umum Desa Panggungrejo.....	68
a. Profil Desa Panggungrejo	68
b. Kondisi Masyarakat	71
c. Potensi Energi.....	74
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	74
1. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) yang Berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dalam Perspektif <i>Sustainable Development</i> di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.....	74
a. Peran Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program DME di Desa Panggungrejo.....	82
b. Institusi (kelembagaan)	89
c. Regulasi (aturan).....	91
d. Bentuk dan Lingkup Kegiatan dalam Pelaksanaan DME Berbasis PLTMH	92
e. Dampak DME yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	93
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang	99
a. Faktor Pendukung.....	99
b. Faktor Penghambat	101
C. Analisis Data Fokus Penelitian	105
1. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) yang Berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dalam Perspektif <i>Sustainable</i>	

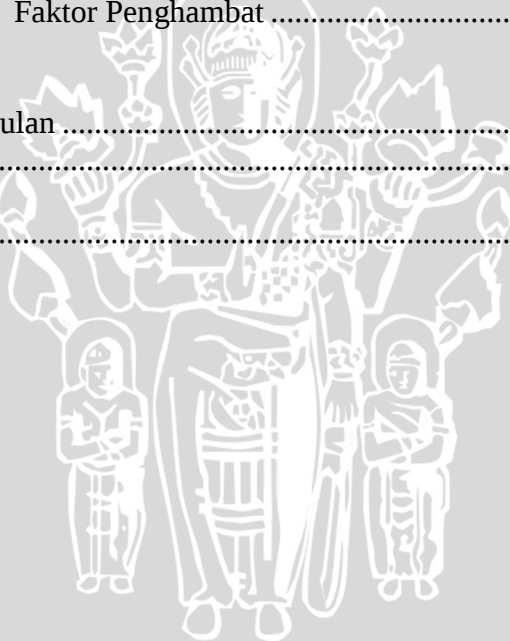
<i>Development</i> di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.....	105
a. Peran Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program DME di Desa Panggungrejo.....	105
b. Institusi (kelembagaan)	112
c. Regulasi (aturan)	114
d. Bentuk dan Lingkup Kegiatan dalam Pelaksanaan DME Berbasis PLTMH	119
e. Dampak DME yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	123
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang	127
a. Faktor Pendukung.....	127
b. Faktor Penghambat	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139

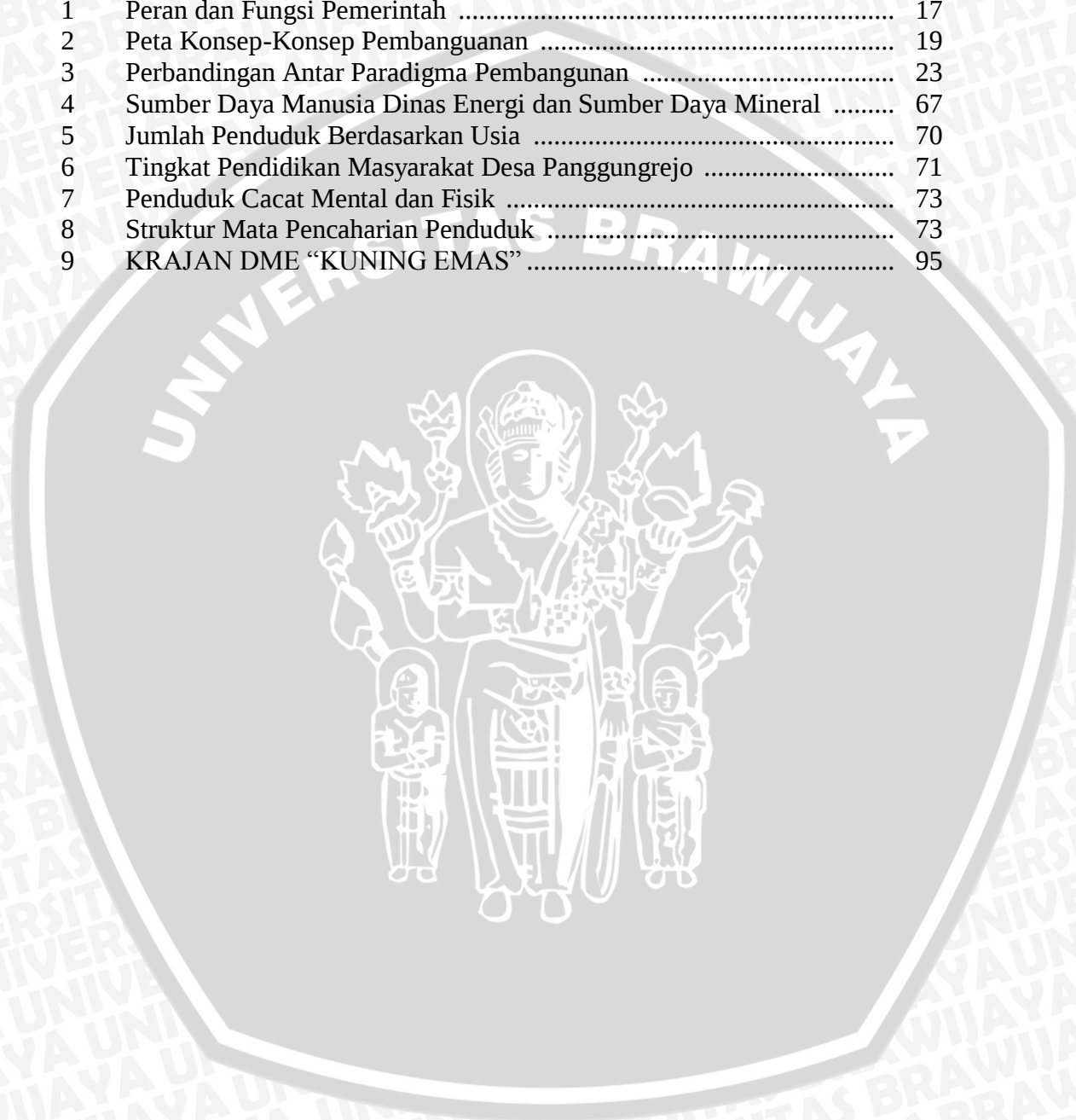
DAFTAR PUSTAKA	141
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1	Peran dan Fungsi Pemerintah	17
2	Peta Konsep-Konsep Pembangunan	19
3	Perbandingan Antar Paradigma Pembangunan	23
4	Sumber Daya Manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67
5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	70
6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panggungrejo	71
7	Penduduk Cacat Mental dan Fisik	73
8	Struktur Mata Pencaharian Penduduk	73
9	KRAJAN DME “KUNING EMAS”	95



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
1	<i>Scheme of Sustainable Development: At The Confluence of Three Preoccupations</i>	3
2	Model Analisis Interaktif: Milles dan Huberman	48
3	Peta Kabupaten Malang	50
4	Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan Tumpang	52
5	Candi Singhasari di Kecamatan Singosari	53
6	Candi Jago/Jajaghu di Kecamatan Tumpang.....	53
7	Peta Desa Panggungrejo	69
8	Kali Sukun	76
9	<i>Trash Rack</i>	77
10	Pipa Pesat (<i>penstock</i>).....	78
11	Penampungan Air	79
12	Turbin PLTMH	80
13	<i>Generator Distribution Panel</i>	80
14	<i>Ballast Load Control</i>	81
15	Rumah Pembangkit (<i>power house</i>)	82
16	Bantuan Mesin Jahit dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	83
17	Bantuan Mesin Produksi Tahu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.....	84
18	Sosialisasi Program DME “KUNING EMAS”	85
19	Pelatihan Industri Tahu Organik	86
20	Pelatihan Kewirausahaan KRAJAN Bordir	88
21	Pelatihan Kewirausahaan KRAJAN Batik	89

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/Kep/412.013/2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS”	xvii
2	Surat Keputusan Kepala Desa Panggungrejo Nomor 07/33a/421.604.005/Sk/2013 tentang Pembentukan Kelompok KRAJAN KUNING EMAS	xxxvii
3	Hasil Survey DME “KUNING EMAS” Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang	xli
4	Surat Keterangan Pelaksanaan Riset	lxxxiii
5	<i>Curriculum Vitae</i> Penulis	lxxxv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

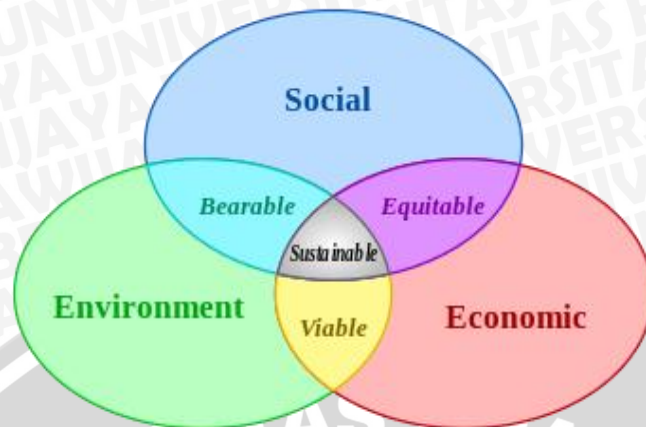
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut (NKRI) sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah dibagi menjadi dua, yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan yang didalamnya terdapat desa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 point 5, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang

tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret (Widjaja, 2010:4,164).

Perkembangan komunikasi dan transportasi yang semakin cepat, melahirkan sejumlah masalah besar dalam hal globalisasi, perdagangan, lingkungan, pembangunan dan kemiskinan, khususnya di wilayah desa. Melalui *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) diharapkan dapat membangun bangsa yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada *sustainable development*. Menurut Arta (2009), konsep *sustainable development* adalah pola pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap memelihara lingkungan, sehingga kebutuhan itu bukan hanya terpenuhi hari ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan menurut *World Summit* (2005) mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit* 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar di berikut ini (www.wikipedia.com).



Gambar 1. Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations

Sumber: Dokumen PBB tentang dokumen hasil World Summit 2005

Skema di atas menggambarkan ketiga aspek tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Berkelanjutan berarti berpikir tentang masa mendatang, di mana lingkungan, masyarakat dan ekonomi menjadi pertimbangan sehingga diperoleh keseimbangan dalam pengembangan dan upaya meningkatkan kualitas hidup. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *sustainable development* merupakan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek masyarakat, membangun partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab serta menumbuhkan komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa:

".....keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. UNESCO memandang

keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Sustainable development mencakup konservasi dan preservasi tentang lingkungan dan hubungan sosial antar manusia, keberlangsungan manusia, salah satunya adalah listrik yang merupakan sumber daya yang paling banyak digunakan karena memiliki banyak fungsi, diantaranya dalam menunjang kehidupan manusia. Listrik menopang kelangsungan di berbagai bidang, seperti halnya bidang industri, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini berbanding terbalik dengan terbatasnya bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, karena pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil masih sangat diandalkan. Banyak negara termasuk Indonesia mencari cara dalam pemanfaatan energi untuk menambah pasokan listrik guna memenuhi kebutuhan di berbagai bidang dan aspek kehidupan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyatakan bahwa guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut maka perlu adanya kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan yang ada di alam, seperti pemanfaatan energi air, energi angin, energi matahari dan panas bumi. Salah satu sumber energi terbarukan yang sangat berpotensi di Indonesia adalah pemanfaatan energi air. Apabila pemanfaatan energi tersebut secara meluas di seluruh wilayah Indonesia maka peluang keluar dari krisis listrik akan semakin

besar mengingat bahwa terdapat banyak sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan semuanya menyebar di seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia.

Menurut Indonesia Climate Change Center, yang selanjutnya disebut (ICCC) menyatakan bahwa investasi untuk membangun pembangkit listrik bisa mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Rasio elektrifikasi Indonesia 60,28% (PLN Statistik, 2008), menunjukkan bahwa belum seluruh daerah di Indonesia mendapatkan fasilitas listrik, 60% yang sudah menikmati listrik tersebut di dominasi oleh Pulau Jawa. Nusa Tenggara Timur misalnya, rasio elektrifikasinya 21,34%, sehingga setiap 100 jiwa penduduk, hanya 22 jiwa yang menikmati fasilitas listrik. Penduduk yang belum bisa menikmati listrik sebagian besar tersebar di daerah-daerah terpencil yang berpenduduk sedikit. Selain itu masyarakat di beberapa daerah sampai sekarang belum bisa mendapatkan pasokan listrik selama 24 jam (www.antaranews.com).

Penyediaan listrik dan perluasan jaringan sampai ke daerah-daerah terpencil pada umumnya tidak ekonomis. Begitu juga dengan penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil, hal ini dikarenakan karena skala pembangkitan yang terlalu kecil dan tingginya biaya bahan bakar. Meskipun demikian, penyediaan listrik tetap harus dilakukan karena merupakan investasi sosial yang tak terhindarkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, energi terbarukan sangat berpeluang untuk menjadi alternatif solusi

energi listrik di daerah tersebut yang dapat menjangkau hingga tempat terpencil yang murah dan ramah lingkungan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral, untuk selanjutnya disebut (ESDM) sebagai kementrian teknis yang menangani energi telah melaksanakan program Desa Mandiri Energi yang selanjutnya disebut (DME) yaitu program penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat yang berbasis Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disebut (BBN) maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat. Program DME dimaksudkan sebagai *entry point* dalam kegiatan ekonomi pedesaan. Secara teknis, DME akan dikembangkan melalui kegiatan dari hulu ke hilir. Kegiatan di hulu berupa budidaya tanaman bahan baku BBN yang secara agroklimatologi cocok untuk desa-desa tertinggal yang bersangkutan, sedangkan kegiatan di tengah dan di hilir berupa penerapan teknologi yang terjangkau masyarakat pedesaan dalam

hal produksi BBN. Melalui implementasi program pengembangan BBN, pemerintah akan memulai dan terus mendorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun DME. (www.academia.edu)

DME merupakan salah satu wujud kemandirian desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan untuk pengurangan kemiskinan di desa-desa tertinggal dengan mendorong kemampuan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan energi di wilayahnya. Oleh karena itu sasaran program tersebut adalah melepaskan ketergantungan masyarakat desa tertinggal terhadap bahan bakar minyak yang harganya cenderung terus meningkat. Apabila masyarakat di desa tertinggal sudah dapat memenuhi energinya maka akan tumbuh usaha-usaha produktif baru melalui insentif energi listrik.

Desa energi terbarukan merupakan cikal bakal DME. Melalui DME diharapkan sebagai alternatif pemecahan masalah penyediaan energi. Di samping itu pengembangan program DME diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*Pro-Poor*), memperkuat ekonomi nasional (*Pro-Growth*) dan memperbaiki lingkungan (*Pro-Planet*). (www.esdm.go.id)

DME merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis gender untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha niaga dan industri yang memanfaatkan sumber energi listrik secara gratis yang dihasilkan dari PLTMH Kalisukun sehingga produk dan jasa yang dihasilkan lebih kompetitif. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (*head*) dan jumlah debit air (www.esdm.malangkab.go.id).

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Pasal 1, dengan Peraturan Pemerintah ini, ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibukota kabupaten. Alasan mendasar untuk memberdayakan potensi air sungai Kalisukun menjadi sumber pembangkit tenaga listrik yang diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan listrik. Melalui program ini, Desa Panggungrejo akan berupaya memaksimalkan potensi yang ada, diantaranya, memanfaatkan sumber tenaga listrik dari PLTMH Desa Panggungrejo untuk mendukung 11 titik sasaran dalam bidang kerajinan dan *home* industri. Aliran listrik ini nantinya dapat dimanfaatkan pada kegiatan perbengkelan, bordir, perikanan, batik, agro bisnis, konveksi dan sebagainya. (www.malangpos.com). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk mewujudkan dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara operasional dalam urusan energi dan sumber daya mineral. Upaya mewujudkan dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara operasional dalam urusan energi dan sumber daya mineral, yakni:

- a) Misi ke-5: Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah.

- b) Misi ke-6: Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- c) Misi ke-7: Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Misi ke-8: Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melihat dari visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah yang berupa kebijakan pemerintah daerah melalui DME berbasis PLTMH yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi Sumber Daya Alam, yang selanjutnya disebut (SDA) dan buatan yang didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut (SDM), energi, infrastruktur dan pelayanan publik melalui *sustainable development*. Kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Visi dan misi tersebut diperkuat dengan dasar hukum kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam implementasi program DME, yaitu Penetapan Desa Panggungrejo sebagai Desa Mandiri Energi “Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera yang selanjutnya disebut (KUNING EMAS)” melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 Tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS”. Alasan mendasar penulis meneliti DME di Desa

Panggunrejo karena dalam perkembangannya program DME mulai memanfaatkan teknologi energi terbarukan seperti mikro hidro, jarang penelitian yang memfokuskan untuk melakukan penelitian tentang program Desa Mandiri Energi berbasis PLTMH dalam perspektif *sustainable development*, program DME merupakan alternatif cara untuk menciptakan dan mengembangkan energi terbarukan, serta program DME merupakan kebijakan yang didasarkan pada potensi suatu daerah yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Dinas ESDM adalah organ dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang energi. Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa yang diwujudkan melalui Desa Mandiri Energi (DME). Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada Desa Panggunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development* di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development* di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis melalui pengembangan program DME dalam perspektif *sustainable development*. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai, antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a) Sebagai wacana konsep DME di Indonesia yang dilihat dari aspek kekurangan dan kelebihan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peran pemerintah daerah.
- b) Digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program yang berbasis *sustainable development* dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kontribusi Praktis

- a) Memberikan kontribusi akademis tentang studi pembangunan DME yang berkelanjutan.
- b) Memberikan pemahaman tentang peran aktor dalam perspektif *sustainable development* melalui pelaksanaan pembangunan DME.
- c) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan bahan diskusi bagi akademisi dan praktisi khususnya dalam bidang pelaksanaan program.

E. Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang saling memiliki keterkaitan dan menyangkut permasalahan yang diangkat. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yaitu pentingnya pelaksanaan program DME dalam perspektif *sustainable development*. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat empat teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peran pemerintah, pembangunan berkelanjutan, DME dan faktor-faktor pengembangan. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data yang didapatkan di lapangan, baik data primer maupun data sekunder.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

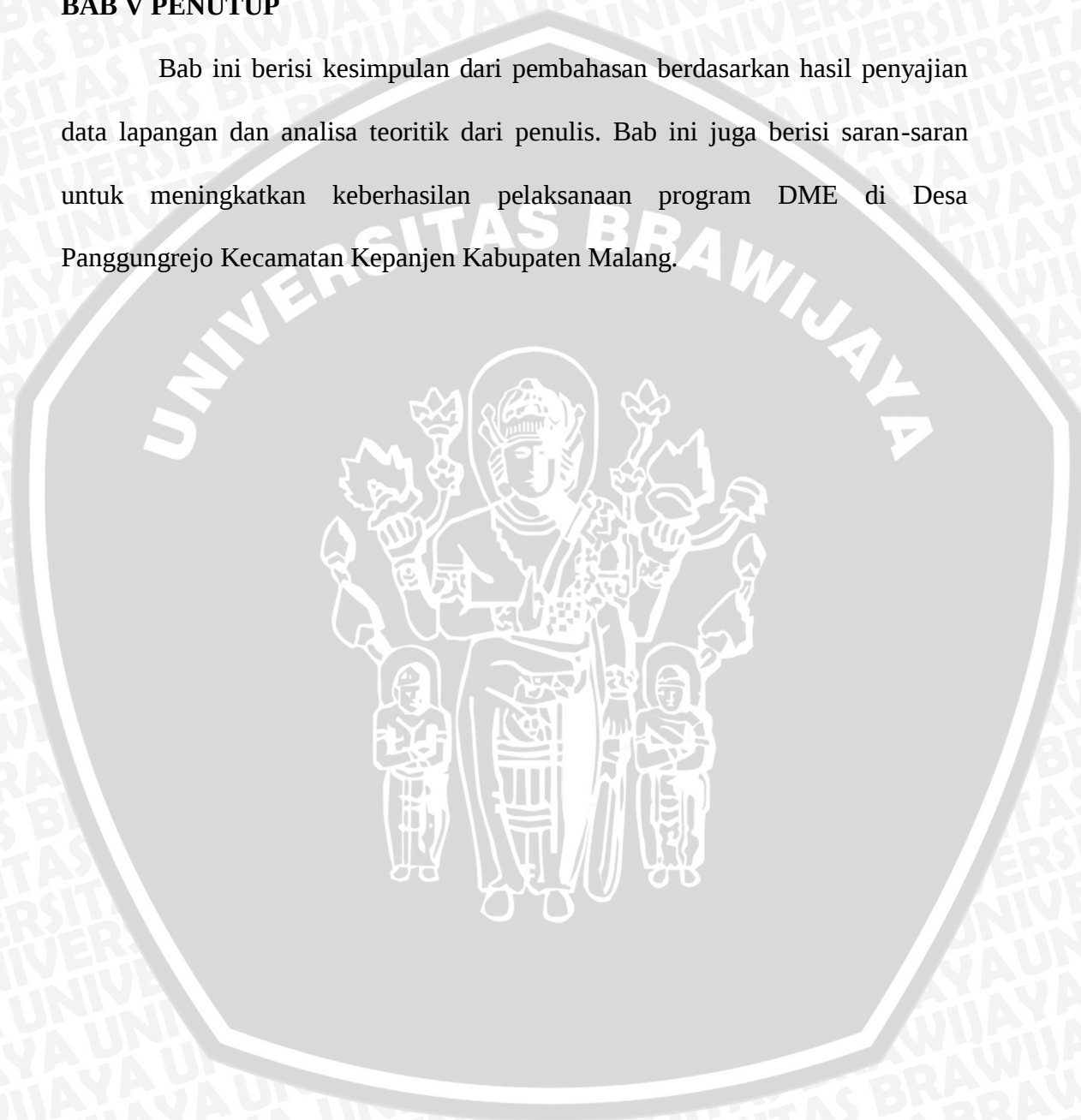
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan

dalam rumusan masalah dan kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan teori yang telah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisa teoritik dari penulis. Bab ini juga berisi saran-saran untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program DME di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

1. Peran Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sunarno (2012: 7) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
- 2) Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah. Menurut Muluk (2007: 59-61) peran pemerintah daerah dalam

memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan kebijakannya.

Mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett dan Ramesh (1995) maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) kategori, yakni:

- a) Instrumen wajib (*compulsory instruments*)
Instrumen wajib bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu (*regulations*) atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih (*public-owned enterprise*) atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi (*direct public goods provision*).
- b) Instrumen suka rela (*voluntary instruments*)
Instrumen suka rela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan.
- c) Instrumen campuran (*mixed instruments*)
Instrumen campuran menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut.

Selain menjalankan instrumen, pemerintah juga memiliki peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bank Dunia, peran dan fungsi pemerintah secara umum seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Peran dan Fungsi Pemerintah

	Menanggulangi Kegagalan Pasar			Meningkatkan Pemerataan
Peran Minimal	Menyediakan barang-barang publik murni Pertahanan Keamanan Manajemen ekonomi makro Penyediaan fasilitas kesehatan publik			Melindungi si miskin: Program pengentasan kemiskinan Bantuan bencana
Peran Antara	Menanggulangi eksternalitas: • Pendidikan dasar • Perlindungan lingkungan	Mengatur monopoli: • Peraturan jasa umum • Kebijakan anti monopoli	Mengatasi informasi yang tidak sempurna: • Asuransi (kesehatan, jiwa, pension) • Peraturan keuangan • Perlindungan konsumen	Menyediakan asuransi sosial: Pemerataan pensiun Dana pensiun Tunjangan Pengangguran
Peran Aktif	Mengkoordinasikan kegiatan swasta: Mendukung fungsi pasar Memberikan inisiatif	Retribusi asset		

Sumber: World Bank (1997) dalam Kuncoro(2004: 111)

2. Pembangunan

Pembangunan memiliki arti makna ganda. Pertama, pembangunan lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi yang fokus pada kuantitas produksi dan penggunaan sumber-sumber. Kedua, pembangunan memusatkan pada perubahan dalam distribusi barang dalam esensi hubungan sosial (Hadi, 2012: 1). Menurut Siagian dalam Suryono (2010: 46), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan menggunakan sistem atau metode tertentu untuk melakukan suatu perubahan terhadap aspek sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan yang pada umumnya berskala waktu yang panjang. Tujuan dari pembangunan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Tabel 2. Peta Konsep-Konsep Pembangunan

Konsep	Pendekatan	Orientasi
Pertumbuhan (<i>Growth</i>)	Ekonomi	Negara-negara dunia (umum)
Rekonstruksi (<i>Reconstruction/recovery</i>)	Pemulihan ekonomi	Eropa (Negara yang terlibat PD II)
Modernisasi (<i>Modernization</i>)	Iptek	Negara dunia ketiga
Westernisasi (<i>Westernization</i>)	Kebudayaan dan iptek	Negara dunia ketiga (sebelah timur)
Perubahan sosial (<i>Social Change</i>)	Sosial	Negara dunia ketiga
Pembebasan (<i>Liberation</i>)	Ekonomi-politik	Amerika Latin
Pembaharuan (<i>Innovation</i>)	Iptek, kemudian sosial-politik	Negara dunia ketiga
Pembangunan bangsa (<i>Nation building</i>)	Politik	Negara baru merdeka
Pembangunan Nasional (<i>National development</i>)	Politik	Negara baru merdeka
Pengembangan	Politik	Indonesia
Pembinaan	Politik	Indonesia
Pembangunan	Campuran (eklektik)	Negara dunia ketiga

Sumber: Suryono, 2010: 53-54

Hakikat gagasan pembangunan yang terkandung upaya peningkatan kemampuan masyarakat adalah untuk mempengaruhi lingkungan fisik, manusia dan kebudayaan mereka. Mereka melakukan hal ini secara

keseluruhan sebagai suatu masyarakat, kolektivitas, bukan secara individual (Riggs, 1986: 76). Menurut Tjokrowinoto (1996: 7) menyatakan bahwa:

Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya, menjadi *self-projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan juga seringkali menjadi semacam *ideology of developmentalism*. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan-kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Melalui mata-rantai pemithosan dan demistifikasi paradigma pembangunan, terjadilah pergeseran-pergeseran paradigma tadi.

Pemerintah dewasa ini kurang mampu melaksanakan proyek-proyek pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pemerintahan yang telah membuktikan bahwa gagasan-gagasan administrasi modern tidak relevan dan tidak efektif (Riggs, 1986: 77). Hal ini dapat dilihat dari realita pembangunan yang marak terjadi saat ini, misalnya pembangunan sarana olah raga Hambalang yang tersendat dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya terperangkap dalam kasus korupsi. Peran pemerintah dalam pembangunan harus didukung oleh pengawasan dari masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat cenderung pasif bahkan acuh terhadap pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya memberikan dukungan dan aspirasi terhadap pembangunan yang berskala nasional. Todaro dan Smith (2006: 28-29) mengungkapkan bahwa proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.

- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Menurut Sondang P. Siagian (1985:111), bahwa titik tolak berfikir ini memungkinkan meneliti proses pembangunan nasional terdiri dari tujuh aspek dan masing-masing keseluruhan aspek ini menjadi suatu “*independent phase*” dari pada proses sebagai keseluruhan. Ketujuh aspek itu ialah:

- 1) Adanya kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) untuk membangun;
- 2) Keputusan-keputusan politik (*political decisions*) sebagai landasan dari pemuasan kebutuhan yang dirasakan itu;
- 3) Dasar hukum (*legal bases*) untuk tindakan-tindakan yang akan diambil;
- 4) Perumusan rencana pembangunan nasional (*formulation of development plan*);
- 5) Perincian program kerja (*detailed work programs*);
- 6) Implementasi (*implementation of activities*);
- 7) Penilaian hasil-hasil yang dicapai (*evaluation of result obtained*).

Kebijaksanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan masing-masing daerah di dalam ruang lingkup nasional. Kebijakan pembangunan akan mempertimbangkan pengaruh tempat/ruang terhadap perencanaan sektoral (Zauhar, 1994: 107). Kebijakan pembangunan daerah akan disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah atau sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Pembangunan

tidak selalu berjalan mulus, namun juga terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah begitu rumit dan kompleks. Agar permasalahan tersebut dapat diatasi maka diperlukan peran multi aktor, yaitu pemerintah bersama-sama dengan swasta dan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan pembangunan yang berbasis *sustainable development* dengan memperhatikan aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi serta lingkungan.

Uphoff dan Esman dalam Zauhar (1994: 108) menyodorkan “resep” untuk mengobati penyakit pembangunan daerah/wilayah dengan konsep keterkaitan (*linkages*). Konsep ini menunjuk pada mekanisme melalui mana suatu lembaga tertentu terkait atau berusaha mempengaruhi lembaga lain. Keterkaitan itu harus diciptakan antar lembaga yang ada di daerah serta masyarakat setempat dalam bentuk yang saling menguntungkan, kerja sama dan interaksi timbal balik. Zauhar (1994: 110) menyatakan bahwa kecenderungan agak mengabaikan *capacity building* di dalam pembangunan daerah antara lain dapat dilihat pada gejala-gejala:

- a) Kecenderungan proliferasi struktural-institusional untuk mengatasi struktur yang disfungsional.
- b) Hubungan pusat dan daerah yang lebih menekankan pada dekonsentrasi dari pada desentralisasi.
- c) Penerapan *comprehensive planning* dengan menekankan pada *blue print approach*.
- d) Imbalansi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Tabel 3. Perbandingan Antar Paradigma Pembangunan

Dimensi-dimensi	Pembangunan Ekonomi (<i>Economic Development</i>)	Pembangunan Sosial (<i>Social Development</i>)	Pembangunan yang Berpusatkan pada Rakyat (<i>People Centered Development</i>)	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (<i>Environmental Development</i>)	Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)
Tujuan	Meningkatkan kapasitas/volume barang dan jasa; Meningkatkan pendapatan. Merubah struktur dalam industrialisasi.	Meningkatkan nilai individu-individu kemanusiaan; Meningkatkan kualitas hidup; Merubah struktur sosial.	Memperbaiki kualitas hidup; Memperbaiki keseimbangan dalam ekologi manusia.	Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia.	Memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Sistem yang Dituju	Produksi dalam perindustrian.	Konsumsi dan distribusi pemenuhan kebutuhan dasar.	Pemberdayaan organisasi lokal; Peningkatan hak akses terhadap sumber-sumber.	Lingkungan hidup sosial; Lingkungan hidup binaan; Lingkungan hidup alami.	Produksi yang berkelanjutan; Pemenuhan kebutuhan manusia; Keadilan sosial dari generasi ke generasi.
Faktor Input	Sumber-sumber daya yang relevan dan segera; Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan "man power"	Sumber marginal yang relevansinya tidak langsung; Sumber manusia yang tidak nampak; Keseimbangan antara SDM dengan hak azasi dan martabat manusia.	Hak azasi manusia dan kemuliaan.	SDA; Perubahan demografi sosial; Kebutuhan dasar.	Perubahan penduduk; Kebutuhan dasar; Pertumbuhan ekonomi; Ketersediaan SDA; Kualitas lingkungan hidup.
Proses	Periode pembangunan secara relatif berjalan dengan singkat.	Periode pembangunan secara relatif berjalan lama dan sukar diukur.	Strategi jangka pendek mendukung jangka panjang.	Periode pembangunan secara relatif singkat dan sukar diukur.	Periode pembangunan berjalan lama dan terukur.
Hasil yang Diharapkan	Nyata dan dapat diperkirakan.	Tidak nyata dan sulit diperkirakan.	Periode jangka pendek nyata, tetapi jangka panjang tidak nyata dan sulit diperkirakan.	Nyata dan dapat diperkirakan.	Dapat diperkirakan sesuai dengan scenario yang terpilih.
Prinsip Ekonomi	Efisiensi dan masyarakat; Perdagangan bebas; Saling ketergantungan spesialisasi.	Integrasi dan masyarakat; Saling ketergantungan dan spesialisasi dengan kesadaran kolektif dan solidaritas organik.	Integrasi dan komitmen masyarakat; Kemandirian; Diverifikasi ekonomi; Pendekatan ekonomi rakyat.	Integrasi lingkungan ke dalam agenda pembangunan; Aspek lingkungan menjadi timbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi.	Efisiensi sumber-sumber daya; Pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan seimbang.
Fokus Sektor	Industrialisasi	Pelayanan dasar	Pertanian dan industry	Pengelolaan SDA	Integrasi aktivitas ekonomi, ekologi dan sosial
Partisipasi Masyarakat Intervensi dari Pemerintah	Sebagai tenaga dan konsumen Lebih dominan dan feasible	Ikut memproduksi Tidak terlalu kelihatan atau kurang dominan	Ikut merencanakan (partisipasi terlibat) Tidak dominan	Pengelolaan dan penanggung jawab Dominan dan didukung hukum lingkungan	Sebagai pelaksana Dominan sebagai perencana dan pembuat scenario pembangunan

Sumber: Suryono, 2010: 23-25

Suatu proses pembangunan dibutuhkan pendekatan atau strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sewaktu-waktu bisa muncul akibat pembangunan itu sendiri. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika menghasilkan dampak (*output*) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, dimana dalam proses pembangunan tersebut memperhatikan aspek sosial lingkungan pada khususnya. Sering kali pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tidak memperhatikan lingkungan, sehingga dampak yang muncul justru kerusakan pada lingkungan.

Pemerintah dituntut untuk menyaring pembangunan-pembangunan yang khususnya dilakukan oleh pihak swasta. Pada kenyataannya, pemerintah memberikan izin pada swasta untuk membangun bangunan-bangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial lingkungan. Misalnya, pembangunan *super market* (mall) di kawasan pasar tradisional. Hal tersebut jelas mematikan pasar tradisional, dimana aktor-aktor yang ada di dalamnya adalah kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk tidak semudah itu memberikan izin pada pemodal (pihak swasta) untuk mendirikan bangunan yang nantinya berdampak buruk pada aspek sosial lingkungan.

Myrdal, Dudley dan Seers dalam Zain (2013) menyatakan bahwa terdapat lima strategi baru dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Strategi pertumbuhan dengan distribusi;
- 2) Strategi kebutuhan pokok;
- 3) Strategi pembangunan mandiri;
- 4) Strategi pembangunan berkelanjutan;

5) Strategi pembangunan berdimensi etnik.

Dari kelima strategi dalam pembangunan tersebut, maka peneliti fokus pada strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana strategi pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berorientasi pada pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan program DME yang dalam perspektif *sustainable development*.

B. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Asdak (2012: 39) pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Keambrukan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, dengan demikian pembangunan

berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Orientasi pembangunan dari orientasi pertumbuhan semata-mata menuju ke orientasi keberlanjutan pembangunan (*sustainability*), di samping arah pergeseran orientasi pembangunan yang lain, seperti orientasi kesejahteraan, neo-ekonomi, humazing, dan lain-lain. Konsep *sustainability* yang dicetuskan oleh kaum *environmentalist* berawal pada sikap keprihatinan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya tekanan yang eksekif terhadap daya dukung alami (*natural support system*). Bruntland Commission Report yang berjudul “*Our Common Future*” (Djajadiningrat, 1990, p.3 dalam Tjokrowinoto, 1996) dijelaskan batasan tentang *sustainable development* sebagai berikut:

”Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis dan kultur. *Sustainable development* didorong oleh adanya kenyataan tingginya *morality rate* proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Fitrin (2013) mengungkapkan pembangunan berkelanjutan lahir sekitar tahun 1970, seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Menurut Lester Brown dalam Fitrin (2013), konsep pembangunan berkelanjutan merujuk pada empat nilai utama, yaitu:

- a) Tertinggalnya transisi energi;
- b) Memburuknya sistem biologis utama (perikanan, laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian);
- c) Ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrem (polusi, dampak rumah kaca, banjir, musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin);
- d) Kurangnya bahan makanan.

Salim (1990) dalam makalahnya berjudul “*Sustainable Development: An Indonesian Perspective*” menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang. Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi (Hadi, 2012: 2). Proses pembangunan berkelanjutan terdapat suatu proses perubahan yang terencana yang mengarah pada kemajuan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Perubahan ini nantinya diharapkan akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat.

Salim dalam Hadi (2012: 3), selanjutnya mengemukakan beberapa konsep strategis jika konsep pembangunan berkelanjutan itu diterapkan dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia:

- 1) Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*), misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
- 2) Perencanaan pembangunan menghendaki standar lingkungan seperti standar ambient untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut dan udara di kota dan daerah pedesaan. Dengan adanya standar, kualitas lingkungan akan bisa lebih dijamin.
- 3) Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 4) Rehabilitasi kerusakan lingkungan khususnya di daerah yang kritis seperti sungai-sungai yang menjadi tempat pembuangan dan di lahan kritis.
- 5) Usaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan.

Keseluruhan proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa (Asdak, 2012: 39).

Menurut konsep *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2001), pembangunan berkelanjutan dilaksanakan

dengan cara menelaah pandangan-pandangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap isu-isu prioritas yang diperlukan dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan (Asdak, 2012: 42). Menurut Joseph LaPalombara dalam Riggs (1986: 197), strategi pembangunan harus didasarkan pada: (a) dukungan politik, adanya dukungan dari pusat kekuasaan politik yang berlangsung secara terus-menerus; dan (b) pendidikan, merupakan strategi jangka panjang yang penting baik untuk meningkatkan kemampuan administrasi pemerintahan pusat maupun daerah. Asdak (2012: 42-45) mengungkapkan langkah-langkah yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan:

- a. Menciptakan dan/atau menguatkan lembaga koordinasi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan serta mengupayakan agar lembaga tersebut mempunyai cukup kewenangan dan sumber dana untuk melaksanakan tugasnya.
- b. Membangun dan/atau memperbaiki komitmen politik dari sejak proses persiapan hingga pelaksanaan dan melibatkan berbagai elemen dari pusat hingga daerah.
- c. Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang diharapkan berperan dalam persiapan dan implementasi strategi pembangunan berkelanjutan dan mendorong terjadinya diskusi tentang peran masing-masing yang terlibat.
- d. Menjamin atau memastikan terciptanya suasana adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) strategi pembangunan berkelanjutan oleh masing-masing kementerian sektoral dan lembaga lain yang terlibat serta masyarakat luas dan kalangan bisnis dan industri.
- e. Menggerakkan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan melalui identifikasi, mengamankan dan mengalokasikan sumber daya pada waktu dan cara yang tepat, untuk itu diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Keahlian dan sumber pengetahuan termasuk pelatihan;
 - 2) Dukungan pengelolaan, legalitas dan kelembagaan;
 - 3) Sumber daya finansial.
- f. Mengidentifikasi dan mencari kesepakatan tentang peran masing-masing pemangku kepentingan, misalnya hak masing-

masing pemangku kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

- g. Memetakan proses strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan cara:
 - 1) Identifikasi isu-isu yang telah ditelaah, visi, tujuan dan tanggung jawab;
 - 2) Identifikasi proses dan mekanisme yang digunakan dalam strategi pembangunan saat ini;
 - 3) Telaah/*review* hasil yang dicapai di bawah strategi dan mekanisme pembangunan saat ini dalam konteks sinergitas, kesenjangan, konflik dan keluaran yang diperoleh;
 - 4) Mengenali konflik sektoral yang terjadi termasuk konsistensi dan upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan tersebut;
 - 5) Identifikasi tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki sinergitas dan mengatasi kesenjangan yang masih terjadi.
- h. Mengembangkan dan memperbaiki koordinasi dan koherensi antar strategi dari tingkat internasional hingga tingkat lokal, antar dan dalam sektor.
- i. Menciptakan atau memperbaiki regulasi yang mengatur proses strategi pembangunan berkelanjutan melalui:
 - 1) Mendiskusikan dan menyepakati proses pengambilan keputusan dan hasilnya serta bersepakat tentang cara menyelesaikan persoalan yang timbul;
 - 2) Melakukan koordinasi tentang cara-cara negosiasi dan pengelolaan konflik.
- j. Menciptakan dan memperbaiki persyaratan untuk analisis reguler, perdebatan/diskusi, komunikasi, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memainkan peran secara optimal dalam mencapai strategi pembangunan berkelanjutan. Bagian ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

salah satunya berkaitan dengan energi. Energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Salah satu contoh energi terbarukan dituangkan melalui program energi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu program DME yang diberlakukan di daerah yang memiliki potensi energi.

C. Desa Mandiri Energi (DME)

1. Pengertian Desa Mandiri Energi (DME)

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013, Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk bahan bakar nabati, selanjutnya disebut (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri. Direktur Jendral, Dirjen Minerba melakukan pembinaan atas pelaksanaan kewajiban pemanfaatan *biofuel* sebagai bahan bakar lain sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Direktur Jendral, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba dan Kepala Badan Pengatur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemanfaatan *biofuel* sebagai bahan bakar lain sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Program Desa Mandiri Energi yaitu, program penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat baik berbasis BBN maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, program DME mulai memanfaatkan teknologi energi baru terbarukan seperti, mikrohidro, angin dan surya sebagai pembangkit energi alternatif. Berdasarkan bahan baku sumber energi yang digunakan, Desa Mandiri Energi dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi non pertanian. Model desa mandiri ini adalah mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti surya (matahari), air, dan angin.

- 2) Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi pertanian. Model desa mandiri ini adalah mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian dan hutan (www.indonesia.go.id).

Konsep pembangunan DME merupakan pembangunan yang berdasarkan potensi lingkungan untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengamatan terhadap potensi lingkungan dan karakteristiknya sangat penting. Konsep pembangunan Desa Mandiri Energi antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Bagaimanakah menerapkan pendekatan pengembangan energi lokal tanpa merusak lingkungan dan pemberdayaan ekonomi produktif setempat dalam rangka terwujudnya DME;
- b) Bagaimanakah mengembangkan kelembagaan untuk mendorong masyarakat yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan;
- c) Bagaimanakah mengembangkan pengolahan dengan menggunakan paket teknologi konversi sumber energi terbarukan dalam konteks DME.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menghubungkan sistem pembangkit energi terbarukan dengan usaha bisnis dan lingkungan. Olahan energi terbarukan dapat dimanfaatkan oleh kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan energi terbarukan untuk siang hari, sedangkan di malam hari dapat dipergunakan untuk kebutuhan dasar energi rumah tangga seperti penerangan. Fittrin (2010) menyatakan bahwa:

Identifikasi komposisi masyarakat merupakan kegiatan pertama untuk membangun sebuah Desa Mandiri Energi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat sebagai dasar untuk pembentukan lembaga pengelola sistem pembangkit energi terbarukan. Karakteristik

masyarakat yang perlu diketahui antara lain adalah tingkat pendidikan, mata pencaharian, waktu kerja, hierarki sistem hukum desa setempat dan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Langkah selanjutnya, pembangunan pembangkit sumber energi. Diawali dengan identifikasi potensi energi terbarukan di desa setempat, perancangan sistem pembangkit dan pelaksanaan pembangunan sistem pembangkit. Untuk keberlangsungan sistem pembangkit dan jaringannya, dilakukan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa dan pengurus kelembagaan yang bertugas sebagai pengelola yang telah dibentuk sebelumnya. Pelatihan yang diberikan meliputi prosedur perawatan yang terangkum dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), cara penanggulangan kerusakan, dan pembukuan. Diharapkan melalui pelatihan tersebut, masyarakat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya demi keberlangsungan sistem pembangkit energi.

2. Dasar Hukum Desa Mandiri Energi (DME)

Pelaksanaan program Desa Mandiri Energi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang aturan pemerintah pusat. Dasar hukum kebijakan program Desa Mandiri Energi antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- b) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.
- c) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

(www.esdm.malangkab.go.id).

3. Tujuan Desa Mandiri Energi (DME)

Program DME dimaksudkan untuk sebagai *entry point* dalam kegiatan ekonomi pedesaan. Disamping itu pengembangan program DME diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*Pro-Poor*), memperkuat ekonomi nasional (*Pro-Growth*) dan memperbaiki lingkungan (*Pro-Planet*) (www.indonesia.go.id). Program pembangunan berkelanjutan, seperti program DME dibutuhkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Peran pemerintah daerah tersebut nantinya akan membawa proses kemajuan bagi daerah itu sendiri. Daerah mempunyai kewenangan (otonomi) untuk mencanangkan program-program sesuai dengan kekhasan daerah yang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

D. Faktor-Faktor dalam Pelaksanaan Pembangunan

1. Faktor Pendorong Pembangunan

Menurut beberapa ahli, faktor-faktor yang mendukung atau pendorong pelaksanaan pembangunan nasional antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): SDM juga menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sedangkan kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

- b. Sumber Daya Modal: dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan.
- c. Sistem sosial masyarakat: dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan nasional dapat terwujud (dari rakyat, untuk rakyat).
- d. Dukungan politik

2. Faktor Penghambat Pembangunan

Menurut Susilowati (2011), faktor penghambat pembangunan di negara sedang berkembang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penghambat dari dalam negeri dan dari luar negeri.

a. Faktor dalam negeri

1) Penduduk

Peran penduduk sebagai faktor penghambat dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Produktivitas penduduk yang rendah: Penduduk di negara berkembang ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang terbelakang. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah ini dapat dilihat dengan semakin tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan selanjutnya dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan ini

mengakibatkan kemampuan untuk melakukan tabungan menjadi rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan investasi menjadi rendah. Negara berkembang menjadi kekurangan investasi/modal untuk menjalankan pembangunan ekonominya.

- b) Distribusi penduduk yang tidak merata: Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar pada umumnya tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk hanya terfokuskan pada suatu daerah tertentu, sedang daerah lainnya justru ada yang kekeurangan penduduk atau jumlah sangat sedikit. Penyebaran penduduk yang kurang merata ini jelas tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Akibatnya dapat mengakibatkan pembagian pendapatan menjadi tidak merata atau timpang.

2) Dualisme

Pengertian dualisme itu sendiri dapat diartikan sebagai adanya dua sistem yang sangat berbeda dan kedua-duanya wujud secara berdampingan. Adapun macam dari dualisme itu sendiri adalah:

- a) Dualisme Sosial: Dikemukakan oleh Boeke bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Sistem sosial yang satu modern sedang yang lainnya tradisional. Sistem sosial yang lebih modern ini terutama berasal dari negara-negara barat.

- b) Dualisme Teknologi: Higgins (1956) menyatakan bahwa suatu keadaan dimana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas.
- c) Dualisme Finansial: Myint (1967) menyatakan bahwa dimana ada pasar modal (uang) yang sangat berbeda, ada yang terorganisir (melalui bank, bursa efek) dan tidak terorganisir (tuan tanah, rentenir).
- d) Dualisme Regional: Adanya ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara, yang mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Misal dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

3) Lingkaran Perangkap Kemiskinan (*The Vicious Cycles*)

Suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan, dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Nurske penyebab utama adanya lingkaran perangkap kemiskinan ini adalah adanya hambatan dalam menciptakan tingkat penanaman modal di negara berkembang. Nurske berpendapat,

bahwa ada dua penyebab terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan ini yaitu:

- a) Dari segi penawaran modal
 - b) Dari segi permintaan modal
- b. Faktor Luar Negeri

Faktor luar negeri merupakan hubungan dengan dunia internasional. Hubungan ini dapat berupa hubungan politik maupun ekonomi. Faktor-faktor luar negeri yang menjadi penghambat pembangunan di negara sedang berkembang adalah:

- 1) Perdagangan luar negeri: Sebagian ekspor adalah barang-barang hasil pertanian, pertambangan, perikanan yg semuanya berbentuk bahan mentah. Bahan baku tersebut jenisnya sangat terbatas.
- 2) Proses sebab akibat kumulatif: Yaitu sebab-sebab dari bertambah buruknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah, dalam suatu negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik atau metode tertentu yang akan menjadi acuan dalam melakukan sebuah proses penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Zuriah, 2007: 47). Penelitian deskriptif membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2006: 4).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolat) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010:13-15). Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan program Desa Mandiri Energi dalam perspektif *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) di Desa

Pangungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Pasolong, 2012:161). Metode yang digunakan oleh peneliti dipandang tepat dan sesuai antara karakteristik penelitian kualitatif dengan fenomena yang dikaji. Penggunaan metode kualitatif oleh peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dua fenomena yaitu, pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development* dan faktor yang mendukung dan menghambat program DME di Desa Pangungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait

dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2010: 285-287).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan mengacu pada kajian teoritis, maka fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development* di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, meliputi:
 - a. Peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program DME di Desa Panggungrejo
 - 1) Pemerintah
 - 2) Swasta
 - 3) Masyarakat (pelaku *home industri*).
 - b. Institusi (kelembagaan)
 - c. Regulasi (aturan)
 - d. Bentuk dan Lingkup Kegiatan dalam Pelaksanaan DME Berbasis PLTMH
 - e. Dampak DME yang berbasis pembangunan berkelanjutan
 - 1) Ekonomi
 - 2) Sosial Budaya
 - 3) Lingkungan

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Sumber Daya Alam (SDA)

b. Faktor Penghambat

- 1) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Pengawasan Pemerintah
- 4) Anggaran Dana

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan salah satu Desa Mandiri Energi (DME) di Kabupaten Malang. Kawasan ini merupakan ibukota Kabupaten Malang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kawasan ini memiliki pengembangan usaha niaga dan industri yang memanfaatkan sumber energi listrik secara gratis yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kalisukun sehingga produk dan jasa yang dihasilkan lebih kompetitif. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengembangan

program DME di Desa Panggungrejo dalam perspektif *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Situs penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Panggungrejo, zona usaha produktif di masing-masing krajan, masyarakat, Dinas ESDM Kabupaten Malang. Pemilihan situs ini karena pada lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat serta relevan mengenai pelaksanaan program DME yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development*. Penetapan lokasi dan situs penelitian juga didasari atas pertimbangan pribadi peneliti, yaitu:

1. Desa Panggungrejo salah satu desa energi terbarukan yang dikembangkan oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang.
2. Jarang penelitian yang memfokuskan untuk melakukan penelitian tentang program Desa Mandiri Energi berbasis PLTMH dalam perspektif *sustainable development*.
3. Program DME merupakan alternatif cara untuk menciptakan dan mengembangkan energi terbarukan.
4. Program DME merupakan kebijakan yang didasarkan pada potensi suatu daerah yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer yang disebut

informan sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti dapat memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada lokasi dan situs penelitian di atas. Peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan, peneliti memilih informan pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.
2. Dokumen, yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program DME serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak lainnya. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian.
3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan program DME yang berbasis *sustainable development*.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini membagi data menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dengan melakukan pengamatan dan melalui informan. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Adapun informan

yang memberikan data melalui kegiatan wawancara terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Energi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Malang.
 2. Bapak Edi Isnomo selaku Kepala Desa Panggungrejo.
 3. Bapak Hariono selaku Sekretaris Desa Panggungrejo.
 4. Mas Hanafi selaku Ketua Karang Taruna Desa Panggungrejo.
 5. Bapak Ali (Lidya Kue) selaku pelaku usaha ekonomi produktif dari krajan makanan Desa Panggungrejo.
 6. Bapak Sujono selaku ketua kelompok dari krajan makanan tahu organik Desa Panggungrejo.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip dan peraturan perundangan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 Tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS.”
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 07 / 33a /421.604.005 / SK / 2013 tentang Pembentukan Kelompok KRAJAN KUNING EMAS.
 3. Laporan Hasil Survey Lapangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
 4. Profil Desa Panggungrejo Tahun 2013.
 5. Hasil dokumentasi Karang Taruna Desa Panggungrejo Tahun 2013.

6. Hasil dokumentasi kegiatan perindustrian di masing-masing KRAJAN Tahun 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk: (1) mendapatkan data di tangan pertama (primer), (2) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, (3) menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman dan Akbar, 2006: 57-58). Peneliti melakukan wawancara sejak penelitian pertama hingga data yang diperoleh lengkap dan bisa menjawab rumusan masalah, fokus dan tujuan penelitian.
2. Teknik dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis dan arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

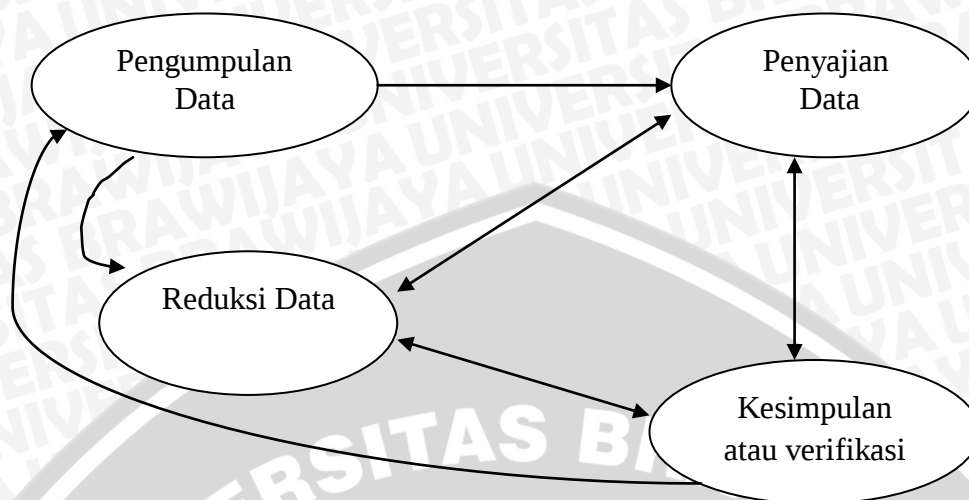
F. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010:147-148). Penelitian ini menggunakan instrumen atau alat sebagai berikut:

- a. Peneliti sendiri, yang selama menjalankan penelitian akan dilakukan sendiri dan tidak diwakilkan oleh orang lain, baik melalui wawancara maupun observasi.
- b. Pedoman-pedoman wawancara, hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian.
- c. Peneliti menggunakan beberapa alat penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui *hand phone* dan kamera serta buku saku.

G. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan keberlanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru (Sarwono, 2006: 261). Melakukan analisis data dalam suatu penelitian dimulai sejak penelitian mulai direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh karakteristik dan jenis analisis data yang dapat dipergunakan secara efisien dan efektif. Menurut Milles dan Huberman dalam Ghony dan Almansyur (2012: 308) menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif: Milles dan Huberman

Sumber: Ghony dan Almansyur (2012:308)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Profil Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Pasal 1, dengan Peraturan Pemerintah ini, ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Kecamatan Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibukota kabupaten. Di bagian utara Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra

Hindia, serta di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 378 desa. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, sehingga Malang menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur serta berpotensi sebagai daerah pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya.



Gambar 3. Peta Kabupaten Malang

Sumber: www.malangkab.go.id

b. Sejarah

Kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185-1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Menurut Folklore, pada masa-masa keruntuhan itu muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai *Malang Kutho Bedhah*. Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan

sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati, Candi Singhasari di Kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara, Candi Jago/Jajaghu di Kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana. Bukti peninggalan sejarah yang berupa candi-candi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan Tumpang
Sumber: www.malangkab.go.id



Gambar 5. Candi Singhasari di Kecamatan Singosari
Sumber: www.malangkab.go.id



Gambar 6. Candi Jago/Jajaghu di Kecamatan Tumpang
Sumber: www.malangkab.go.id

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati. Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16.

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 *Nopember* 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

c. Visi dan Misi

a) Visi:

“Pada Tahun 2015 terwujudnya Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB).”

Penjelasan:

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu: mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya asing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 (lima) tahun yang akan datang ini di perlukan upaya memujudkan:

1. Mandiri: yang di maknai dengan pertama, kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua, kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin

berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

2. Agamis: yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. Demokratis: yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.
4. Produktif: yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
5. Maju: yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. Aman: yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat,

jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

7. Tertib: yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. Berdaya Saing: yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filsafati pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spiritual disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi), dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingi diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga kesejahteraan secara spiritual dan batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

b) Misi

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan ritual sesai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial.
3. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan.

5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang mem-prasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis.
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender.
7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan.
8. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
9. Membangun sumberdaya manusia yang "Berdaya Saing" tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

d. Potensi Energi

Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, dimana terdapat potensi energi. Kabupaten Malang memiliki posisi strategis jika ditinjau dari aspek topografi, yaitu posisinya di bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Daerah hulu sungai merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sumber daya air, baik alami maupun buatan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gambaran energi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Potensi sungai untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) cukup tinggi dan masih memungkinkan.
2. Populasi sapi perah cukup tinggi, yaitu 225.000 ekor (tahun 2013) sehingga masih memungkinkan untuk membangun 60.000an digester biogas.
3. Pembangunan jaringan distribusi listrik untuk pemerataan dan penyediaan energi listrik di pedesaan.
4. Pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tipe SHS untuk penerangan dusun-dusun yang belum teraliri listrik dan rumah tangga miskin.

Penghematan energi skala nasional dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat pedesaan sesuai dengan potensi lokal yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Malang saat ini sedang mengembangkan potensi energi terbarukan melalui program Desa Mandiri Energi (DME) yang berkelanjutan. Di Kabupaten Malang sudah terdapat beberapa bangunan yang siap dioperasikan untuk menghasilkan energi terbarukan, antara lain:

- a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 6 unit pembangkit, dengan total kapasitas mencapai 160,68 MVA
- b) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH): 6 unit pembangkit, dengan total kapasitas 150 KVA
- c) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tipe SHS: 1.357 unit, dengan masing-masing kapasitas 50 Wp

- d) Instalasi reaktor biogas: 4.557 unit

2. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kabupaten Malang

a. Profil Dinas ESDM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang secara merata. Adanya wewenang daerah otonomi untuk mengatur, mengurus dan mengelola sumber daya nasional yang ada di wilayah, maka eksploitasi dan eksplorasi bahan galian tambang harus diatur, diurus, diawasi dan dikelola secara cermat dan hati-hati bagi kemakmuran masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional pemerintah daerah serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah dibentuk Dinas yang menangani pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Kabupaten Malang tahun 2006-2011 telah diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

- a) Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan dalam sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah;
- b) Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam masih rendah;
- c) Kurangnya penegakan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- d) Meningkatnya jumlah penduduk;
- e) Permasalahan lintas batas antar daerah.

Isu-isu tersebut diatas diharapkan adanya perubahan pola pikir anggota masyarakat menjadi mencintai alam dengan harapan antara lain:

1. Dari usaha penambangan liar menjadi penambang secara teknis;
2. Dari pengguna sumber daya menjadi peningkat konservasi sumber daya alam;
3. Memahami dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pertambangan dan energi;
4. Tertatanya kawasan tambang sesuai kaidah tehnik penambangan.

b. Visi dan Misi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut.

a) Visi:

Terwujudnya pembangunan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan: Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) untuk kesejahteraan masyarakat.

b) Misi:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pertambangan dan geologi yang demokratis, produktif, aman, tertib dan berdaya saing;
2. Mendorong terwujudnya pembangunan ketenagalistrikan di pedesaan dan pengembangan energi mandiri yang berkelanjutan serta Energi Baru Terbarukan (EBT);
3. Mendorong terwujudnya pengelolaan, pengusahaan sumber daya minyak dan gas serta panas bumi (Geothermal);
4. Mendorong terwujudnya pengelolaan air tanah untuk penyediaan air baku bagi masyarakat dan pemanfaatan lainnya.

c. **Tugas dan Fungsi**

a) Tugas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral;

7. Pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP) dan *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang wajib dilaksanakan bidang energi dan sumber daya mineral;
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
10. Pemberian rekomendasi teknik dan pelaksanaan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
11. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

d. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas (Eselon II b)
2. Sekretaris (Eselon III a)
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV a)
 - b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IV a)

- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV a)
 3. Bidang Pertambangan dan Migas (Eselon III a)
 - a. Seksi Penataan Pertambangan dan Migas (Eselon IV a)
 - b. Seksi Pemanfaatan, Penguasaan Pertambangan dan Migas (Eselon IV a)
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pertambangan dan Migas (Eselon IV a)
 4. Bidang Air Tanah (Eselon III a)
 - a. Seksi Penataan dan Pengolahan Air Tanah (Eselon IV a)
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah (Eselon IV a)
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah (Eselon IV a)
 5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (Eselon III a)
 - a. Seksi Penataan Pengolahan Energi dan Ketenagalistrikan (Eselon IV a)
 - b. Seksi Pemanfaatan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan (Eselon IV a)
 - c. Seksi Pengawasan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan (Eselon IV a)
 6. Bidang Kegeologian (Eselon III a)
 - a. Seksi Penataan Wilayah Geologi (Eselon IV a)
 - b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Eselon IV a)
 - c. Seksi Geologi Tata Lingkungan (Eselon IV a)

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Disamping struktur organisasi diatas di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 35 orang PNS, 6 orang tenaga kontrak dengan tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu:

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan S2	9	25,7
2.	Pendidikan S1	18	51,4
3.	Sarjana Muda	1	2,9
4.	Pendidikan D3	-	0
5.	Pendidikan SLTA	6	17,1
6.	Pendidikan SLTP	-	0
7.	Pendidikan SD	1	2,9
	Jumlah	35	100

Sumber: www.esdm.malangkab.go.id

Pengelompokan menurut golongan ruang dan kepangkatan adalah sebagai berikut:

1. Golongan IV : 5 Orang
2. Golongan III : 28 Orang
3. Golongan II : 2 Orang
4. Golongan I : - Orang

3. Gambaran Umum Desa Panggungrejo

a. Profil Desa Panggungrejo

Desa Panggungrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sebelah utara Desa Panggungrejo berbatasan dengan Desa Cempokomulyo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangunrejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatikerto dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedung Pendaringan.



Gambar 7. Peta Desa Panggungrejo

Sumber: Profil Desa Panggungrejo 2013

Desa Panggungrejo terbagi menjadi 37 RT dan 6 RW. Desa Panggungrejo berdasarkan data administrasi kependudukan desa memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.563 jiwa dari 2.076 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 3.754 laki-laki dan 3.724 perempuan.

Adapun jumlah penduduk Desa Panggungrejo berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4	652	8,6
2	5-9	680	9
3	10-14	550	7,2
4	15-19	575	7,6
5	20-24	813	10,7
6	25-29	755	10
7	30-34	676	8,9
8	35-39	745	9,8
9	40-44	539	7,1
10	45-49	468	6,1
11	50-54	401	5,3
12	55-58	242	3,1
13	>59	758	10
Jumlah		7.563	100

Sumber: Profil Desa, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Panggungrejo terbanyak berusia 20-24 tahun yaitu sejumlah 813 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berusia 55-58 tahun yaitu sejumlah 242 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Panggungrejo memiliki usia produktif yaitu usia 20-49 tahun yang berjumlah 3.996 jiwa.

b. Kondisi Masyarakat

1) Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam waktu jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panggungrejo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Penduduk Buta Huruf	125	2,7
2	Penduduk tidak tamat SD	952	20,4
3	Penduduk tamat SD	341	7,3
4	Penduduk tamat SMP	1503	32,2
5	Penduduk tamat SMA	1531	32,8
6	Penduduk tamat Diploma	164	3,5
7	Penduduk tamat Sarjana (S1)	48	1,02
Jumlah		4664	100

Sumber: Profil Desa 2013

Melihat tabel di atas mayoritas penduduk Desa Panggungrejo hanya mampu menyelesaikan pendidikan formal di jenjang SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panggungrejo mempunyai tingkat pendidikan yang cukup baik, meskipun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hanya berjumlah 48 jiwa. Setidaknya masyarakat tersebut telah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun.

2) Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam diri manusia, tanpa fisik yang sehat maka manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan sering menjadi masalah yang dialami oleh masyarakat khususnya dipedesaan. Mereka cenderung tidak memperhatikan kebersihan, asupan gizi dan kondisi lingkungan, padahal kedua hal tersebut kunci dari hidup sehat. Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Desa Panggungrejo terbilang baik, meskipun ada beberapa penduduk yang menderita cacat mental dan fisik.

Tabel 7. Penduduk Cacat Mental dan Fisik

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tuna Wicara	4	16
2	Tuna Rungu	12	48
3	Tuna Netra	5	20
4	Lumpuh	2	8
5	Cacat Mental	2	8
Jumlah		25	100

Sumber: Profil Desa 2013

3) Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Panggungrejo teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu rumah tangga (*home industry*) yang dikelompokkan dalam beberapa krajan (zona industri), jasa/perdagangan, pertanian dan sektor lainnya.

Tabel 8. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	407	46,4
2	Pekerja di sektor jasa	119	13,7
3	Pekerja di sektor industri	305	34,7
4	Pekerja di sektor peternakan	47	5,4
Jumlah		878	100

Sumber: Profil Desa 2013

c. Potensi Energi

Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Malang cukup banyak, antara lain penyediaan air baku untuk air bersih, irigasi, industri, pariwisata dan pembangkit listrik. Sejak tahun 2006 di Desa Panggungrejo telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang terletak di Kali Sukun dengan kapasitas terpasang 2 x 50 kVA. PLTMH ini nantinya dikembangkan untuk menciptakan energi listrik sebagai sumber energi terbarukan. Melihat potensi PLTMH khususnya di Desa Panggungrejo yang cukup besar, maka pemanfaatannya perlu dilakukan dengan pengelolaan yang terencana dan terprogram dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam perspektif *sustainable development* di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Maksud dilaksanakannya kegiatan DME bernama Kampung Usaha Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andal Sejahtera (KUNING EMAS) adalah untuk memberdayakan masyarakat di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen dengan prioritas pengarusutamaan gender (nuansa gender) dengan memanfaatkan sumber daya energi PLTMH untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang bermanfaat berupa industri,

niaga dan kegiatan yang berdampak kepada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat serta dalam upaya mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” demi terwujudnya “SATATAGAMA KARTA RAHARJA.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

“Tujuan dilaksanakannya DME “KUNING EMAS” untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kali Sukun yang terjangkau dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.”

(Sumber: Wawancara, 6 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

Kali Sukun merupakan sungai yang mengalir di kawasan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sungai ini mempunyai lebar sepanjang 6,50 meter dengan debit air sungai 1,5 (m^3/detik). Kali Sukun memiliki tinggi head (tinggi jatuh air) sungai sepanjang 12 meter dengan jenis bangunan berupa bendung. Kondisi Kali Sukun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Kali Sukun

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Struktur PLTMH Kali Sukun terdiri dari *trash rack*, pipa pesat (*penstock*), penampungan air, turbin, *generator distribution panel*, *ballast load control*, *synchronize control* serta rumah pembangkit (*power house*). *Trash rack* adalah saringan yang terbuat dari plat besi yang berfungsi menyaring sampah-sampah atau puing-puing agar tidak masuk ke dalam bangunan selanjutnya. *Trash rack* diletakkan pada posisi melintang di bangunan. Syarat-syarat *trash rack* antara lain: (1) *Trash rack* tidak boleh terbuat dari bambu atau kayu. *Trash rack* harus dibuat dengan menggunakan besi pejal dengan diameter minimal 4 mm atau besi plat dengan ketebalan minimum 3 mm; (2) *Trash rack* dipasang dengan bukaan yang relatif lebar tergantung kepada karakter ukuran sampah dengan bukaan minimal 5 cm dan maksimum 10 cm; (3) *Trash rack* harus mampu menahan tekanan air karena adanya penyumbatan pada kondisi air penuh; (4) Kemiringan *trash rack*

paling tidak adalah 65 - 75 derajat dari dataran sehingga memudahkan untuk pembersihan; serta (5) *Trash rack* harus bisa dilepas dari struktur sipil untuk akses perbaikan dan pembersihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

“*Trash rack* atau saringan air dipasang didepan pintu yang berfungsi untuk menahan sampah-sampah maupun batu-batu yang mungkin terbawa oleh air agar tidak ikut masuk ke dalam saluran (pipa pesat).”
(Sumber: Wawancara, 12 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB)



Gambar 9. Trash Rack

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Pipa pesat (*penstock*) ini berguna untuk membawa air jatuh kearah mesin turbin. Pipa pesat juga mempertahankan tekanan air jatuh, sehingga energi di dalam gerakan air tidak terbuang.



Gambar 10. Pipa Pesat (*penstock*)

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Penampung air atau yang sering disebut dengan bak penenang (*forebay*) adalah sebagai tempat penenang air dan pengendapan akhir. *Forebay* merupakan tempat permulaan pipa pesat (*penstock*) yang mengendalikan aliran minimum, sebagai antisipasi aliran yang cepat pada turbin, tanpa menurunkan elevasi yang berlebihan dan menyebabkan arus balik pada saluran. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

“Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit dalam pipa pesat (*penstock*) dan saluran pembawa karena fluktuasi beban, disamping itu juga sebagai pemindah sampah terakhir (tanah, pasir, kayu yang mengapung) dalam air yang mengalir. Bak penenang juga dilengkapi saringan (*trashrack*) dan pelimpas (*spillway*).”

(Sumber: Wawancara, 12 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB)



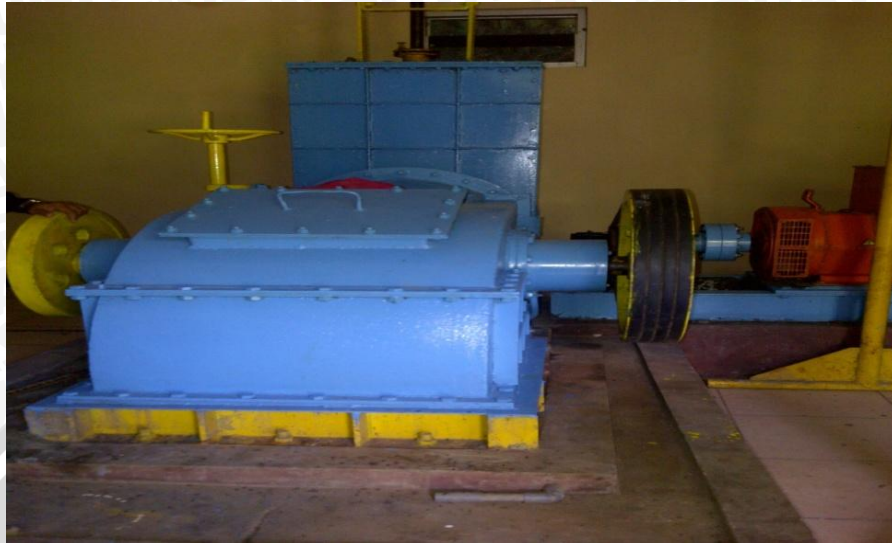
Gambar 11. Penampungan Air

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros. Putaran poros turbin ini akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Menurut keterangan dari Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

“Turbin yang kita gunakan adalah tipe turbin *impuls low head power plant*. Tujuannya memfokuskan ketika air menghantam dan memutar turbin, selain itu air yang tersisa pada sendok turbin dapat memberi beban pada turbin untuk membantu putaran tersebut semakin kencang. Air yang memiliki tekanan dan kecepatan tertentu menumbuk sudut-sudut turbin dan memutar *runner* turbin sehingga berputar dengan daya yang sebanding dengan daya dari potensi air”

(Sumber: Wawancara, 12 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB)



Gambar 12. Turbin PLTMH

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Generator distribution panel berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis serta menstabilkan tegangan. Generator distribution panel pada PLTMH Kali Sukun Desa Panggungrejo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Generator Distribution Panel

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Ballast load control berfungsi sebagai pengatur speed turbin untuk sistem pembangkit dengan generator sinkron. Prinsip kerja pengatur beban elektronis ini adalah akan memonitor frekuensi sistem secara terus-menerus. Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa:

“Frekuensi hasil monitor akan dibandingkan dengan frekuensi offset (nilai frekuensi yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan nilai toleransi yang diijinkan). Hasil dari perbandingan digunakan untuk mengatur besar-kecilnya *ballast loads* secara otomatis yakni dengan cara menambah atau mengurangi *ballast loads* sebagai kompensasi beban utama yang pemakaiannya tidak menentu, sehingga diharapkan total beban generator PLTMH akan terjaga pada beban aman dan putaran generator menjadi relatif mendekati putaran konstan.”
(Sumber: Wawancara, 12 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB)



Gambar 14. Ballast Load Control

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

Rumah pembangkit (*power house*) berfungsi sebagai rumah tempat semua peralatan mekanik dan elektrik PLTMH. Peralatan mekanik seperti turbin dan generator. Berikut ini adalah gambar rumah pembangkit PLTMH Kali Sukun:



Gambar 15. Rumah Pembangkit (*Power House*)

Sumber: Dokumentasi, Kamis 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB

a. Peran Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program DME di Desa Panggungrejo

1) Pemerintah

Pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” mendapat dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (SKPD). SKPD tersebut mendampingi masyarakat Desa Panggungrejo untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mereka tekuni. Bantuan berupa alat/mesin produksipun diberikan guna

menunjang usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariono selaku Sekretaris Desa Panggungrejo adalah sebagai berikut:

“Beberapa SKPD telah melakukan sosialisasi, pelatihan dan juga pemberian bantuan yang berupa alat/mesin produksi kepada masyarakat yang terjun ke dalam KUNING EMAS. Misalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar memberikan bantuan mesin jahit, mesin produksi tahu, kompor kepada masing-masing KRAJAN”.

(Sumber: Wawancara, Jumat 21 februari 2014 Pukul 09.15 WIB)



Gambar 16. Bantuan Mesin Jahit dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Sumber: Dokumentasi, Senin 10 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB



Gambar 17. Bantuan Mesin Produksi Tahu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Sumber: Dokumentasi, Senin 10 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB

2) Swasta

Demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, maka peran *stakeholder* sangat menentukan keberlanjutan pembangunan tersebut. Peran pihak swasta juga turut andil dalam pembangunan PLTMH Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Peran swasta dalam program DME “KUNING EMAS” ini tidak bersifat langsung. Swasta hanya sebagai melakukan tugas atau proyek yang dimenangkan melalui pengadaan barang secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Edi Ismono selaku Kepala Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen adalah sebagai berikut:

“Peran swasta dalam pembangunan PLTMH Kali Sukun yaitu sebagai penyedia atau pengadaan alat/mesin. Selain itu swasta juga sebagai pemasok (penyedia) bahan baku kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif. Penyediaan alat/mesin PLTMH Kali Sukun bekerjasama dengan Boma Bisma Indra (BBI).”

(Sumber: Wawancara, Jumat 21 februari 2014 Pukul 09.00 WIB)

3) Masyarakat (pelaku *home industry*).

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengembangan program DME “KUNING EMAS.” Pada dasarnya masyarakat Desa Panggungrejo sangat mendukung program ini, meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana konsep program DME “KUNING EMAS.” Hal ini ditunjukkan dengan adanya antusiasme mereka terhadap peran yang ditekuninya, yaitu usaha ekonomi produktif. Masyarakat merasa terbantu, khususnya di bidang perindustrian dan perekonomian.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program DME “KUNING EMAS” salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 18. Sosialisasi Program DME “KUNING EMAS”
Sumber: Dokumentasi Desa Panggungrejo 2013

Selain upaya sosialisasi, pemerintah juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Desa Panggungrejo. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang perindustrian. Masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi produktifnya agar perekonomian mereka meningkat, sehingga kesejahteraanpun dapat mereka rasakan. Pelatihan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 19. Pelatihan Industri Tahu Organik
Sumber: Dokumentasi Desa Panggungrejo 2013

Sejauh ini masyarakat terlibat aktif dalam mengikuti serangkaian program pelatihan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rata-rata kaum perempuan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dengan adanya program DME “KUNING EMAS” para ibu rumah tangga mendapat sosialisasi,

pelatihan dan bantuan alat produksi dari pemerintah untuk mengembangkan usaha produktif mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sujono sebagai Ketua Kelompok KRAJAN

Tahu Organik adalah sebagai berikut:

“Produksi kami menggunakan bahan baku organik dan tidak menggunakan pengawet makanan. Selain itu, tidak ada limbah yang terbuang dan mencemari lingkungan. Kami juga aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah demi peningkatan hasil produksi kami.”

(Sumber: Wawancara, 10 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

Di Desa Panggungrejo banyak dijumpai masyarakat yang berprofesi sebagai penjahit. Guna menunjang ketrampilannya tersebut, maka pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pelatihan kewirausahaan pada KRAJAN Bordir. Adanya pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat mampu mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Hariono selaku Sekretaris Desa Panggungrejo:

“Pelatihan kewirausahaan pada KRAJAN Bordir ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adanya pelatihan ini diharapkan agar masyarakat mempunyai ketrampilan yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana dan sumber penghasilan mereka. Istilahnya ketrampilan tambahan, khususnya untuk para ibu-ibu.”

(Sumber: Wawancara, 7 Mei 2014 Pukul 09.30 WIB)



Gambar 20. Pelatihan Kewirausahaan KRAJAN Bordir
Sumber: Dokumentasi Desa Panggungrejo 2013

Pelatihan lainnya yaitu pelatihan kewirausahaan KRAJAN Batik. Batik merupakan salah satu usaha yang mempunyai nilai tinggi, oleh karena itu pemerintah ingin mengembangkan usaha batik malang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hariono selaku Sekretaris Desa Panggungrejo.

“Selain KRAJAN makanan, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan pada KRAJAN Batik. Pemerintah ingin mengembangkan batik karena batik mempunyai nilai yang tinggi. Selain itu di Malang sendiri masih jarang dijumpai pengrajin batik. Tidak ada salahnya jika masyarakat Desa Panggungrejo mengembangkan batik Malang.”

(Sumber: Wawancara, 7 Mei 2014 Pukul 09.30 WIB)



Gambar 21. Pelatihan Kewirausahaan KRAJAN Batik
Sumber: Dokumentasi Desa Panggungrejo 2013

b. Institusi (kelembagaan)

Program DME “KUNING EMAS” dapat berjalan dengan baik jika didalamnya terdapat lembaga pengelola atau lembaga manajemen yang mengatur dan memfasilitasi program tersebut. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga teknis yang menangani energi telah melaksanakan program DME yaitu program penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat. Lembaga yang terkait dengan program ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral adalah sebagai berikut:

“Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan *leading sector* dari pelaksanaan DME. Pelaksanaan DME “KUNING EMAS” juga

didukung oleh seluruh SKPD Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan DME ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur tentang bagaimana pendistribusian listrik, sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada warga masyarakat.

(Sumber: Wawancara, Kamis 6 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB).

Selain itu Organisasi Karang Taruna Desa Pangungrejo juga turut andil dalam pengelolaan DME “KUNING EMAS.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Hanafi selaku Ketua Karang Taruna Desa Pangungrejo adalah sebagai berikut:

“Karang Taruna berperan membantu masyarakat dalam mengembangkan KUNING EMAS. Kami pihak Karang Taruna juga membantu memutar modal untuk para pelaku usaha ekonomi produktif di masing-masing KRAJAN. Program ini akan berhasil jika seluruh lembaga terkait saling mendukung dan secara nyata memfasilitasi seluruh kegiatan dalam kegiatan ini secara terus-menerus.”

(Sumber: Wawancara, Minggu 16 Maret 2014 Pukul 09.15 WIB)

DME “KUNING EMAS” dikelola oleh sebuah lembaga manajemen yang dibentuk (kontrak manajemen) dengan tugas mengelola DME “KUNING EMAS.” Manajemen DME “KUNING EMAS” didukung oleh keberadaan kegiatan usaha ekonomi produktif di setiap KRAJAN (zona industri), sedangkan dukungan dana operasional manajemen DME “KUNING EMAS” berasal dari sebagian keuntungan 11 (sebelas) KRAJAN. Kegiatan usaha ekonomi produktif diatur dengan prinsip saling menguntungkan yang dikelola secara transparan dan akuntabel, agar manajemen DME “KUNING EMAS” dapat berjalan sesuai dengan harapan dan berdampak positif terhadap para pelaku industri dan niaga di 11 (sebelas) KRAJAN, sehingga seluruh

komponen kegiatan dapat terjamin, baik dalam hal penyediaan bahan baku, modal, proses produksi, pemasaran dan lainnya secara berkelanjutan.

c. Regulasi (aturan)

Pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang aturan pemerintah pusat. Dasar hukum kebijakan program DME KUNING EMAS antara lain:

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yaitu Pasal 20 Ayat (4): Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan energi alternatif dari sumber daya dan potensi lokal serta sesuai dengan karakteristik wilayah pedesaan .
- f) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air bagi Perkantoran Instansi Pemerintahan, BUMN dan BUMD. Harus dilakukan penghematan pemakaian daya listrik sebesar 20 % yang dihitung dari pemakaian listrik rata-rata selama 6 (enam) bulan.
- g) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang sasaran kebijakan energi nasional: Tercapainya elastisitas energi <1 dan bauran energi primer yang optimal.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, yaitu Pasal 2 ayat (1): Konservasi energi nasional menjadi tanggung

jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Pasal 6 huruf (g): Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan konservasi energi.

Energi mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sehingga energi harus digunakan secara hemat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

“Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan sehari-hari, dimana energi itu sendiri sangat terbatas dan langka. Adanya sumber energi terbarukan sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, energi diatur oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan, agar pemanfaatan energi tepat guna dan tepat sasaran. Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat patuh dan taat terhadap pemanfaatan sumber energi”
(Sumber: Wawancara, Kamis 6 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

d. Bentuk dan Lingkup Kegiatan dalam Pelaksanaan DME Berbasis PLTMH

DME “KUNING EMAS” merupakan program rintisan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang untuk memberdayakan masyarakat sekitar lokasi PLTMH Kali Sukun di Desa Panggungrejo yang berbasis mandiri energi. Kegiatan usaha ekonomi produktif ini memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dikelola oleh sebuah manajemen secara professional, transparan dan

akuntabel dengan cara kontrak manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral adalah sebagai berikut:

“Program ini dirancang sebagai upaya untuk mendayagunakan PLTMH dengan kapasitas terpasang 2 x 50 kWH untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi produktif di Desa Panggungrejo. Bentuk program DME “KUNING EMAS” berupa kegiatan terpadu antara kegiatan usaha ekonomi produktif dengan pendayagunaan daya listrik dari PLTMH Kali Sukun. Manajemen perencanaan program DME “KUNING EMAS” dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan program yang meliputi tiga hal, yaitu (1) pembangunan jaringan distribusi dari PLTMH ke masing-masing KRAJAN; (2) sosialisasi untuk menginternalisasi usaha ekonomi produktif; dan (3) pembangunan kelembagaan, yaitu bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana mendesain outlet dan pemasaran produk serta pelatihan usaha ekonomi produktif.

(Sumber: Wawancara, Kamis 6 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

Kegiatan DME “KUNING EMAS” ini dilaksanakan berdasarkan sistem KRAJAN (zonasi) Rukun Tetangga (RT), dimana setiap KRAJAN diarahkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda. Desa Panggungrejo terbagi menjadi 37 RT dan 6 RW, apabila dilihat dari jumlah tersebut, maka perlu penyesuaian terhadap jumlah daya yang disediakan untuk setiap RT maupun KRAJAN yang direncanakan.

e. Dampak DME yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

1) Ekonomi

Pemaparan di atas telah dijelaskan bahwa tujuan DME adalah untuk memberdayakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan

konsep pembangunan berkelanjutan. Bagi sebagian orang, *home industry* merupakan usaha sampingan semata namun, bagi masyarakat Desa Panggungrejo *home industry* merupakan profesi pokok mereka setelah diluncurkannya program DME “KUNING EMAS.” Hasil wawancara dengan Bapak Ali sebagai Kelompok KRAJAN Makanan adalah sebagai berikut:

“Adanya program KUNING EMAS ini kami merasa cukup terbantu dalam perekonomian sehari-hari. Selain itu program ini juga memberi lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu khususnya yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang didapatkanpun terbilang lumayan.”

(Sumber: Wawancara, Senin 10 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan SK Bupati Malang Nomor: 180/57/KEP/421.013/2012, program DME “KUNING EMAS” menonjolkan pengarusutamaan gender, sehingga adanya kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti PKK, karang taruna, komunitas pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. DME “KUNING EMAS” dibagi menjadi beberapa KRAJAN (zona industri) yang merupakan bagian dari manajemen DME “KUNING EMAS” yang selanjutnya menjadi andalan bagi masyarakat Desa Panggungrejo untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pembagian KRAJAN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. KRAJAN DME “KUNING EMAS”

No	Nama KRAJAN	Pusat KRAJAN	Pemilik KRAJAN	Keterangan
1	Kerajinan	Jalan Jembatan RT 1 RW 3	Suliono	Ketua
	a. Tas	Jalan Simpang Sidodadi	Abdul Rohim	Anggota
	b. Uleg-uleg	Jalan Sawo	Buari	Anggota
2	Perbengkelan	Jalan Raya Tulaan RT 1 RW 3	Mat Koiri	Ketua
	a. Bengkel las “Setia Jaya”	Jalan Trunojoyo	Winarko	Anggota
	b. Bengkel las dan SPET	Jalan Trunojoyo	Abdus Salam	Anggota
	c. Reparasi sepeda	Jalan Sidodadi	Witono	Anggota
	d. Servis jok mobil	Jalan Sidodadi	Kariyono	Anggota
	e. Bengkel “Prima Perkasa”	Jalan Krapyak	Hari Subagyo	Anggota
	f. Bengkel sepeda motor	Jalan Sidodadi	Matsari	Anggota
	g. Servis Elektronik “Ilham”	Jalan Simpang Sidodadi	Anto	Anggota
	h. Bengkel las “Pujiartoko”	Jalan Salak	Suhendro Puji	Anggota
	i. Bengkel las “Wowo”	Tegaron RT 1 RW 5	Sudiono	Anggota
	j. Bengkel las “Dwi Mandiri”	Tulaan RT 1 RW 3	Kasmuri	Anggota
3	Pertukangan	Jalan Kramat RT 4 RW 4	Ali Muksin	Ketua
	a. Cor pilar	Jalan Sidodadi	Winarno	Anggota
	b. Meubel “Sutomo”	Jalan Sidodadi	Sutomo	Anggota
	c. Cor pilar	Jalan Krapyak	Kasiyan	Anggota
	d. Cor pilar	Jalan Krapyak	Akhmad Saiful	Anggota
	e. Cor pilar	Jalan Simpang Sidodadi	Bambang	Anggota
	f. Meubel “Mujiono”	Jalan Salak	Mujiono	Anggota
	g. Meubel “Agus”	Jalan Sawo	Agus Winarno	Anggota
	h. Meubel “Rejo Joyo”	Jalan Siku	Zaenal Fanani	Anggota
	i. Meubel “Tegaron”	Tegaron RT 5 Rw 5	Misnari	Anggota
	j. Pembuatan etalase “Sumber Alumunium”	Tulaan RT 3 RW 4	Adi Sungkowo	Anggota

No	Nama KRAJAN	Pusat KRAJAN	Pemilik KRAJAN	Keterangan
	k. Meubel “Noko”	Tulaan RT 2 RW 4	Suyatnoko	Anggota
4	Makanan a. Catering “Andriani Lastuti” b. Catering “Misiyani” c. Es Krim d. Catering kue “Azizah” e. Catering “Indah” f. Lidya Kue g. Catering “Sonah” h. Catering “Kasijati” i. Kue “Yeyen” j. Catering “Peristianie” k. Telur asin	Jalan Sawo RT 3 RW 2 Jalan Sidodadi Jalan Sidodadi Jalan Sidodadi Jalan Salak Jalan Salak Jalan Salak Jalan Salak Jalan Salak Jalan Sawo Tulaan RT 2 TW 4	Abdul Aziz Andriani Misiyani Tutik M. Azizah Indah Lidia Sonah M. Kasijati Yeyen Sugiarti Naniek P. Purwati	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5	Konveksi a. Penjahit “Lumayan” b. Penjahit “Supangat” c. Penjahit “Ani” d. Penjahit “Lilis” e. Penjahit “Sunariyah” f. Penjahit “Nurul” g. Penjahit “Yuli” h. Penjahit “Dian” i. Penjahit “Asmining” j. Penjahit “Restu” k. Penjahit “Tegaron” l. Penjahit “Tegaron”	Jalan Simpang Sidodadi Jalan Panji Jalan Sidodadi Jalan Sidodadi Jalan Krapyak Jalan Simpang Sidodadi Jalan Salak Jalan Sawo Jalan Sawo Jalan Sawo Tegaron RT 5 RW 5 Tegaron RT 3 RW 5	Nuruna’imah Supangat Suliani Lilis Suryani Sunariyah Nurul P. Yuli Farida Umiyati Asmining Idah Karyati Suprikah Harmiadin	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Percetakan a. Percetakan “Pepabri” b. Sablon “Tri Murdiyanto”	Jalan Salak RT 1 RW 2 Jalan Salak Jalan Salak	Ali Rahmat Heru Tri M.	Ketua Anggota

No	Nama KRAJAN	Pusat KRAJAN	Pemilik KRAJAN	Keterangan
	c. Bambang Sablon	Tulaan RT 5 RW 4	Bambang P.	Anggota
7	Persewaan	Jalan Sidodadi RT 5 RW 1		
	a. Munir alat pesta	Jalan Sidodadi	Munir	Ketua
	b. Studio musik “Rebirth”	Jalan Trunojoyo	Jasmari	Anggota
	c. Arema Express	Jalan Trunojoyo	Nanang S.	Anggota
	d. Rental mobil	Jalan Sidodadi	Suyanto	Anggota
	e. Biro instalasi	Jalan Sidodadi	Hariyanto	Anggota
	f. Rental mobil	Jalan Krapyak	Sugiono	Anggota
	g. Sidodadi wisata	Jalan Sidodadi	Beni Supriadi	Anggota
	h. Biro jasa teknik listrik	Jalan Sidomulyo	Muh. Erul	Anggota
	i. Mega sound	Jalan Salak	Dasud Kalia	Anggota
	j. Persewaan alat pesta “Wilis”	Jalan Sawo	Dwi Wibowo	Anggota
8	Bordir			
	a. Bodir	Jalan Sawo RT 4 RW 2	Mei Wulandari	Ketua
	b. Bodir	Tegaron RT 1 RW 5	Risa	Anggota
	c. Bodir	Tegaron RT 1 RW 5	Rupini	Anggota
9	Batik			
	a. Suprika	Tegaron RT 5 RW 5	Suprika	Ketua
	b. Sriatun	Tegaron RT 1 RW 5	Sriatun	Anggota
	c. Lilik	Jalan Simpang Sidodadi	Lilik	Anggota
	d. Misanatin	Jalan Sidodadi	Misanatin	Anggota
	e. Prapti	Jalan Sawo	Prapti	Anggota
10	Perikanan			
	a. Gurami	Jalan Sawo RT 4 RW 2	Agus Hilmi	Ketua
	b. Lele	Jalan Siku	Margani	Anggota

Sumber: SK Kepala Desa Panggungrejo Nomor: 07/33a/421.604.005/ SK/ 2013

2) Sosial Budaya

Program DME “KUNING EMAS” yang menonjolkan pengarusutamaan gender berdampak terhadap sosial budaya mereka. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panggungrejo menciptakan budaya masyarakat yang mandiri. Adanya itikat baik dari masyarakat dalam mendukung upaya pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya sumber daya air untuk PLTMH dan tumbuhnya pengetahuan dalam masyarakat tentang konsep pembangkitan, penyaluran, dan pengelolaan listrik yang dihasilkan dari PLTMH.

Guna menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya dalam mewujudkan keberadaan DME, maka pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal ini potensi sumber daya air untuk dikonversi menjadi energi listrik melalui teknologi tepat guna dengan pembangunan PLTMH perlu ditumbuhkembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edi Isnomo selaku Kepala Desa Panggungrejo:

“Adanya KUNING EMAS ini menimbulkan dampak sosial budaya di masyarakat Desa Panggungrejo, yaitu semakin meningkatnya ketrampilan berwirausaha masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mendorong pembangunan, serta meningkatnya sarana dan prasarana.”

(Sumber: Wawancara, Jumat 21 februari 2014 Pukul 09.00 WIB)

3) Lingkungan

Dampak dari program DME adalah terciptanya industri rumahan yang ramah lingkungan. Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat

pelaku usaha ekonomi produktif Desa Panggungrejo salah satunya adalah mengenai penggunaan bahan baku industri yang aman dan ramah lingkungan. Hasil wawancara dengan Bapak Sujono sebagai Ketua Kelompok KRAJAN Tahu Organik adalah sebagai berikut:

“Produksi tahu kami menggunakan bahan baku organik dan tidak menggunakan pengawet makanan. Selain itu, tidak ada limbah tahu yang terbuang dan mencemari lingkungan, karena semua limbah yang dihasilkan dari produksi tahu dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku atau campuran makanan, seperti donat, nugget, sari kedelai, kue kering, dll. Jadi semuanya berguna dan dapat menghasilkan uang.”
(Sumber: Wawancara, 10 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Program DME “KUNING EMAS” di Desa Panggungrejo banyak mendapat dukungan dari berbagai faktor namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan-hambatan. Faktor pendukung dan penghambat program DME “KUNING EMAS” adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penentu utama dalam keberhasilan program ini dan PengarusUtamaan Gender (PUG) merupakan penekanan dalam memilih kegiatan maupun bidang pemberdayaannya (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah). Penetapan sumber daya pelaku kegiatan ini harus selektif, dimana tidak setiap orang dapat direkrut menjadi pelaku kegiatan ini, akan tetapi perlu dilakukan penjangkaran melalui identifikasi di lapangan dan kemudian kegiatan apa yang sesuai dengan kondisi SDM yang tersedia. Program pengarusutamaan gender ini tidak menutup kemungkinan untuk siapapun dapat bergabung dalam kegiatan ini. Desa Panggungrejo seluas 2,91 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 7.563 jiwa yang terdiri dari 3.754 laki-laki dan 3.724 perempuan. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Panggungrejo secara umum berkisar antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.

Pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” ini untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), oleh karena itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Bapak Hariono selaku Sekretaris Desa Panggungrejo menyatakan bahwa:

”Program DME “KUNING EMAS” ini sangat didukung oleh masyarakat. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha ekonomi produktif yang dibagi ke dalam masing-masing KRAJAN. Kami selaku perangkat desa sangat mendukung masyarakat.”
(Sumber: Wawancara, Kamis 27 Februari 2014 pukul 09.15 WIB).

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, dimana terdapat banyak sungai yang memiliki potensi energi terbarukan. Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Malang telah banyak yang dimanfaatkan, antara lain sebagai penyediaan air bersih, irigasi, industri,

pariwisata, PLTA dan yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Malang adalah PLTMH. PLTMH ini dikembangkan untuk menciptakan energi listrik sebagai sumber energi terbarukan. Kepala Bagian Mineral dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa:

“Melihat potensi PLTMH khususnya di Desa panggungrejo yang cukup besar, maka pemanfaatannya perlu dilakukan dengan pengelolaan yang terencana dan terprogram dengan baik secara lintas bidang yang bersinergi dan menjadi satu kegiatan yang terintegrasi sehingga pemanfaatannya dapat optimal. Selain itu dengan adanya PLTMH Kali Sukun ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Desa Panggungrejo.”

(Sumber: Wawancara, Kamis 6 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

Ditetapkannya Desa Panggungrejo sebagai Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS” melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/57/KEP/421.013/2012 pada tanggal 31 Januari 2012 selanjutnya direncanakan untuk dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi produktif yang benar-benar akan menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik di Desa Panggungrejo maupun di desa sekitar dan bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

b. Faktor Penghambat

1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)

Salah satu faktor penghambat dari program DME “KUNING EMAS” ini adalah perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro

(PLTMH). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Edi Isnomo selaku Kepala Desa Panggungrejo adalah sebagai berikut:

“Mesin PLTMH ini sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan ada salah satu jaringan mesin yang bocor, selain itu pembangunan sistem penyaring air menyebabkan tekanan yang dihasilkan kecil sehingga listrik yang dihasilkan sangat kecil, yaitu sekitar 4.500 kVA hanya bisa untuk mengalir 3 rumah saja.”

(Sumber: Wawancara, Jumat 21 Februari 2014 Pukul 09.00 WIB).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor lain yang menghambat program DME “KUNING EMAS” adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya kinerja SDM tersebut terbukti bahwa tingkat koordinasi antar SKPD dalam melaksanakan program DME “KUNING EMAS” masih sangat rendah. Selain itu adanya pergantian Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang dipicu sebagai penyebabnya. Pada tahun 2006 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang mengusulkan untuk melakukan pembangunan PLTMH yang akan menghasilkan kapasitas daya 2 x 50 kWH dengan memanfaatkan Kali Sukun. Pembangunan PLTMH tersebut bertujuan sebagai sumber energi listrik secara gratis yang dihasilkan dari PLTMH Kali Sukun, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan lebih kompetitif.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang yang sekarang kurang menyetujui adanya pembangunan proyek PLTMH di Kali Sukun. Hal ini disebabkan pembangunan PLTMH tersebut tidak relevan dengan esensi DME itu sendiri. Kepala Bagian

Mineral dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Malang yaitu Bapak Wahyudi menyatakan bahwa:

“Konsep DME sebenarnya diperuntukan daerah (desa) terpencil yang sarana dan prasarananya kurang memadai, misalnya krisis listrik. Pembangunan PLTMH sebagai salah satu contoh dari program DME, sehingga daerah yang tadinya terpencil dan belum dialiri oleh jaringan listrik dari PLN menjadi daerah yang mandiri energi. Melihat kondisi Desa Panggungrejo yang saat ini sudah mendapat aliran listrik dari PLN, maka tidak perlu adanya pembangunan PLTMH. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep DME.”

(Sumber: Wawancara, Selasa 4 Maret 2014 Pukul 10.17 WIB).

3. Pengawasan Pemerintah

Lemahnya pengawasan pemerintah menjadikan program DME “KUNING EMAS” tidak berjalan dengan lancar. Menurut SK Bupati Malang Nomor: 180/57/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS” program DME “KUNING EMAS” didukung oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (SKPD). Realita tersebut jauh dari konsep DME “KUNING EMAS” yang tertuang di dalam SK Bupati. Masing-masing SKPD belum sepenuhnya membina dan melakukan pengawasan langsung terhadap masing-masing KRAJAN usaha ekonomi produktif. Hanya sebagian SKPD yang ikut terjun langsung dalam membina KRAJAN. Misalnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif serta penyaluran bantuan seperti alat-alat produksi yang nantinya dapat

digunakan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga turut serta dalam melakukan penyuluhan kesehatan, terutama di KRAJAN makanan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pelatihan membuat dan pembuatan sari buah serta memberikan bantuan alat-alat produksi. Menurut keterangan dari mas Hanafi selaku Ketua Karang Taruna adalah sebagai berikut:

“Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat. Masyarakat mempunyai keinginan agar setiap dua atau tiga bulan sekali pemerintah datang dan melakukan evaluasi pada setiap KRAJAN, agar pemerintah mengetahui apa saja yang sebenarnya menjadi keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat di masing-masing KRAJAN.”

(Sumber: Wawancara, Minggu 16 Maret 2014 Pukul 09.15 WIB)

4. Anggaran Dana

Anggaran dana yang digunakan dalam program DME “KUNING EMAS” berasal dari APBD Kabupaten Malang dan sebagian lagi dari ADD Desa Panggungrejo. Namun, pada umumnya masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif di tiap-tiap KRAJAN mengeluhkan bantuan dana (modal) produksi. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan KRAJAN makanan yaitu Bapak Ali (Lidia Kue) adalah sebagai berikut:

“Saya masih mengalami kesulitan pada modal, terutama untuk pembelian alat-alat produksi seperti oven dan peralatan dapur lainnya karena harganya yang tinggi. Sementara ini untuk pembelian mesin/alat produksi masih meminjam pada bank.

Padahal dulu pernah mengajukan proposal permohonan bantuan namun tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat.”
(Sumber: Wawancara, Jumat 7 Maret 2014 Pukul 10.30 WIB).

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) yang Berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam Perspektif *Sustainable Development* di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

a. Peran Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program DME di Desa Panggungrejo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan prinsip otonomi daerah, Kabupaten Malang menggalakan program DME yang notabene merupakan program yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, diperlukan peran para aktor guna menunjang keberhasilan DME. Peran masing-masing aktor harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Hadi (2012:115) peran pemerintah harus mendasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi pemerintahan;
2. Berorientasi pada kepentingan masyarakat;
3. Mendasarkan pada kajian ilmiah dan masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan;
4. Bersifat jaringan kerja;
5. Kerjasama tim; dan
6. Sistem organisasi pemerintahan yang transparan dan terbuka.

Hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan bahwa dalam pengembangan program DME “KUNING EMAS” di Desa Panggungrejo

terdapat tiga aktor yang berperan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejauh ini pemerintah menjalankan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator dapat dilihat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 Tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS.”

Program DME “KUNING EMAS” ini didukung oleh seluruh SKPD di kabupaten Malang sesuai dengan lingkup dan bidang di masing-masing KRAJAN. Sejauh ini pemerintah melalui beberapa SKPD telah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di Desa Panggungrejo terkait dengan usaha ekonomi produktif “KUNING EMAS.” Pemerintah selama ini juga melakukan upaya pembangunan infrastruktur PLTMH pada tahun 2006 serta pada tahun 2008 telah dilakukan beberapa renovasi tata ruang PLTMH.

Guna mewujudkan terciptanya pasar dan industrialisasi hasil usaha ekonomi produktif “KUNING EMAS” diperlukan adanya kerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta berperan sebagai penyedia kebutuhan produksi, modal maupun pemasaran. Kerja sama dengan pihak swasta pada program DME “KUNING EMAS” dalam pengadaan alat/mesin produksi dilakukan dengan PT. Boma Bisma Indra (Persero). PT. Boma Bisma Indra (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri strategis yang mendukung kebijakan dan program

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang konversi energi, industri permesinan, sarana dan prasarana industri, agro industri, jasa dan perdagangan. Pihak swasta juga sering memberikan bantuan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif yang berupa pinjaman modal yang dilakukan oleh pihak bank.

Selain pemerintah dan swasta, masyarakat juga berpartisipasi dalam program DME “KUNING EMAS.” Hakikat pembangunan yang terkandung dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat adalah untuk mempengaruhi lingkungan fisik, manusia dan kebudayaan mereka. Mereka melakukan hal ini secara keseluruhan sebagai suatu masyarakat, kolektivitas, bukan secara individual (Riggs, 1986: 76). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi produktif di Desa Panggungrejo. Masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi produktif terlibat langsung dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan perekonomian melalui usaha ekonomi produktif yang ditekuninya. Selain itu dalam proses produksi, masyarakat menggunakan bahan-bahan organik (seperti tahu organik) dengan pengolahan yang sedemikian rupa sehingga tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Artinya, limbah yang dihasilkan dapat difungsikan kembali untuk produk-produk lain, sehingga tidak merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panggungrejo sadar akan

pelestarian lingkungan. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam peran suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan konsep *sustainable development*, maka peran pemerintah dapat ditinjau melalui 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek Sosial

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Suryono (2010: 97), pembangunan tidak hanya menyangkut perubahan pembangunan fisik saja, tetapi juga kebutuhan untuk membangun segi jiwa manusianya sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan menanggapi setiap perubahan sosial secara positif. Jika dilihat dari konsep pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah yang menaungi aspek sosial dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang juga didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan sosialisasi program, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat Desa Panggungrejo. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia modal awal yang berupa alat/mesin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perwakilan dari pemerintah yang memberikan beberapa unit

alat/mesin produksi yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang mereka tekuni.

2. Aspek Ekonomi

Tujuan dilaksanakannya program DME “KUNING EMAS” adalah untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan keajahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” khususnya pada aspek ekonomi didukung oleh peran aktor pemerintahan yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Kedua SKPD tersebut mempunyai peran untuk mengembangkan kewirausahaan serta menjalin jaringan kerja sama dengan pihak swasta guna tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

3. Aspek Lingkungan

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika menghasilkan dampak yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, dimana dalam proses pembangunan tersebut berorientasi pada lingkungan. Aktor pemerintah pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* khususnya pada aspek lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut (BLH) Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah BLH Kabupaten Malang memiliki tugas pokok, yaitu: 1) melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, dan; 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan tugas pokok tersebut, maka dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* BLH berperan sebagai *leading sector* di bidang lingkungan dengan cara melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan program DME “KUNING EMAS” yang berbasis pembangunan berkelanjutan, maka peran masing-masing aktor yang telah diuraikan di atas harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Todaro dan Smith (2006: 28-29) mengungkapkan bahwa proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

b. Institusi (kelembagaan)

Suatu kebijakan program akan berjalan baik jika didukung dengan institusi (kelembagaan) guna melakukan institusionalisasi dengan mengembangkan kemampuannya sebagai lembaga dan agen yang memberikan fungsi pelayanan yang bernilai bagi masyarakat (Suryono, 2010: 252). Lembaga yang terkait dalam program DME “KUNING EMAS” adalah seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Program ini akan berhasil jika seluruh lembaga/*stakeholder* terkait saling mendukung dan secara nyata memfasilitasi seluruh kegiatan dalam kegiatan ini secara terus-menerus. Perlu adanya komitmen antara lembaga terkait agar ada konsistensi, baik dari pihak pendanaan, sinergitas kegiatan dan lainnya secara kontinu dan berkelanjutan.

Katz dalam Suryono (2010:252) menyebutkan empat dimensi penting dalam usaha pelebagaan, yaitu:

1. Apabila kegiatan itu didorong oleh pengenalan secara sengaja dengan inovasi fisik dan sosial.
2. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh sistem nilai, sikap dan norma-norma masyarakat yang berlaku.
3. Penebaran inovasi dilakukan oleh organisasi formal.
4. Satuan organisasi tersebut berguna untuk diskripsi serta pre-skripsi, yaitu mencari penjelasan fakta dan datanya sebagaimana yang diharapkan.

Melihat dari keempat dimensi tersebut, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah seperti, sosialisasi dan pelatihan usaha ekonomi produktif. Pemerintah melalui beberapa SKPD mengenalkan beragam ketrampilan, salah satunya membatik. Hal ini tentu merupakan sebuah inovasi yang dikenalkan pada masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa sejauh ini pemerintah hanya menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah belum sepenuhnya memberikan bantuan berupa modal yang seyogyanya sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah hanya melakukan pelatihan dan bantuan alat/mesin kepada masing-masing pelaku usaha ekonomi produktif di tiap-tiap KRAJAN.

c. Regulasi (aturan)

Penyelenggaraan program DME “KUNING EMAS” harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang aturan pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menjelaskan bahwa energi mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, oleh karena itu energi harus digunakan secara hemat, rasional dan bijaksana agar kebutuhan energi pada masa sekarang dan masa yang akan datang dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya penggunaan energi secara hemat, rasional dan bijaksana, pemerintah perlu menyusun peraturan pemerintah dalam rangka pengaturan pemanfaatan sumber daya energi, sumber energi dan energi melalui penerapan teknologi yang efisien energi, guna menjamin ketersediaan energi nasional yang berwawasan lingkungan.

Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Penyusunan rencana induk konservasi energi nasional dilakukan dengan mengacu pada rencana umum energi nasional dan memperhatikan masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu masyarakat bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program konservasi energi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi Pasal 4 pemerintah bertanggung jawab secara nasional untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. Mengkaji, menyusun dan menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. Memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- f. Melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi;
- g. Melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi yang telah ditetapkan; dan
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional, maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan negara. Penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya energi, pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang. Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti halnya pembangunan PLTMH di Desa Panggungrejo yang merupakan sumber energi terbarukan dengan konsep yang ramah lingkungan.

Penyediaan energi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen merupakan daerah yang sedang berbenah diri karena saat ini Kepanjen merupakan ibukota Kabupaten Malang, oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar Kepanjen mampu menjadi kota yang mandiri. Salah satunya mandiri di bidang energi. Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. Penyediaan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Bab V tentang Pengelolaan Energi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, penyediaan energi dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi sumber daya energi;
- b. Peningkatan cadangan energi
- c. Penyusunan neraca energi;
- d. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi
- e. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

- a. Manfaat;
- b. Efisiensi berkeadilan;
- c. Berkelanjutan;
- d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber
- e. Daya energi;
- f. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- g. Kaidah usaha yang sehat;
- h. Keamanan dan keselarasan;
- i. Kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan PLTMH merupakan

bentuk dari upaya pemerintah dalam menggali energi terbarukan yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat Desa Panggungrejo. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Sesuai dengan konsep DME “KUNING EMAS” untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

d. Bentuk dan Lingkup Kegiatan dalam Pelaksanaan DME Berbasis PLTMH

Program DME merupakan program yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

yang kemudian diterapkan di daerah-daerah yang mempunyai potensi energi terbarukan, dimana syarat DME adalah minimal 60% kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Program DME merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui alternatif energi terbarukan yang dihasilkan. Desa Panggungrejo memiliki potensi energi alternatif tersebut. Pemanfaatan Kali Sukun sebagai sumber energi terbarukan direalisasikan dengan pembangunan PLTMH pada tahun 2006 silam.

Menurut Fitrrin (2010), identifikasi komposisi masyarakat merupakan kegiatan pertama untuk membangun sebuah Desa Mandiri Energi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat sebagai dasar untuk pembentukan lembaga pengelola sistem pembangkit energi terbarukan. Karakteristik masyarakat yang perlu diketahui antara lain adalah tingkat pendidikan, mata pencaharian, waktu kerja, hierarki sistem hukum desa setempat dan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Langkah selanjutnya, pembangunan pembangkit sumber energi. Diawali dengan identifikasi potensi energi terbarukan di desa setempat, perancangan sistem pembangkit dan pelaksanaan pembangunan sistem pembangkit. Untuk keberlangsungan sistem pembangkit dan jaringannya, dilakukan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa dan pengurus kelembagaan yang bertugas sebagai pengelola yang telah dibentuk sebelumnya. Pelatihan yang diberikan meliputi prosedur perawatan yang terangkum dalam *Standard Operating Procedure* (SOP),

cara penanggulangan kerusakan, dan pembukuan. Diharapkan melalui pelatihan tersebut, masyarakat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya demi keberlangsungan sistem pembangkit energi.

Program DME bertujuan untuk meningkatkan pasokan energi bagi masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Kriteria pemenuhan prasyarat DME antara lain:

- a) Penyediaan energi terbarukan dari sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga yang dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat desa.
- b) Pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber energi terbarukan, baik operasional maupun perawatan tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat, unit usaha, koperasi atau badan pengelola.
- c) Pemanfaatan energi yang kompetitif untuk kegiatan pengolahan di pedesaan yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang diproduksi oleh masyarakat sebagai mata pencaharian.

Adapun tahap-tahap program DME “KUNING EMAS” Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu:

1. Tahap prakondisi: merupakan tahapan inventarisasi potensi, *stakeholder*, sosialisasi rencana kepada *stakeholder* dan pembentukan payung hukum dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/421.013/2012.
2. Tahap perencanaan, meliputi:

- a) Tahapan identifikasi potensi, penjangkaran aspirasi dan harapan masyarakat kelompok sasaran.
 - b) Perencanaan fisik (jaringan distribusi listrik dan sarana pendukung) dan model manajemen dan pengembangan usaha.
 - c) Sosialisasi hasil perencanaan
3. Tahap pelaksanaan
- a) Pembangunan jaringan listrik
 - b) Sosialisasi, promosi dan pelatihan keterampilan masyarakat
 - c) Pembentukan manajemen KRAJAN dan DME
 - d) Perencanaan lanjutan
4. Tahap pengembangan: tahapan pembangunan infrastruktur berupa gapura DME, gedung sentra pemasaran dan pemantapan lembaga pengelola dan usaha produktif.

Pembangunan PLTMH Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen tinggallah cerita, setelah dilakukan uji coba PLTMH tersebut tidak dapat difungsikan secara optimal. Listrik yang ditargetkan bisa mencapai kapasitas 2 x 50 kVA atau 10.000 watt, kini hanya bisa menghasilkan 4.500 watt. Listrik dengan kapasitas 4.500 watt hanya dapat digunakan untuk mengalir tiga rumah, padahal Desa Panggungrejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.563 jiwa dari 2.076 kepala keluarga. Tekanan air yang rendah merupakan penyebab utama kecilnya kapasitas listrik yang dihasilkan. Selain itu pada tahun 2007 terjadi kebocoran pada mesin, hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang

besar. Pada tahun 2008 dilakukan renovasi konstruksi bangunan, namun renovasi tersebut justru menyebabkan tekanan air yang dihasilkan sangat rendah.

Melihat kondisi bangunan PLTMH tersebut sangat disayangkan. Pembangunan PLTMH menghabiskan dana sekitar 2,5 Milyar, belum lagi ditambah dana pembangunan jaringan listrik yang disalurkan ke rumah warga yang berkisar hingga 2 Milyar. Hingga kini PLTMH Kali Sukun Desa Panggungrejo tidak pernah dioperasikan. Menanggapi hal tersebut, seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki struktur PLTMH agar PLTMH Kali Sukun dapat difungsikan lagi sesuai dengan target yang ditetapkan. Diperlukan koordinasi antar aktor untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

e. Dampak DME dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Proses pembangunan berkelanjutan terdapat suatu proses perubahan yang terencana yang mengarah pada kemajuan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Perubahan ini nantinya diharapkan akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat (Hadi, 2012: 2). Tujuan dari perencanaan kegiatan DME “KUNING EMAS” adalah untuk meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Panggungrejo melalui penyediaan energi terbarukan yang berasal dari PLTMH Kali Sukun. Konsep “KUNING EMAS” diharapkan mampu

menjadi embrio untuk program padat karya penduduk di Desa Panggungrejo. Selain itu dengan terlaksananya program DME “KUNING EMAS” dapat menjadi sentra wisata industri di kawasan Kabupaten Malang.

Secara nyata program DME bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Adanya program DME “KUNING EMAS” ini masyarakat Desa Panggungrejo merasa sangat terbantu, terutama para perempuan. Hal ini disebabkan mayoritas perempuan di Desa Panggungrejo berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya berada di rumah tanpa memperoleh penghasilan. Penghasilan masyarakat Desa Panggungrejo dari usaha ekonomi produktif yang saat ini ditekuni rata-rata memperoleh Rp. 1000.000,00 - Rp. 3000.000,00 per bulannya. Hal ini tentu berdampak positif, dari yang awalnya sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja) yang hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya kini mereka membuka sentra produksi rumahan yang berdaya saing serta memiliki nilai jual yang tinggi.

Adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah menjadikan masyarakat Desa Panggungrejo memiliki kreativitas yang berdayaguna dan berhasilguna. Misalnya di KRAJAN Makanan Tasudo, mendapat pelatihan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam proses pembuatan tahu organik sekaligus mendapatkan bantuan mesin/alat produksi tahu tersebut dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Awalnya mereka hanya memanfaatkan kedelai untuk diproses menjadi tahu organik yang aman dan bebas pengawet, seiring dengan tingkat kreativitas masyarakat yang semakin berkembang kini kelompok industri tahu dapat memanfaatkan dan mengolah limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu tersebut. Sebagai contoh ampas kedelai dapat dioleh menjadi donat dan nugget, air perasannya dioleh untuk sari kedelai, jadi dalam proses pembuatan tahu organik tersebut tidak ada limbah yang terbuang dan mencemari lingkungan, akan tetapi limbah-limbah tersebut memiliki nilai jual yang berdaya saing tinggi.

Banyak pembangunan ekonomi yang terjadi tanpa adanya pengaruh yang nyata dan langsung pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Melalui program DME “KUNING EMAS” ini diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Panggungrejo khususnya.

Hadi (2012: 66) menyatakan bahwa pembangunan dari perspektif sosial adalah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup yang bersifat kualitatif dan perubahan struktur masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya eksploitasi, diskriminasi dan peningkatan partisipasi serta pembagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi. Program DME “KUNING EMAS” membawa dampak yang positif di kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Adanya keinginan masyarakat untuk merubah kehidupannya kearah yang lebih baik dalam bidang perekonomiannya.
2. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
4. Adanya wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang ditekuni.

Menurut Salim dalam Hadi (2012: 3), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*), misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Kabupaten Malang saat ini sedang mengalami proses pembangunan yang bertujuan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Desa Panggungrejo mulai berbenah diri menata pembangunan khususnya di bidang perekonomian. Melalui kegiatan DME terbaru ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Pembangunan selalu menyebabkan perubahan pada lingkungan. Menurut Dasmann, Milton dan Freeman (1980: viii) perubahan dalam lingkungan memang sudah direncanakan, akan tetapi hampir dalam semua proses pembangunan skala perubahan dalam lingkungan, baik dalam luas maupun dalam intensitasnya adalah besar dari pada yang direncanakan, sehingga timbullah efek pembangunan yang tak terduga.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak yang terjadi akibat pembangunan DME “KUNING EMAS” sarana dan prasarana pendukungnya. Selama berlangsungnya pembangunan dan sarana prasarana pendukung DME “KUNING EMAS” pemerintah bersama-sama dengan swasta dan masyarakat harus mengelola setiap perubahan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi (DME) di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Manusia menjadi faktor utama dalam pengembangan pembangunan. Dalam suatu proses pembangunan, diperlukan kualitas SDM yang baik, sehingga tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud. Koordinasi antar aktor yang baik dapat mendukung terealisasinya tujuan program ini.

Pembinaan yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait dengan program DME “KUNING EMAS” mulai dari penyediaan bahan baku, penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan ketrampilan, produk yang dihasilkan sampai dengan penjaminan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan menjadi prioritas dalam menyelenggarakan kegiatan ini, antara lain pemberdayaan PKK, yang selanjutnya disebut (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), karang taruna, pengusaha lokal, komunitas pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini.

2) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Desa Panggungrejo sangat menunjang program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Adanya Kali Sukun di Desa Panggungrejo dapat dimanfaatkan sebagai potensi energi baru terbarukan yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) dengan kapasitas daya 2 x 50 kWH. Pemanfaatan PLTMH dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Desa Panggungrejo untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif dengan membentuk DME “KUNING EMAS.”

SDA yang mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif ini diharapkan tidak saja berasal dari Desa Panggungrejo, akan tetapi dapat berasal dari berbagai penjuru Kabupaten Malang maupun luar Kabupaten Malang. SDA dapat berupa bahan baku (*raw material*) maupun barang setengah jadi yang nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah (*added value*) bagi program DME “KUNING EMAS” dan dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat Desa Panggungrejo khususnya dan masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya. Pada gilirannya masyarakat Desa Panggungrejo menjadi masyarakat yang mendapat predikat unggulan dan menjadi masyarakat yang sejahtera, sebagaimana tujuan dari program DME “KUNING EMAS”, yaitu menjadi kampung mandiri dan unggulan serta dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya dan menunjang pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Malang.

b. Faktor Penghambat

1) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan PLTMH Kali Sukun di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak dapat difungsikan. Hal ini disebabkan ada beberapa kerusakan yang terjadi, seperti jaringan mesin yang bocor. Selain itu pembangunan sistem penyaring air (*trashrack*) menyebabkan

tekanan air kecil sehingga listrik yang dihasilkan sangat kecil, yaitu sekitar 4.500 kVA yang hanya bisa untuk mengalir ke tiga rumah saja sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Panggungrejo yaitu 7.563 jiwa sangat tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik masyarakat yang dihasilkan dari PLTMH Kali Sukun.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja pemerintah dalam mengembangkan DME “KUNING EMAS” masih sangat memprihatinkan yaitu jauh dari target. Program DME “KUNING EMAS” masih belum terealisasi dengan baik. Pemerintah belum mampu berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan program ini. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga teknis masih belum mampu menjadi *leading sector* untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum bisa merangkul seluruh jajaran SKPD Kabupaten Malang. Berdasarkan konsep *sustainable development*, maka peran pemerintah dapat ditinjau melalui 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek Sosial

Jika dilihat dari konsep pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah yang menaungi aspek sosial dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang

yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang juga didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Gagalnya program DME disebabkan karena kedua SKPD tersebut tidak menindaklanjuti apa yang seharusnya menjadi tugas serta tanggung jawab mereka. Seharusnya Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” secara berkelanjutan, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Terhambatnya pelaksanaan program tersebut didasari kurangnya rasa tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melihat kondisi di lapangan bahwa tidak berfungsinya mesin PLTMH Kali Sukun seharusnya pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan bimbingan dan pembinaan mengenai bagaimana masyarakat dalam menjaga dan merawat struktur PLTMH tersebut, sehingga PLTMH Kali Sukun dapat menghasilkan jaringan listrik dengan kapasitas 2 x 50 kWH yang nantinya akan mengalir listrik masyarakat Desa Panggungrejo yang akan digunakan untuk usaha ekonomi produktif sesuai dengan masing-masing KRAJAN yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

2. Aspek Ekonomi

Aktor pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” khususnya pada aspek perekonomian adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya SKPD terkait menjalankan perannya masing-masing, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang masih belum memfasilitasi masyarakat Desa Panggungrejo sebagai penyedia modal guna mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mereka tekuni dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang hanya berperan dalam melakukan bantuan alat/mesin produksi kepada masing-masing KRAJAN. Padahal masih banyak keluhan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut, seperti pemasaran hasil produksi mereka.

Terkait dengan pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* sebaiknya SKPD terkait mampu berperan sebagai fasilitator sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan serta menjalin jaringan kerja sama dengan pihak swasta guna tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pada kenyataannya, saat ini pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat pelaku ekonomi produktif hanya sebatas di Desa Panggungrejo dan sekitarnya.

Pemasaran merupakan kendala yang sangat serius. Jika produk-produk tersebut tidak dapat dipasarkan dengan baik, maka masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif tersebut tentu tidak mendapatkan peruntungan. Padahal dengan adanya program DME “KUNING EMAS” ini perekonomian masyarakat dapat terjamin.

3. Aspek Lingkungan

Pelaksanaan progrm DME “KUNING EMAS” di Desa Panggungrejo ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya di bidang lingkungan yaitu BLH. BLH belum mampu melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai bagaimana agar kita melestarikan lingkungan. Apalagi program DME merupakan penyediaan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi energi di daerah yang ramah lingkungan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan faktor penyebab kegagalan program DME “KUNING EMAS”. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sampah yang tersangkut pada *trashrack* PLTMH, yang mengakibatkan tekanan air yang masuk kedalam *penstock* sangat rendah sehingga tidak dapat menghasilkan aliran listrik yang berkapasitas 2 x 50 kWH.

3) Pengawasan Pemerintah

Pengawasan merupakan salah satu faktor penunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pengawasan

bertujuan agar pemerintah dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang sedang dialami dalam proses pembangunan. Pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” yang berkelanjutan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. DME “KUNING EMAS” berada di bawah naungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang sebagai pelaksana teknis daerah dan dibantu oleh seluruh SKPD Kabupaten Malang. Tidak adanya koordinasi antar SKPD inilah yang menyebabkan pelaksanaan DME “KUNING EMAS” mengalami beberapa kendala. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menimbulkan permasalahan di hampir masing-masing KRAJAN. Masyarakat pelaku usaha ekonomi industri di Desa Panggungrejo menginginkan agar pemerintah melakukan evaluasi setiap dua atau tiga bulan sekali, sehingga pemerintah mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan masyarakatpun bisa mengatasi kendala-kendala tersebut.

Guna mencapai tujuan dan sasaran program DME “KUNING EMAS”, sebaiknya dilakukan koordinasi antar aktor agar dapat melakukan peran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan tergantung dari peran pemimpin dan sistem yang digunakan. Pemimpin dituntut untuk mampu berinovasi, kreatif serta berani dalam mengambil

resiko. Dengan demikian, maka pembangunan akan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4) Anggaran Dana

Desa perlu dijadikan suatu pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian desa. Menurut Widiyanto dan Syafa'at (2006: vii) desa menjadi basis bagi sekaligus potensial sebagai penggerak bagi proses pemulihan kembali sistem perekonomian dan pemerintahan secara nasional. Pusat perhatian pembangunan, baik sosial budaya, politik dan ekonomi harus diletakkan di desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, program DME “KUNING EMAS” ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya SKPD yang terkait. Belum terlibatnya seluruh SKPD dalam program DME “KUNING EMAS” membuat masyarakat Desa panggungrejo cemas. Masyarakat cemas akan pemasaran hasil produksi mereka yang saat ini mengalami kesulitan, selain itu masyarakat cemas akan modal berupa dana. Rata-rata masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif mengalami kesulitan modal. Mereka masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam pengembangan industri. Beberapa diantaranya pernah mengajukan proposal pengajuan anggaran kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun hasilnya nihil.

Kurangnya anggaran dana berdampak pada pembangunan pusat industri “KUNING EMAS” mulai dari produksi hingga pemasaran hasil produksi sebagaimana yang menjadi tujuan dari program DME “KUNING EMAS.” Asumsi masyarakat dengan adanya program DME “KUNING EMAS” mereka dapat meningkatkan perekonomian melalui usaha ekonomi produktif yang dikembangkan. Namun saat ini masyarakat mulai meragukan keberadaan program DME “KUNING EMAS” melihat peran pemerintah yang tidak maksimal dalam mengembangkan program ini. Masyarakat terlalu bergantung modal dan pemasaran dari pemerintah, karena dua hal tersebut yang menjadi momok permasalahan. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir ketidakmampuan pemerintah dalam penyediaan modal, seharusnya pemerintah bekerjasama dengan investor atau perusahaan di Kabupaten Malang guna mempercepat pembangunan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa Panggungrejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Desa Mandiri Energi (DME) “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* melibatkan tiga aktor, yaitu pemerintah (seluruh SKPD se-Kabupaten Malang), swasta dan masyarakat.
2. Pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” terdapat lembaga pengelola atau lembaga manajemen yang mengatur dan memfasilitasi program tersebut, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga teknis dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Organisasi Karang Taruna Desa Panggungrejo juga turut andil dalam pengelolaan DME “KUNING EMAS.”
3. Program DME “KUNING EMAS” berlandaskan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi “KUNING EMAS.” Dasar hukum program DME “KUNING EMAS”, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

4. Kegiatan DME “KUNING EMAS” ini dilaksanakan berdasarkan sistem KRAJAN (zonasi) Rukun Tetangga (RT).
5. Dampak dari pelaksanaan program DME “KUNING EMAS” dalam perspektif *sustainable development* adalah sebagai berikut:
 - a. Ekonomi: Tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
 - b. Sosial-budaya: Program DME “KUNING EMAS” membawa dampak positif di kehidupan masyarakat, antara lain: (1) Keinginan masyarakat untuk merubah kehidupannya kearah yang lebih baik dalam bidang perekonomian; (2) Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat; (3) Meningkatnya pendapatan masyarakat; serta (4) Adanya wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.
 - c. Lingkungan: Dampak dari program DME adalah terciptanya industri rumahan yang ramah lingkungan.
6. Pengembangan program DME “KUNING EMAS” mendapat dorongan dari dua faktor, yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pembinaan yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait dengan program DME “KUNING EMAS”.
 - b. Sumber Daya Alam (SDA), adanya Kali Sukun dapat dimanfaatkan sebagai potensi energi baru terbarukan yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

Pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Mesin PLTMH: PLTMH Kali Sukun tidak dapat difungsikan karena ada beberapa kerusakan yang terjadi, seperti jaringan mesin yang bocor, pembangunan sistem penyaring air (*trashrack*) menyebabkan tekanan air kecil sehingga listrik yang dihasilkan sangat kecil.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM): Program DME “KUNING EMAS” masih belum terealisasi dengan baik. Pemerintah belum mampu berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan program ini.
- c. Pengawasan Pemerintah: Pengembangan program ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.
- d. Anggaran Dana: Masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif mengalami kesulitan modal.

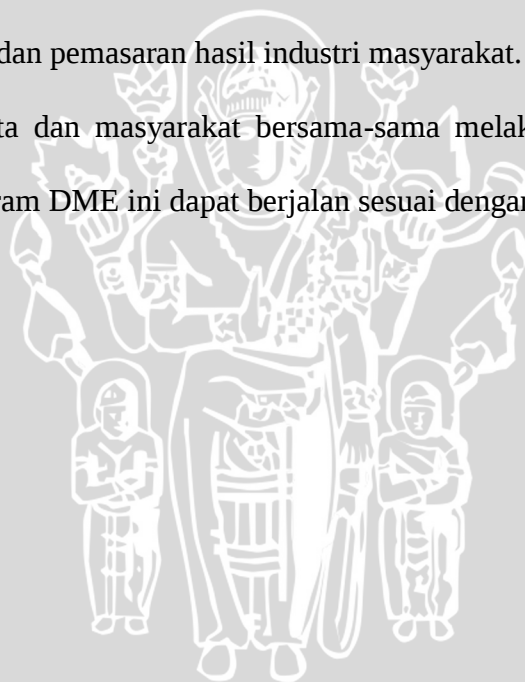
B. Saran

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengembangan program DME “KUNING EMAS”, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Guna mencapai sasaran dan tujuan suatu program pembangunan secara efektif dan efisien, sebaiknya dibuat sistem perencanaan yang baik yang diperketat dengan kuatnya pengawasan dari para aktor.
2. Hendaknya dilakukan penyusunan kelembagaan yang jelas antar para aktor, sehingga *stakeholder* dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
3. Memperkuat dan meningkatkan koordinasi antar SKPD, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penguatan SDM

sebaiknya perlu dalam menjalankan program DME “KUNING EMAS” agar meningkatkan rasa tanggung jawab antar *stakeholder*.

4. Sebaiknya dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur dan sistem PLTMH, serta adanya renovasi atau pembaharuan terhadap struktur dan sistem tersebut, sehingga PLTMH dapat dimanfaatkan sesuai dengan target yang ditetapkan serta terciptanya desa yang benar-benar mandiri dalam konteks energi.
5. Sebaiknya pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pemberian modal dan pemasaran hasil industri masyarakat.
6. Pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan kinerja, agar program DME ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2009. “*Program Desa Mandiri Energi (DME) Departemen ESDM*”, diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 dari <http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral/335-provinsi-lampung-energi/2207-program-desa-mandiri-energi-dme-departemen-esdm>.
- Anonymous. 2012. “*Panggung Rejo Desa Mandiri Energi Kuning Mas*”, diakses pada Tanggal 19 Desember 2013 dari <http://malang-post.com/metro-raja/59099-panggung-rejo-desa-mandiri-energi-kuning-mas?device=desktop>.
- Anonymous. 2013. “*Kebijakan Energi Pemerintah Kabupaten Malang*”, diakses pada Tanggal 19 Desember 2013 dari <http://esdm.malangkab.go.id/berita-413.html>.
- Anonymous. 2013. “*Selayang Pandang Program KUNING EMAS Dinas ESDM Kabupaten Malang*”, diakses pada Tanggal 19 Desember 2013 dari <http://esdm.malangkab.go.id/berita-411.html>.
- Anonymous. 2013. “*Mikrohidro*”, diakses pada Tanggal 19 Desember 2013 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrohidro>.
- Arta, F.S. 2009. “*Education for Sustainable Development (EfSD): Peran Pendidikan Non Formal*.” Diakses pada tanggal 23 Desember 2013 dari <http://www.bppaudnireg1.com/buletin/read.php?id=82&dir=1&idStatus=0>
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daniel, Andre. 2006. Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. “*Konsep Desa Mandiri Energi*.” Diakses pada tanggal 19 Desember 2013 dari http://www.academia.edu/4211326/KONSEP_DESA_MANDIRI_ENERGI.
- Dasmann, Raymond F., Milton, John P., Freeman Peter H. 1980. *Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Fittrin, Dhanis Woro. 2010. “*Desa Mandiri Energi: Solusi Perekonomian Indonesia di Abad 21*.” Diakses pada tanggal 22 Januari 2014 dari www.kamase.org.

- Ghony, M. Djunaidi dan Almansyur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sudharto P. 2012. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Instruksi Presiden No. 13. 2011. "Inpres Penghematan Energi dan Air No. 13 Tahun 2011", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/inpres/2011/Inpres%20013%202011.pdf>.
- Jusuf, Widodo S. 2014. "ICCC: Investasi Listrik Dorong Ekonomi Daerah Terpencil." Diakses pada tanggal 6 Februari 2014 dari <http://m.antaranews.com/berita/414161/iccc-investasi-listrik-dorong-ekonomi-daerah-terpencil>
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maryati. 2014. "ICCC: investasi listrik dorong ekonomi daerah terpencil", diakses pada Tanggal 17 Desember 2013 dari <http://www.antaranews.com/berita/414161/iccc-investasi-listrik-dorong-ekonomi-daerah-terpencil>.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi Pemerintahan dan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pasolong, Herbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25. 2013. "Permen ESDM Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain No. 25 Tahun 2013", diakses pada Tanggal 28 februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/permen/2013/Permen%20ESDM%2025%202013.pdf>.
- Peraturan Pemerintah No. 3. 2005. "PP Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik No. 3 Tahun 2005", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari http://prokum.esdm.go.id/pp/2005/pp_03_2005.pdf.
- Peraturan Pemerintah No. 70. 2009. "PP Konservasi Energi No. 70 Tahun 2009", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/pp/2009/PP%2070%202009.pdf>.

Peraturan Pemerintah No. 18. 2008. "PP Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2008", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?idPeraturan=1235.

Peraturan Presiden No. 72. 2005. "Perpres Desa No. 72 Tahun 2005", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/151.pdf>.

Peraturan Presiden No. 5. 2006. "Perpres Kebijakan Energi Nasional No.5 Tahun 2006", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari http://www.batan.go.id/ref_utama/perpres_5_2006.pdf.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: Rajawali.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Keputusan Bupati Nomor 180/57/KEP/412.013/2012 Tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Menjadi Desa Mandiri Energi "Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera (KUNING EMAS)".

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Susilowati, Dwi. 2011. "Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang." Diakses pada tanggal 7 Februari 2014 dari <http://susilowati.staff.umm.ac.id/files/2011/03/BAB-VII.pdf>.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang No. 32. 2004. "UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf.

Undang-Undang No. 30. 2007. "UU Energi No. 30 Tahun 2007", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-30-2007.pdf>.

Undang-Undang No. 32. 2009. "UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf>.

Undang-Undang No. 30. 2009. "UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009", diakses pada Tanggal 28 Februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja. 2010. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

Zain, Dewi R. 2013. "Makalah Strategi Pembangunan." Diakses pada tanggal 28 Februari 2014 dari <http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makalah-strategi-pembangunan.html?m=1>.

Zauhar, Soesilo, dkk. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN 1

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 180/57/KEP/412.013/2012
TANGGAL 31 JANUARI 2012 TENTANG PENETAPAN DESA
PANGGUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN MENJADI DESA
MANDIRI ENERGI “KUNING EMAS”**



BUPATI MALANG

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 180/ 57 /KEP/421.013/2012
TENTANG

PENETAPAN DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN
MENJADI DESA MANDIRI ENERGI "KUNING EMAS"
(KAMPUNG UNGGULAN NIAGA INDUSTRI NUANSA GENDER EMBAN
MASYARAKAT ANDALAN SEJAHTERA)

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang memiliki potensi energi baru terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun dengan kapasitas daya 2 x 50 KWH;
b. bahwa agar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen, perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif dengan membentuk Desa Mandiri Energi yang bernama "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera);
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen menjadi Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera) dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

© 2012 by Pemerintah Kabupaten Malang. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak Diperjualbelikan.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
8. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 22/PERM.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen menjadi Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera).
- KEDUA : Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memanfaatkan PLTMH Kali Sukun untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- KETIGA : Kerangka Acuan Kerja Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEEMPAT : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 JANUARI 2012



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Camat Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Kepala Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 180/ 57 /KEP/421.013/2012
TANGGAL : 31 JANUARI 2012

KERANGKA ACUAN KERJA
DESA MANDIRI ENERGI: "KUNING EMAS"
(Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender
Emban Masyarakat Andalan Sejahtera)

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malang memiliki posisi strategis ditinjau dari berbagai aspek, antara lain dari aspek topografi posisinya di bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Daerah hulu sungai merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sumber daya air baik alamiah maupun buatan, seperti sumber air, sungai, waduk/embung dan sebagainya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik manusia, tumbuhan dan bahkan hewan yang berada di wilayah tersebut.

Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Malang telah banyak yang dimanfaatkan, antara lain penyediaan air baku untuk: air bersih, irigasi, industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan yang pada saat ini sedang dikembangkan adalah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini dikembangkan untuk menciptakan energi listrik sebagai pengganti (*alternative*). Di Kabupaten Malang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sampai dengan saat ini telah dibangun di beberapa lokasi, antara lain di Kecamatan: Kepanjen, Tirtoyudo, Tumpang, Pujon, Pagelaran dan Dau, baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, Instansi vertikal maupun Perguruan Tinggi.

Melihat potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) khususnya di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen yang sangat potensial, maka pemanfaatannya perlu dilakukan dengan pengelolaan yang terencana dan terprogram dengan baik secara lintas bidang, bersinergi yang menjadi satu kegiatan besar yaitu diangkat dan ditetapkan sebagai Desa Mandiri Energi. Desa Mandiri Energi ini selanjutnya dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi produktif yang benar-benar akan menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik di desa lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) maupun desa sekitar dan bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Oleh karena itu Desa Mandiri Energi ini dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi produktif dan diberi nama "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Desa Mandiri Energi bernama "KUNING EMAS" adalah untuk memberdayakan masyarakat di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen dengan prioritas pengarusutamaan gender (nuansa gender) dengan memanfaatkan sumber daya energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang bermanfaat berupa industri, niaga dan kegiatan yang berdampak kepada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat serta dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Malang "MADEP MANTEB" demi terwujudnya "SATATAGAMA KARTA RAHARJA".

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Desa Mandiri Energi bernama "KUNING EMAS" adalah untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan yang terjangkau dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

III. BENTUK DAN LINGKUP KEGIATAN

3.1. Bentuk Kegiatan

Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" merupakan kegiatan rintisan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang untuk memberdayakan masyarakat sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang berbasis mandiri energi.

Kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk mendayagunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas terpasang 2 x 50 kWH untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi produktif di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Bentuk kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" berupa kegiatan terpadu antara kegiatan usaha ekonomi produktif dengan pendayagunaan daya listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

Kegiatan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dikelola oleh sebuah manajemen secara profesional, transparan dan akuntabel dengan cara kontrak manajemen.

Dalam Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS", Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dibagi menjadi beberapa

"KRAJAN" (Zonasi) yang merupakan bagian dari Manajemen Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" yang selanjutnya menjadi andalan bagi masyarakat Desa Panggungrejo untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3.1.2. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) Kali Sukun

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun merupakan penyedia dan pendukung energi/daya listrik untuk kegiatan di setiap "KRAJAN" harus mampu secara optimal mencukupi daya listrik sesuai kebutuhan. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun dengan kapasitas daya terpasang 2 x 50 kWH mampu menyediakan daya untuk 11 (sebelas) "KRAJAN", namun apabila ada pengembangan usaha, maka penyediaan daya listrik akan disediakan secara "HYBRID" (terpadu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Disel/PLTD dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS dan lainnya).

3.2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS", meliputi:

3.2.1. Obyek

Sebagai obyek kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" adalah seluruh potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berada di wilayah Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

3.2.2. Potensi Wilayah

Seluruh potensi di wilayah Desa Panggungrejo merupakan potensi yang digarap dalam rangka menciptakan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS". Potensi tersebut diidentifikasi secara langsung di lapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya dan untuk mendapatkan apa yang diperlukan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

3.2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai tentunya merupakan dambaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sarana dan prasarana dalam kegiatan ini diadakan menyesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang diimplementasikan. Meskipun kegiatan ini berbasis mandiri energi, namun dalam implementasinya guna mendukung kegiatan agar berdayaguna dan berhasilguna, maka sarana dan prasarannya tidak saja yang berkaitan langsung dengan keenergian, akan tetapi

disesuaikan dengan kebutuhan antara lain, seperti: akses jalan, gedung manajemen, tempat produksi (rumah penduduk/lainnya), ruang pameran, tempat pemasaran, Gedung serbaguna (untuk pelatihan, seminar, pertemuan), kendaraan operasional (jika diperlukan untuk jangka panjang), website (*software*), tenaga kerja dan lainnya.

3.2.4. Sumber Daya

3.2.4.1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan penentu utama dalam keberhasilan kegiatan ini dan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) merupakan penekanan dalam memilih kegiatan maupun bidang pemberdayaannya (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah). Oleh karena itu dalam menetapkan sumber daya pelaku kegiatan ini haruslah sangat selektif, dimana tidak setiap orang dapat direkrut menjadi pelaku kegiatan ini, akan tetapi perlu dilakukan penjangkaran melalui identifikasi di lapangan dan kemudian kegiatan apa yang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia. Meskipun kegiatan ini pengarusutamaan gender, namun tidak menutup kemungkinan siapapun dapat bergabung dalam kegiatan ini. Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dibentuk lembaga pengelola atau lembaga manajemen yang bekerja untuk memfasilitasi setiap kegiatan atau sub kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" secara profesional. Lembaga ini nantinya akan secara terus menerus memfasilitasi dan memandu berjalannya kegiatan ini mulai dari aspek: penyediaan bahan baku, peralatan, pengepakan (*packaging*) dan bahkan sampai urusan permodalan, perekrutan pelaku usaha/tenaga kerja dan pemasaran. Lembaga/organisasi kemasyarakatan menjadi prioritas dalam menyelenggarakan kegiatan ini, antara lain pemberdayaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, pengusaha lokal, komunitas pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini.

Desa Panggungrejo seluas 2,91 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 7.663 jiwa, terdiri dari 3.830 jiwa laki-laki (48%) dan 3.833 jiwa perempuan (50,1%). Desa Panggungrejo terbagi menjadi 37 RT dan 6 RW. Tingkat pendapatan penduduk Desa Panggungrejo secara umum berkisar antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1:000.000,00.

Komposisi penduduk berdasarkan usia sebagai berikut:

USIA (Tahun)	JUMLAH (Jiwa)
< 5	549
5-6	312
7-15	1.161
16-22	601
23-59	4.135
> 60	516

Jenis pekerjaan penduduk Desa Panggungrejo sebagai berikut:

PEKERJAAN	JUMLAH
Tani/buruh tani	789
Pedagang	585
PNS	235
TNI/POLRI	425
Buruh pabrik/industri	612
Buruh bangunan	190
Jasa lainnya	187

3.2.4.2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki Desa Panggungrejo secara keseluruhan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ini. Sumber daya alam ini diharapkan tidak saja berasal dari Desa Panggungrejo, akan tetapi dapat berasal dari berbagai pelosok penjurur Kabupaten Malang maupun dari luar Kabupaten Malang. Sumber daya alam dapat berupa bahan baku (*raw material*) maupun barang setengah jadi yang nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah (*added value*) bagi kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" dan dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat Desa Panggungrejo khususnya dan masyarakat Kabupaten Malang umumnya dan pada gilirannya masyarakat Desa Panggungrejo menjadi masyarakat yang mendapat predikat unggulan dan menjadi masyarakat yang sejahtera, sebagaimana tujuan dilaksanakan kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS", yaitu menjadi kampung mandiri dan unggulan serta dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya dan menunjang pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Malang.

3.2.5. Permodalan

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" ini, disamping diperlukan sarana, prasarana dan sumber daya tentunya juga diperlukan permodalan. Permodalan diharapkan dari berbagai skema dari Pemerintah dan swasta antara lain: koperasi, bank, lembaga keuangan lainnya dan modal sendiri serta lain-lain yang sah.

3.2.6. Lembaga terkait

Lembaga/*stakeholder* terkait dengan kegiatan ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Kegiatan ini akan berhasil apabila seluruh lembaga/*stakeholder* terkait saling mendukung dan secara nyata memfasilitasi seluruh kegiatan dalam kegiatan ini secara terus menerus tanpa putus (kontinu). Untuk itu koordinasi yang baik dan berkualitas akan dapat mendukung terealisasinya tujuan kegiatan ini. Pembinaan yang dilakukan lembaga terkait dilakukan mulai dari penyediaan bahan baku, penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan keterampilan, produk yang dihasilkan sampai dengan penjaminan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu melakukan komitmen antara Lembaga terkait agar ada konsistensi, baik dari aspek pendanaan, sinergisitas kegiatan dan lainnya secara kontinu dan berkelanjutan.

3.2.7. Produk

Untuk menjamin produk yang dihasilkan dapat diterima pasar, maka Pemerintah Kabupaten Malang dapat memberikan jaminan dengan menerapkan kebijakan pemakaian produk dari kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" ini yang mewajibkan masyarakat Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten pada setiap kegiatan untuk memanfaatkan produk tersebut (cintai produk daerah sendiri/ produk asli Kabupaten Malang, maupun cintai produk dalam negeri) yang diimplementasikan dengan Keputusan Bupati/Surat Edaran Bupati, serta memasarkan produknya melalui pengusaha lokal/ regional/nasional yang ada di wilayah Kabupaten Malang untuk menjadi bapak angkat. Produk yang dihasilkan oleh Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" seluruhnya ber-LABEL "KUNING EMAS" dengan LOGO resmi, meskipun produknya berbeda-beda sesuai dengan "KRAJAN" produk yang dihasilkan.

3.2.8. Lembaga DESA MANDIRI ENERGI "KUNING EMAS"

Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" dikelola oleh sebuah lembaga Manajemen yang dibentuk (kontrak manajemen) dengan tugas mengelola Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS". Manajemen Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" didukung oleh keberadaan kegiatan

usaha ekonomi produktif di setiap "KRAJAN" (11 kegiatan usaha ekonomi produktif), sedang dukungan dana operasional Manajemen Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" berasal dari sebagian keuntungan dari 11 "KRAJAN" kegiatan usaha ekonomi produktif yang diatur dengan prinsip saling menguntungkan yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Agar Manajemen Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan berdampak positif terhadap para pelaku industri dan niaga di 11 (sebelas) "KRAJAN", sehingga seluruh komponen kegiatan dapat dijamin, baik dalam hal: penyediaan bahan baku, modal, proses produksi, pemasaran dan lainnya secara berkelanjutan.

3.3. "Pembagian "KRAJAN" (Zonasi) dan Matriks Rencana Kegiatan

3.3.1. Pembagian "KRAJAN" (Zonasi)

Kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" ini dilaksanakan berdasarkan sistem "KRAJAN" (Zonasi) Rukun Tetangga (RT), dimana untuk setiap "KRAJAN" akan diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang berbeda. Desa Panggungrejo terbagi menjadi 37 RT dan 3 RW dan apabila dilihat dari jumlah RT tersebut, maka perlu penyesuaian terhadap jumlah daya yang disediakan untuk setiap RT maupun "KRAJAN" yang direncanakan. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun dengan daya listrik 2 x 50 KWH (pada saat debit air normal), namun jika debit air tidak mencukupi, maka daya yang tersedia menurun sampai dengan 2 x 20 KWH. Kondisi tersebut masih dapat mencukupi sejumlah "KRAJAN" kegiatan yang akan ditetapkan.

Desa Panggungrejo dapat dibagi menjadi 10 sampai dengan 15 "KRAJAN", namun pada awal perencanaan sementara akan dibagi menjadi 11 (sebelas) "KRAJAN" dan dalam perkembangan nantinya dapat diimplementasikan "KRAJAN" secara penuh, dengan kategori sebagai berikut:

- "KRAJAN" Pusat Makanan ("Food Center");
- "KRAJAN" Pusat Pertukangan ("Trade Center");
- "KRAJAN" Pusat Konveksi ("Convection Center");
- "KRAJAN" Pusat Percetakan ("Printing Center");
- "KRAJAN" Pusat Perikanan ("Fishery Center");
- "KRAJAN" Pusat Kerajinan ("Handicraft Center");
- "KRAJAN" Pusat Persewaan ("Rental Center");
- "KRAJAN" Pusat Bordir ("Bordir Center");
- "KRAJAN" Pusat Batik ("Batik Center");
- "KRAJAN" Pusat Perbengkelan ("Workshop Center");
- "KRAJAN" Pusat Agro ("Agro Center").

3.4. Matriks Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" sebagai berikut :

NO	"KRAJAN"	KEGIATAN	LEMBAGA PENDUKUNG	SUBYEK KEGIATAN	KET.
1	MAKANAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Packaging 6. Promosi 7. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten Badan 2. Badan 3. Badan 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 10. Dinas Pertanian dan Perkebunan 11. Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 15. Badan Lingkungan Hidup 16. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 17. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 18. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19. Kantor Penanaman Modal 20. Bagian Pengelola Data Elektronik 21. Bagian Perekonomian 22. Perbankan	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

2	PERTUKANGAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 6. Pemasaran	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 10. Badan Diklat 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12. Kantor Penanaman Modal 13. Bagian Pengelola Data Elektronik 14. Bagian Perencanaan 15. Perbankan	1. Karang Taruna Desa 2. Kelompok Masyarakat 3. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"
3	KONVEKSI	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 6. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

			10. Badan Lingkungan Hidup 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13. Kantor Penanaman Modal 14. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Bagian Pengelola Data Elektronik 16. Bagian Perekonomian 17. Perbankan		
4	PERCETAKAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 6. Pemasaran	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Dinas Pemuda dan Olahraga 8. Dinas Sosial 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 11. Kantor Penanaman Modal 12. Bagian Pengelola Data Elektronik 13. Bagian Perekonomian 14. Perbankan	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

© 2013 Universitas Brawijaya. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Universitas Brawijaya.

5	PERIKANAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 6. Pemasaran	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Dinas Pengairan 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 9. Dinas Sosial 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11. Bagian Pengelola Data Elektronik 12. Kantor Penanaman Modal 13. Bagian Perekonomian 14. Perbankan	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"
6	KERAJINAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 6. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Badan Lingkungan Hidup 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat 8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 10. Dinas Sosial	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

© 2011 Universitas Brawijaya. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Universitas Brawijaya.

			11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13. Kantor Penanaman Modal 14. Bagian Pengelola Data Elektronik 15. Bagian Perekonomian 16. Perbankan		
7	PERSEWAAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Promosi 5. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 9. Dinas Sosial 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11. Kantor Penanaman Modal 12. Bagian Pengelola Data Elektronik 13. Bagian Perekonomian 14. Perbankan	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"
8	BORDIR	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Promosi 5. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

Di Bina dan Diselenggarakan oleh: Badan Koordinasi Bidang Ekonomi (BKBE) 2012, dengan nama: BKBE 2012

			- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Badan Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kantor Penanaman Modal - Bagian Bagian Pengelola Data Elektronik - Bagian Perekonomian - Perbankan		
9	BATIK	- Permodalan - Pengadaan bahan baku - Peralatan - Proses produksi - Promosi - Pemasaran	- Tim Penggerak PKK Kabupaten - Badan Perencanaan Pembangunan - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Badan Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kantor Penanaman Modal	- PKK Desa - Karang Taruna Desa - Kelompok Masyarakat - Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

			13. Bagian Pengelola Data Elektronik 14. Bagian Perekonomian 15. Perbankan		
10	PERBENGKELAN	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Promosi 5. Pemasaran	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 8. Dinas Sosial 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11. Kantor Penanaman Modal 12. Bagian Pengelola Data Elektronik 13. Bagian Perekonomian 14. Perbankan	1. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"
11	AGRO	1. Permodalan 2. Pengadaan bahan baku 3. Peralatan 4. Proses produksi 5. Packaging 6. Promosi 7. Pemasaran	1. Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. PKK Desa 2. Karang Taruna Desa 3. Kelompok Masyarakat 4. Pengusaha Lokal Desa	Lembaga pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan kebutuhan kegiatan "KRAJAN"

Hal. 100 dari 1000 | 10/03/2024 10:00:00 AM | 10/03/2024 10:00:00 AM

3.5. Pemberdayaan

IV. WAKTU PELAKSANAAN

† We first use an *Agrobacterium* strain carrying the *gus* gene as a vector for the *gus* gene.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan Desa Mandiri Energi "KUNING EMAS" ini dapat berasal dari berbagai sumber, meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, swasta dan sumber lain yang sah.

VI. PENUTUP

Desa Mandiri Energi yang dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Malang, agar seluruh potensi energi baru terbarukan dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat Kabupaten Malang dan diharapkan pada akhirnya akan dapat merealisasikan visi Pemerintah Kabupaten Malang "MADEP MANTEB" yang selanjutnya untuk mewujudkan Kabupaten Malang "SATATAGAMA KARTA RAHARJA".



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN 2

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGUNGREJO NOMOR
07/33A/421.604.005/SK/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KRAJAN KUNING EMAS**



PEMERINTAH DESA PANGGUNGREJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGUNGREJO
Nomor : 07 / 33a /421.604.005 / SK / 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KRAJAN KUNING EMAS

KEPALA DESA PANGGUNGREJO

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan penetapan Desa Panggungrejo menjadi Desa Mandiri Energi “ Kuning Emas” (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera), maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Krajan Kuning Emas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Nomor :180/57/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen menjadi Desa Mandiri Energi “ Kuning Emas” (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama – nama kelompok Krajan Kuning Emas, sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panggungrejo
Pada tanggal : 20 Agustus 2013
KEPALA DESA PANGGUNGREJO

Ir. H. EDY ISNOMO

- Tembusan** :
1. Yth. Sdr. Camat Kepanjen
 2. Yth. Sdr. Ketua BPD
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Panggungrejo
 Nomor : 07 / 33a / 421.604.005 / SK / VIII / 2013
 Tanggal : 20 Agustus 2013

**KELOMPOK KRAJAN KUNING EMAS
 DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2013**

NO	NAMA KRAJAN	PUSAT KRAJAN	NAMA PENGUSAHA	KETERANGAN
I	KRAJAN KERAJINAN	JL. JEMBATAN RT 01 / RW 03	SULIONO	Ketua
1	INDUSTRI-KERAJINAN-TAS	JL.-SIMPANG-SIDODADI	ABDUL-ROHIM	Anggota
2	INDUSTRI-ULEG-ULEG	JL.-SAWO	BUARI	Anggota
II	KRAJAN PERBENGKELAN	JL. RAYA TULA'AN RT 01 / RW 04	MAT KOIRI	Ketua
1	BENGKEL-LAS-SETIA-JAYA	JL-TRUNOJOYO	WINARKO	Anggota
2	BENGKEL-LAS&SPET	JL-TRUNOJOYO	ABDUS-SALAM	Anggota
3	REPARASI-SEPEDA	JL.-SIDODADI	WITONO	Anggota
4	SERVICE-JOK-MOBIL	JL.-SIDODADI	KARIYONO	Anggota
5	BENGKELPRIMA-PERKASA	JL.-KRAPYAK	HARI-SUBAGYO	Anggota
6	BENGKEL-SEPEDA-MOTOR	JL.-SIDODADI	MATSARI	Anggota
7	SERVICE-ELEKTRONIK-ILHAM	JL.-SIMPANG-SIDODADI	ANTO	Anggota
8	BENGKEL-LAS-PUJIARTOKO	JL.-SALAK	SUHENDRO-PUJI-ARTOKO	Anggota
9	BENGKEL LAS WOWO	TEGARON RT 01 RW 05	SUDIONO	Anggota
10	BENGKEL LAS DWI MANDIRI	TULAAAN RT 01 RW 03	KASMURI	Anggota
III	KRAJAN PERTUKANGAN	JL. KRAMAT RT 04 / RW 04	ALI MUKSIN	Ketua
1	INDUSTRI-COR-PILAR	JL.-SIDODADI	WINARNO	Anggota
2	MEUBEL-SUTOMO	JL.-SIDODADI	SUTOMO	Anggota
3	INDUSTRI-COR-PILAR	JL.-KRAPYAK	KASIYAN	Anggota
4	INDUSTRI-COR-PILAR	JL.-KRAPYAK	AKHMAD-SAIFUL-ARIF	Anggota
5	INDUSTRI-COR-PILAR	JL.-SIMPANG-SIDODADI	BAMBANG	Anggota
6	MEUBEL-MUJIONO	JL.-SALAK	MUJIONO	Anggota
7	MEUBEL-AGUS	JL.-SAWO	AGUS-WINARNO	Anggota
8	MEUBEL-REJO-JOYO	JL.SIKU	ZAENAL-FANANI	Anggota
9	MEUBEL TEGARON	TEGARON RT 05 RW 05	MISNARI	Anggota
10	PEMBUATAN ETALASE	TULAAAN RT 03 RW 04	ADI SUNGKOWO	Anggota
	SUMBER ALLUMINIUM			
11	MEUBEL NOKO	TULAAAN RT 02 RW 04	SUYATNOKO	Anggota
IV	KRAJAN MAKANAN	JL. SAWO RT 03 / RW 02	ABDUL AZIZ	Ketua
1	CATERING-ANDRIANI-LASTUTI	JL.-SIDODADI	ANDRIANI-LASTUTI	Anggota
2	CATERING-MISIYANI	JL.-SIDODADI	MISIYANI	Anggota
3	INDUSTRI-ES-KRIM	JL.-SIDODADI	TUTIK-MAGDALENA	Anggota
4	CATERING-KUE-AZIZAH	JL.-SIDODADI	AZIZAH	Anggota
5	CATERING-INDAH	JL.-SIDODADI	INDAH	Anggota
6	LYDIA-KUE	JL.-SALAK	LIDIA	Anggota
7	CATERING-SONAH	JL.-SALAK	SONAH-MUNJAYANAH	Anggota
8	CATERING-KASIJATI	JL.-SALAK	KASIJATI	Anggota
9	INDUSTRI-KUE-YEYEN	JL.-SALAK	YEYEN-SUGIARTI	Anggota
10	CATERING-PERISTANIE	JL.-SAWO	NANIEK-PERISTANIE	Anggota
	PRODUKSI TELUS ASIN	TULAAAN RT 02 RW 04	PURWATI	Anggota
V	KRAJAN KONVEKSI	JL. SIMP. SIDODADI RT 07 RW	NURUNA'IMAH	Ketua
1	PENJAHIT-SUPANGAT	JL.-PANJI	SUPANGAT	Anggota
2	PENJAHIT-ANI	JL.-SIDODADI	SULIANI	Anggota
3	PENJAHIT-LILIS	JL.-SIDODADI	LILIS-SURYANI	Anggota
4	PENJAHIT-SUNARIYAH	JL.-KRAPYAK	SUNARIYAH	Anggota
5	PENJAHIT-NURUL	JL.-SIMPANG-SIDODADI	NURUL-PANCAWATININGS	Anggota
6	KONVEKSI-LUMAYAN	JL.-SIMPANG-SIDODADI	NURUNA'IMAH	Anggota
7	PENJAHIT-YULI	JL.-SALAK	YULI-FARIDA	Anggota
8	PENJAHIT-DIAN	JL.-SAWO	UMIYATI	Anggota
9	PENJAHIT-ASMINING	JL.-SAWO	ASMINING	Anggota
10	PENJAHIT-RESTU	JL.-SAWO	IDAH-KARYATI	Anggota

	11	PENJAHIT TEGARON	TEGARON RT 05 RW 05	SUPRIKAH	Anggota
	12	PENJAHIT TEGARON	TEGARON RT 03 RW 05	HARMIATIN	Anggota
VI		KRAJAN PERCETAKAN	JL. SALAK RT 01 / RW 02	ALI-RAHMAT	Ketua
	1	SABLON-TRI-MURDIYANTO	JL.-SALAK	HERU-TRI-MURDIYANTO	Anggota
	2	BAMBANG SABLON	TULAN RT05 RW 04	BAMBANG PURNOMO	Anggota

VII		KRAJAN PERSEWAAN	JL. SIDODADO RT 05 / RW 01	MUNIR	Ketua
	1	STUDIO-MUSIK-REBIRTH	JL-TRUNOJOYO	JASMARI	Anggota
	2	AREMA-EXPRESS	JL-TRUNOJOYO	NANANG-SUPARTO	Anggota
	3	RENTAL-MOBIL	JL SIDODADI	SUYANTO	Anggota
	4	BIRO-INSTALASI	JL.-SIDODADI	HARIYANTO	Anggota
	5	RENTAL-MOBIL	JL.-KRAPYAK	SUGIONO	Anggota
	6	SIDODADI-WISATA	JL.-SIDODADI	BENI-SUPRIADI	Anggota
	7	BIRO-JASA-TEKNIK-LISTRIK	JL.-SIDOMULYO	MUH.-HERUL	Anggota
	8	MEGA-SOUND	JL.-SALAK	DASUD-KALIA	Anggota
	9	MUNIR ALAT PESTA	JL. SIDODADO RT 05 / RW 01	MUNIR	Anggota
	10	PERSEWAAN-ALAT-PESTA-WI	JL.-SAWO	DWI-WIBOOWO	

VIII		KRAJAN BORDIR	JL. SAWO RT 04 / RW 02	MEI-WULANDARI	Ketua
	1	BORDIR	TEGARON RT 01 RW 05	RISA	Anggota
	2	BORDIR	TEGARON RT 01 RW 05	RUPINI	Anggota

IX		KRAJAN BATIK			
	1	SUPRIKA	DUSUN TEGARON RT 05 / RW 05		Ketua
	2	SRIATUN	DUSUN TEGARON RT 01 / RW 05		Anggota
	3	LILIK	JL. SIMPANG SIDODADI		Anggota
	4	MISANATIN	JL. SIDODADO		Anggota
	5	PRAPTI	JL. SAWO		Anggota

X		KRAJAN AGRO	DUSUN TEGARON RT 01 / RW 05		
	1				
	2				

XI		KRAJAN PERIKANAN	Jl. SAWO RT 04 RW2		
	1	GURAMI/ LELE	Jl. SAWO RT 04 RW2	AGUS HILMI	Ketua
	2	LELE	JL. SIKU	MARGANI	Anggota

Panggungrejo, 20 Agustus 2013
Kepala Desa Panggungrejo

Ir. H. EDY ISNOMO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN 3

HASIL SURVEY DME “KUNING EMAS”

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN

MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl.Ahmad Yani Utara No 384 B Telp/Fax (0341) 408788

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

**DESA MANDIRI ENERGI (KUNING EMAS)
PANGGUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN**

Tahun Anggaran : 2012



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

Jl. Surabaya 3 A Malang 65115 Telp. (0341) 551 311

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***KATA PENGANTAR**

Laporan Hasil Survey Lapangan pekerjaan Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini disusun untuk memenuhi kontrak, antara Dinas ESDM dan Koperasi Inti Kesejahteraan Consulting Engineer selaku konsultan yang bertindak sebagai penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan.

Maksud dari **Laporan Hasil Survey Lapangan** adalah untuk melaporkan hasil survey baik dari segi sosial masyarakat maupun infrastruktur. Pada laporan ini juga disampaikan mengenai data-data hasil kuisioner atau penggalan aspirasi masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah membantu didalam penyusunan pelaporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Malang, Oktober 2012

**Koperasi Inti Kesejahteraan
Consulting Engineer**

Yunu Sulistivono
Team Leader

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers*

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1 - 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1 - 2
1.3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	1 - 2
1.4. KELUARAN PEKERJAAN (PELAPORAN).....	1 - 3
1.5. LOKASI STUDI.....	1 - 4
1.6. RUANG LINGKUP PERENCANAAN.....	1 - 5
1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	1 - 5
 BAB II KONDISI SOSIAL	
2.1. UMUM.....	2 - 1
2.2. IDENTIFIKASI KONDISI KRAJAN	2 - 1
2.3. PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT I.....	2 - 5
2.4. PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT II.....	2 - 8
 BAB III KONDISI RENCANA LOKASI BANGUNAN	
3.1. UMUM.....	3 - 1
3.2. HASIL SURVEY LAPANGAN	3 - 2
3.3. LOKASI PERENCANAAN.....	3 - 3
 BAB IV KONDISI PLTMH KALI SIKUN	
4.1. UMUM.....	4 - 1
4.2. KONDISI BANGUNAN SIPIL	4 - 1
4.3. KONDISI ELEKTRIKAL & MEKANIKAL.....	4 - 7



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

ii

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
Gambar 1. 1.	Peta Lokasi Desa Panggungrejo Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang	1 - 4
Gambar 2. 1.	Krajan Pusat Makanan	2 - 2
Gambar 2. 2.	Krajan Pusat Konveksi	2 - 2
Gambar 2. 3.	Krajan Pusat Kerajinan	2 - 3
Gambar 2. 4.	Krajan Pusat Pertukangan	2 - 3
Gambar 2. 5.	Krajan Pusat Bordir	2 - 4
Gambar 2. 6.	Krajan Pusat Perbengkelan	2 - 4
Gambar 2. 7.	Krajan Pusat Batik	2 - 4
Gambar 2. 8.	Krajan Pusat Perikanan	2 - 5
Gambar 2. 9.	Krajan Agro	2 - 5
Gambar 2. 10.	Rekapitulasi Hasil Kuisioner PKM 1	2 - 6
Gambar 2. 11.	Peserta Pengajian Selasa Wage	2 - 7
Gambar 2. 12.	Pemaparan dari konsultan	2 - 8
Gambar 2. 13.	Pengisian Kuisioner	2 - 8
Gambar 2. 14.	Peserta Kegiatan PKM II di Balai Desa Panggungrejo	2 - 9
Gambar 2. 15.	Pembukaan oleh Kepala Desa Panggungrejo	2 - 10
Gambar 2. 16.	Pemaparan Konsep DME Kuning Emas oleh konsultan	2 - 10
Gambar 2. 17.	Suasana Sesi Diskusi	2 - 10
Gambar 2. 18.	Diagram Statistik Pemilihan Krajan	2 - 12
Gambar 2. 19.	Diagram Statistik Alasan Pemilihan Krajan	2 - 13
Gambar 3. 1.	Lokasi Rencana Pintu Gerbang 1 (Gapura 1) yang berada di daerah perbatasan antara desa Talangagung-desa Panggungrejo, tepatnya berada di jalan Sumedang	3 - 4
Gambar 3. 2.	Lokasi Rencana Pintu Gerbang 2 (Gapura 2) yang berada di daerah perbatasan antara desa Panggungrejo-desa Mangunrejo, dan masih berada dalam satu jalur di jalan Sumedang.,	3 - 4
Gambar 3. 3.	Denah Lokasi Pemasangan Gapura 1	3 - 5
Gambar 3. 4.	Denah Lokasi Pemasangan Gapura 2	3 - 6
Gambar 3. 5.	Kantor Balai Desa lama yang akan di jadikan sebagai tempat Showroom dan workshop	3 - 7



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

iii

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen

Gambar 3. 6. Interior ruang dalam Kantor Balai Desa	3 - 7
Gambar 3. 7. Denah Eksisting Kantor Desa Panggungrejo yang akan dijadikan "Showroom"	3 - 8
Gambar 3. 8. Lokasi Rencana Kantor Balai Desa (baru)	3 - 9
Gambar 3. 9. Kondisi Eksisting Jalan dan Lingkungan Sekitar kawasan lokasi Kantor Balai Desa (baru)	3 - 9
Gambar 3. 10. Denah Lokasi Rencana Kantor Desa Panggungrejo Baru	3 - 10
Gambar 4. 1. Skema PLTMH Kali Sukun	4 - 2
Gambar 4. 2. Kondisi Bendung Kali Sukun	4 - 3
Gambar 4. 3. Kondisi Pintu Pembilas (tampak hulu dan hilir)	4 - 4
Gambar 4. 4. Kondisi Intake	4 - 4
Gambar 4. 5. Kondisi Trashrack pada saluran hantar	4 - 5
Gambar 4. 6. Kondisi Kolam Tampungan	4 - 5
Gambar 4. 7. Kondisi Pelimpah Samping dan Pintu Pembilas	4 - 6
Gambar 4. 8. Trashrack sebelum masuk pipa pesat	4 - 6
Gambar 4. 9. Pipa Pesat	4 - 7
Gambar 4. 10. Tailrace	4 - 7
Gambar 4. 11. Turbin	4 - 8
Gambar 4. 12. Generator	4 - 8
Gambar 4. 13. Ballast Load Control	4 - 9
Gambar 4. 14. Synchronize Control	4 - 9
Gambar 4. 15. Generator Distribution Panel	4 - 10



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
Tabel 2. 1	Jenis Kelamin Peserta	2 - 10
Tabel 2. 2	Tingkat Pendidikan Peserta	2 - 10
Tabel 2. 3	Jenis Pekerjaan Peserta	2 - 11
Tabel 2. 4	Jumlah Pendapatan Peserta	2 - 11
Tabel 2. 5	Krajan terpilih	2 - 11
Tabel 2. 6	Alasan Pemilihan Krajan	2 - 12



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

iv

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
Tabel 2. 1	Jenis Kelamin Peserta	2 - 10
Tabel 2. 2	Tingkat Pendidikan Peserta	2 - 10
Tabel 2. 3	Jenis Pekerjaan Peserta	2 - 11
Tabel 2. 4	Jumlah Pendapatan Peserta	2 - 11
Tabel 2. 5	Krajan terpilih	2 - 11
Tabel 2. 6	Alasan Pemilihan Krajan	2 - 12



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

iv

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***BAB****7****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Malang memiliki posisi strategis ditinjau dari berbagai aspek, antara lain dari aspek topografi, posisinya di bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Daerah hulu sungai merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sumber daya air, baik alamiah maupun buatan, seperti sumber air, sungai, waduk/ embung dan sebagainya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk manusia, tumbuhan dan hewan yang berada di wilayah tersebut.

Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Malang telah banyak yang dimanfaatkan, antara lain untuk penyediaan air baku untuk: air bersih, irigasi, industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) dan yang pada saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Malang adalah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). PLTMH ini dikembangkan untuk menciptakan energi listrik sebagai sumber energi terbarukan. Di Kabupaten Malang, PLTMH sampai dengan saat ini telah dibangun, baik oleh Pemerintah, Masyarakat, maupun Perguruan Tinggi di beberapa lokasi, antara lain di Kecamatan: Kepanjen, Tirtoyudo, Tumpang, Pujon, Pagelaran dan Dau,

Melihat potensi PLTMH khususnya di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen yang cukup besar, maka pemanfaatannya perlu dilakukan dengan pengelolaan yang terencana dan terprogram dengan baik secara lintas bidang, bersinergi dan menjadi satu kegiatan terintegrasi sehingga pemanfaatannya dapat optimal. Ditetapkannya Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen sebagai Desa Mandiri Energi KUNING EMAS (Kampung unggulan niaga industri nuansa gender emban masyarakat andalan sejahtera) melalui Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/57/KEP/421.013/2012 tanggal 31 Januari 2012 DME ini selanjutnya direncanakan untuk dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi produktif yang benar-benar akan menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik di

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***1-1**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



desa lokasi PLTMH maupun desa sekitar dan bahkan seluruh masyarakat kabupaten Malang. Oleh karena itu DME ini dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi produktif dan diberi nama "KUNING EMAS" (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perencanaan Desa Mandiri Energi bernama "KUNING EMAS" adalah upaya pengembangan desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energinya dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat. Secara nyata Desa Mandiri Energi bertujuan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan konsep utama dari KUNING EMAS adalah suatu tindak lanjut dari adanya sumber daya energi yang dimanfaatkan masyarakat untuk ekonomi produktif utamanya dengan pengarusutamaan gender emban.

Tujuan dari perencanaan kegiatan Desa Mandiri Energi bernama "KUNING EMAS" adalah untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan, yang berasal dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun. Konsep KUNING EMAS diharapkan mampu menjadi embrio untuk program padat karya penduduk di Desa Panggungrejo. Diharapkan dengan terlaksananya program Desa Mandiri Energi KUNING EMAS Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen dapat menjadi sentra wisata industri di kawasan Kabupaten Malang.

1.3. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sesuai dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pekerjaan ini maka waktu pelaksanaan pekerjaan ini ditentukan 90 (Sembilan Puluh) hari kalender. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

1-2

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen***1.4. KELUARAN PEKERJAAN (PELAPORAN)**

Setiap laporan harus disusun dalam bahasa Indonesia yang baku, dan dibuat pada kertas HVS dalam ukuran A4, dan untuk Gambar rencana dibuat dalam ukuran A1 dan A3. Laporan asli dan menampilkan gambar berwarna (tidak menyertakan gambar, peta atau tabel yang di foto copy). Untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan Perencanaan Kampung Mandiri Energi (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera), maka konsultan harus menyerahkan laporan-laporan sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan

Setelah melakukan orientasi dan observasi lapangan serta mempelajari dengan seksama Kerangka Acuan Kerja (TOR) maka pihak Konsultan menyusun Laporan Pendahuluan yang berisi jadwal dan rencana kegiatan yang mencakup keseluruhan masa pelaksanaan maupun tiap jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, pendekatan teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan serta jadwal penugasan personil dan peralatan, termasuk juga rencana pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi. Laporan ini dibuat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap.

2. Laporan Hasil Survey Lapangan

Laporan ini berupa hasil survey dan penyelidikan lapangan yang telah dilakukan. Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku.

3. Laporan Pertengahan

Laporan pertengahan ini dibuat rangkap 10 (sepuluh) buku, Laporan Pertengahan memuat hasil analisa sementara, kesimpulan, saran dan rencana tindak lanjut sesuai dengan tujuan kegiatan ini serta merupakan laporan dari kegiatan konsultan setelah melakukan kegiatan survey lapangan.

4. Laporan Akhir Sementara

Laporan Akhir Sementara dibuat rangkap 10 (sepuluh) buku berisi antara lain sebagai berikut : Hasil semua kajian, Tabel, gambar, Kesimpulan dan saran. Laporan Akhir Sementara harus dipresentasikan sebelum masa kontrak pekerjaan ini berakhir kepada pihak yang akan ditentukan oleh direksi pekerjaan.

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN**

Consulting Engineers



LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

5. Laporan Akhir

Laporan Akhir dibuat 10 (sepuluh) buku dan berbentuk CD 10 (sepuluh) buah berisi antara lain sebagai berikut : Hasil semua kajian, Tabel, gambar, Kesimpulan dan saran.

6. Laporan Album Gambar

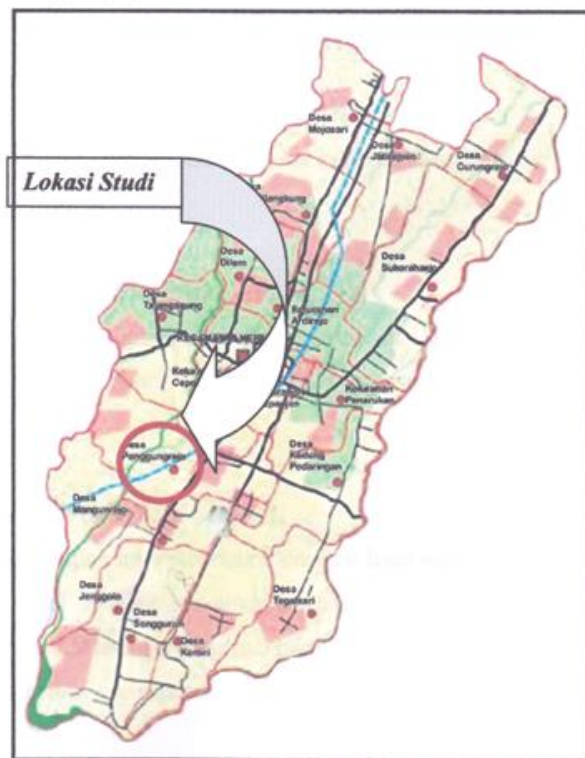
Laporan Album Gambar berisi gambar-gambar perencanaan. Laporan ini diserahkan dalam jumlah 10 (sepuluh) rangkap.

7. Laporan Executive Summary

Laporan Executif Summary dibuat rangkap 10 (sepuluh) dan berbentuk CD 10 (sepuluh) buah, diserahkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir.

1.5. LOKASI STUDI

Lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang menunjukkan luas wilayah Desa Panggungrejo dan lokasi PLTMH.



Gambar 1. 1.Peta Lokasi Desa Panggungrejo



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***1.6. RUANG LINGKUP PERENCANAAN**

Ruang lingkup pekerjaan perencanaan ini adalah sebagai berikut :

- a) Survey/ Pengumpulan data-data primer dan sekunder
- b) Identifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
- c) Proyeksi perkembangan jumlah penduduk dan fasilitas
- d) Menghitung kebutuhan listrik untuk menunjang ekonomi produktif
- e) Membuat perencanaan jaringan listrik dan memperkirakan biaya yang diperlukan untuk merealisasikannya
- f) Membuat gambar teknis lengkap dengan denah, tampak, potongan, serta detail-detail yang diperlukan sesuai dengan ZONA/KRAJAN
- g) Menyusun RAB sesuai hasil dari hasil design
- h) Membuat model manajemen pengelola.
- i) Menyusun RKS yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
- j) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan pada Laporan Hasil Survey Lapangan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang pekerjaan, manfaat dan tujuan pekerjaan, serta informasi-informasi dasar yang berkaitan dengan pekerjaan.

BAB II KONDISI SOSIAL

Pada bagian ini dijabarkan mengenai hasil survey kondisi sosial masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan dengan Krajan-krajan yang saat ini telah ada. Selain hal tersebut pada bab ini juga akan dibahas mengenai hasil pertemuan konsultasi masyarakat.

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***1-5**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***BAB III KONDISI LOKASI RENCANA BANGUNAN**

Untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri Energi Kuning Emas Panggungrejo maka diperlukan beberapa infrastruktur pendukung. Pada bab ini dibahas mengenai kondisi eksisting lahan rencana bangun *showroom*, kantor desa baru, serta gapura.

BAB IV KONDISI PLTMH KALI SUKUN

Sesuai dengan keputusan bupati Kabupaten Malang bahwa Desa Panggungrejo akan dijadikan Desa Mandiri Energi maka konsultan merasa perlu untuk melakukan peninjauan terhadap PLTMH Kali Sukun. Peninjauan dilakukan terhadap kondisi fisik bangunan, elektrikal maupun mekanikal.

**KOPERASI INTI KESAJAHTERAAN**

Consulting Engineers

1-6



LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen

**BAB 2**
KONDISI SOSIAL**2.1. UMUM**

Survey kondisi sosial dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat terkait dengan rencana Desa Mandiri Energi KUNING EMAS Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Survey kondisi sosial dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Metode *door to door*

Metode tersebut dilakukan pada embrio krajan-krajan. Konsultan mendatangi seluruh lokasi dan melakukan wawancara dan diskusi dengan pemilik usaha.

2. Metode *Participatory Research Apraisal (PRA)*

Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan perwakilan masyarakat yang diangkat dapat mewakili keragaman warga Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen.

2.2. IDENTIFIKASI KONDISI KRAJAN

Kegiatan identifikasi kondisi krajan dilakukan dengan metode *door to door*. Konsultan mendapatkan gambaran awal bahwa pada Desa Panggungrejo telah terdapat usaha individu masyarakat yang dapat dijadikan embrio untuk perkembangan DME Kuning Emas Panggungrejo. Beberapa dari usaha tersebut berada pada taraf menengah, namun ada juga yang masih dalam skala berkembang.

Berikut adalah hasil survey kondisi masing-masing krajan yang dilakukan oleh konsultan didampingi oleh perangkat desa.

1. Krajan Pusat Makanan (Pak Ali rahmat, Jalan Salak)

- Jumlah pegawai 13 orang terdiri dari 9 orang ibu rumah tangga produksi di tempat, 2 orang sales, 2 orang berjualan dengan gerobak keliling

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN**

Consulting Engineers

2 - 1

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

- Mampu memproduksi 13 macam kue, 500 buah dalam sehari
- Bahan baku menyediakan sendiri
- Manajemen keuangan & operasional dikelola oleh pemilik
- Butuh bantuan modal & promosi, karena saat ini hanya beroperasi di Desa Panggungrejo. Ingin bisa merambah ke seluruh Kapanjen dan Kabupaten Malang



Gambar 2. 1. Krajan Pusat Makanan

2. Krajan Konveksi (Pak Sunaryo, Jalan Simpang Sidodadi)

- Pegawai sebanyak 20 Orang, mayoritas ibu rumah tangga
- Jam kerja mulai pukul 07.30 – 16.00, tetapi bisa juga pekerjaan dibawa pulang kerumah
- Produksi khusus seragam sekolah TK – SMA
- Semua produksi tidak langsung dijual ke pasaran. melainkan ditampung di pengepul terlebih dahulu



Gambar 2. 2. Krajan Pusat Konveksi

3. Krajan Kerajinan (Pak Suryono, Jalan Jembatan)

- Produk berupa alat kesenian rebana.
- Bahan baku semua berasal dari luar (Blitar dan Tulungagung)
- Setiap hari memproduksi, minimal 4 buah



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 2

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

- Produksi menggunakan mesin diesel namun perakitan menggunakan manual.
- Hasil produksi kebanyakan digunakan untuk keperluan pondok pesantren



Gambar 2. 3. Krajan Pusat Kerajinan

4. Krajan Pertukangan (Pak Ali Muchsin, Dusun Tula'an)

- Hasil produksi berupa batu pecah, paving, pasir, batako
- Kegiatan pertukangan sudah berjalan (produksi & penjualan).
- Bahan baku diambil dari luar desa.



Gambar 2. 4. Krajan Pusat Pertukangan

5. Krajan Bordir (Ibu Mei, Jalan Sawo)

- Sudah berjalan sejak tahun 2000 namun hanya menerima jasa pemesanan (tidak produksi secara rutin)
- Mesin bordir 1 buah. Karyawan 2 orang, 1 orang bagian desain gambar, 1 orang bagian bordir



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 3

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



Gambar 2. 5. Krajan Pusat Bordir

6. Krajan Perbengkelan (Pak Choiri, Jalan Raya Panggungrejo)

- Bergerak di bidang bengkel kendaraan dan las.
- Kegiatan sudah berjalan selama 5 tahun.
- Lokasi cukup strategis. Terletak di perbatasan desa dan dipinggir jalan raya



Gambar 2. 6. Krajan Pusat Perbengkelan

7. Krajan Batik (Pak Hartono, Dusun Tegaron)

- Masih belum ada kegiatan
- Namun sudah disiapkan lokasinya.
- Rencana kedepan diharapkan bisa menjadi *home industry* batik.



Gambar 2. 7. Krajan Pusat Batik



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



8. Krajan Perikanan (Pak Agus Helmi, Jalan Sawo)

- Pernah beroperasi kemudian terhenti
- Perlu dikembangkan kembali



Gambar 2. 8. Krajan Pusat Perikanan

9. Krajan Agro

- Belum ada kegiatan sama sekali.
- Terdapat tanah percontohan
- Direncanakan untuk toga



Gambar 2. 9. Krajan Agro

2.3. PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT I

Kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh warga Desa Panggungrejo mengenai program DME Kuning Emas ini. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan pembagian kuisisioner untuk mengetahui aspirasi masyarakat mengenai rencana pengembangan Desa Panggungrejo.



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 5

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



Berikut adalah beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan PKM I.

1. Tempat : Rumah Warga Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen
Hari,Tanggal : Selasa, 4 September 2012
Waktu : Pkl 14.00 – Selesai
2. Bentuk Kegiatan
 1. Sosialisasi Konsep Desa Mandiri Energi Kuning Emas
 2. Pengisian kuisioner
3. Peserta : ibu – ibu pengajian Selasa Wage Desa Panggungrejo
4. Jumlah Peserta : 68 orang

Pada kegiatan tersebut dibagikan kuisioner yang berisi mengenai kondisi masing-masing krajan berdasarkan hasil identifikasi awal (telah dijabarkan pada sub bab 2.3.). Berdasarkan kondisi tersebut peserta diminta untuk memilih salah satu krajan yang paling berpotensi. Kuisioner dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil kuesioner (warga memilih lebih dari satu krajan) menunjukkan potensi tertinggi berada pada Kerajinan Batik dengan jumlah suara 21 orang, krajan tertinggi kedua adalah Krajan Makanan dengan perolehan suara 20, Krajan ketiga adalah Krajan Bordir dengan perolehan suara 14 orang dan krajan keempat adalah Krajan Konveksi dengan perolehan suara 13 Orang.



Gambar 2. 10.Rekapitulasi Hasil Kuisioner PKM 1



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers



LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



Gambar 2. 11. Peserta Pengajian Selasa Wage



Gambar 2. 12. Pemaparan dari konsultan



Gambar 2. 13. Pengisian Kuisoner



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 7

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***2.4. PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT II**

Berdasarkan evaluasi kegiatan PKM I masyarakat Panggungrejo disimpulkan oleh konsultan belum mengetahui mengenai konsep DME Kuning Emas. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan serupa dengan konsep kegiatan yang lebih baik. Oleh karena itu dirasa perlu dilakukan kegiatan PKM II. Kegiatan PKM II berupa kegiatan pertemuan masyarakat yang bertujuan untuk:

1. Sosialisasi Konsep Desa Mandiri Energi Kuning Emas
2. Pemberian wacana dengan memberikan contoh konsep yang serupa dengan program kuning emas pada daerah lain
3. Diskusi terbuka dengan Masyarakat
4. Pengisian Kuisioner

Berikut adalah beberapa data mengenai pelaksanaan kegiatan PKM II:

1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Tempat : Balai Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2012

Waktu : Pkl 19.00 – Selesai

2. Peserta Kegiatan :

Peserta dari kegiatan ini merupakan perwakilan masyarakat desa Panggungrejo yang dipilih oleh perangkat desa. Warga yang hadir berasal dari perwakilan RT, krajan, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Sehingga peserta dianggap telah mewakili keragaman yang terdapat di Desa Panggungrejo. Peserta yang hadir sebanyak 81 warga.

3. Susunan Acara

- | | |
|---------------|---|
| 19.30 - 20.00 | : Registrasi Peserta |
| 20.00 – 20.15 | : Sosialisasi Konsep DME Kuning Emas |
| 20.15 – 20.25 | : Pemaparan Contoh Kegiatan serupa |
| 20.25 – 21.00 | : Diskusi terbuka dan pengisian kuisioner |
| 21.00 | : Penutup |

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***2 - 8**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



Gambar 2. 14. Peserta Kegiatan PKM II di Balai Desa Panggungrejo



Gambar 2. 15. Pembukaan oleh Kepala Desa Panggungrejo



Gambar 2. 16. Pemaparan Konsep DME Kuning Emas oleh konsultan



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



Gambar 2. 17. Suasana Sesi Diskusi

Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana cukup aktif. Masyarakat melakukan diskusi dengan serius karena banyak yang belum mengetahui mengenai adanya kegiatan DME KUNING EMAS ini. Notulen kegiatan dapat dilihat di Lampiran.

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan data-data sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jenis Kelamin Peserta

No	Keterangan	Jumlah Orang
1.	Laki-laki	45
2.	Perempuan	36
	Jumlah	81

Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan Peserta

No	Keterangan	Jumlah Orang
1	SD / Sederajat	9
2	SLTA / Sederajat	15
3	SMA / Sederajat	43
4	S – 1	13
5	S – 2	1
	Jumlah	81



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 10

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



Tabel 2. 3 Jenis Pekerjaan Peserta

No	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	13
2	Pegawai Swasta	10
3	Wiraswasta	29
4	Lain-lain	29
	Jumlah	81

Tabel 2. 4 Jumlah Pendapatan Peserta

No	Keterangan	Jumlah
1	0 – Rp. 500.000,-	14
2	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	14
3	Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000	10
4	Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000	18
5	Diatas Rp. 3.000.000	9
6	Tidak mengisi	21
	Jumlah	81

Tabel 2. 5 Krajan terpilih

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Makanan	50	36,5%
2	Pertukangan	9	6,57%
3	Konveksi	16	11,7%
4	Percetakan	3	2,03%
5	Perikanan	2	1,5%
6	Kerajinan	20	14,6%
7	Persewaan	3	2,19%
8	Bordir	5	3,65%
9	Batik	14	10,22%
10	Perbengkelan	8	5,84%
11	Agro	7	5,2%
	Jumlah	137	100%



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

2 - 11

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

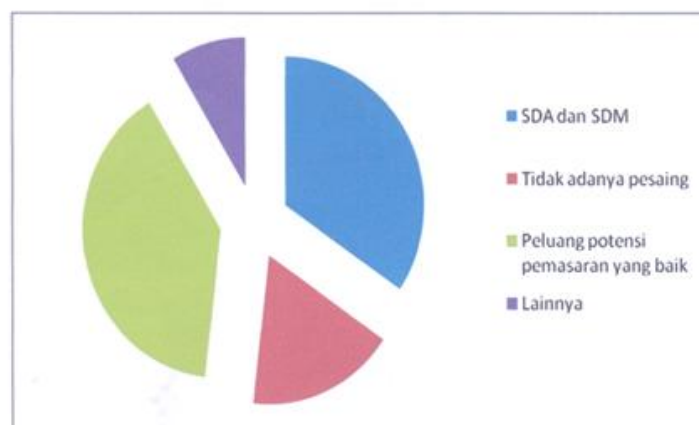
Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen



Gambar 2. 18. Diagram Statistik Pemilihan Krajan

Tabel 2. 6 Alasan Pemilihan Krajan

No	Keterangan	Jumlah
1	SDA dan SDM	28
2	Tidak adanya pesaing	14
3	Peluang potensi pemasaran yang baik	32
4	Lainnya	7
	Jumlah	81



Gambar 2. 19. Diagram Statistik Alasan Pemilihan Krajan



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen***BAB 3****KONDISI LOKASI RENCANA BANGUNAN****3.1. UMUM**

Pembangunan parasarana dan sarana adalah merupakan keperluan bagi semua orang, untuk itu dalam setiap kegiatan pembangunan dibutuhkan suatu perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mempunyai titik tolak, arah dan tujuan yang jelas. Perencanaan yang benar adalah perencanaan yang didasarkan pada data dan fakta yang benar di lapangan khususnya pada kawasan yang akan ditangani. Secara definisi, perencanaan diuraikan dalam beberapa dimensi :

a. Dimensi Waktu

Suatu perencanaan sesungguhnya bicara tentang masa depan. Apa yang termuat dalam perencanaan tidak lain dari idealisasi perubahan, suatu "tempat" yang tidak tercapai, dan skaligus jalan yang hendak ditempuh sesuai dengan keperluan orang banyak, sehingga perencanaan ini nantinya benar-benar di nikmati oleh masyarakat banyak.

b. Dimensi tujuan

Suatu perencanaan pada dasarnya adalah rumusan mengenai pencapaian terhadap suatu tujuan. Dengan demikian, didalamnya termuat idealisasi mengenai suatu kondisi yang dipandang lebih baik dan lebih bermakna bagi masyarakat luas, terutama pada masyarakat sekitarnya.

c. Dimensi pengaturan alokasi

Suatu perencanaan memuat pula maksud-maksud untuk mengatur atau membuat alokasi, termasuk menyusun suatu skala prioritas, dimana lokasi tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai aktivitas sehari-hari. Dimensi ini bisa terbaca dari pengertian yang menyatakan bahwa perencanaan tidak lain dari penetapan tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dengan serangkaian aktivitas untuk mencapainya. Adanya maksud pemilihan prioritas, dengan sendirinya bermakna mengadakan seleksi. Suatu seleksi akan didasarkan pada maksud dan nilai tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***3 - 1**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen*

dikemudian hari tidak akan menimbulkan masalah dilingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal dalam lingkungan tersebut.

d. Dimensi tindakan

Inti dari perencanaan adalah tindakan apa yang akan dilakukan didalam lingkungan masyarakat, jika perencanaan berisikan rencana tindakan yang secara obyektif tidak bisa dilakukan, maka dengan sendirinya perencanaan tersebut memiliki sifat cacat. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perencanaan seharusnya memiliki sifat : terfokus (jelas apa yang ingin di capai), sederhana (tidak muluk-muluk atau tidak ambisius), bisa dilakukan (mungkin dilakukan dengan sumberdaya yang ada), jelas tersedia sumberdaya pendukung (setidaknya bisa diusahakan), dan jelas kapan akan dilakukan, secara jelas pula batas waktu yang hendak digunakan. Justru dengan adanya perencanaan, dimaksudkan agar tindakan-tindakan yang akan dilakukan tertata, jelas arahnya, dan jelas pula hasil yang akan dicapai sesuai dengan kehendak masyarakat banyak dan berfungsi sesuai dengan keperluan yang diharapkan.

3.2. HASIL SURVEY LAPANGAN

Survey lapangan dilakukan untuk melihat permasalahan dan potensi yang ada di kawasan penanganan. Selain itu, kegiatan survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi beberapa prasarana lingkungan yang ada pada kawasan penanganan khususnya di Desa Panggungrejo, kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

a. Studi Lapangan

Merupakan tahap pengumpulan data di lapangan, dengan tujuan untuk mengenal kondisi eksiting kawasan dan juga potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk perencanaan lebih lanjut. Hasil dari studi ini adalah untuk mengetahui kondisi tapak dan lingkungan serta aspek-aspek yang ada di dalamnya, meliputi;

- Kondisi Eksiting Tapak,
- Kontur Lahan,
- Batas Tapak,
- Iklim,
- Drainase Lingkungan,
- Pencapaian,

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***3 - 2**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

- Sirkulasi,
- Tatanan Massa,
- Garis Sempadan Bangunan,
- View,
- Orientasi,
- Kebisingan,
- Vegetasi Dan Aktivitas Lingkungan.

b. Interview/wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Perangkat Desa dan Masyarakat. Hasil dari studi ini adalah menetapkan lokasi perencanaan, sarana dan prasarana penunjang yang di butuhkan untuk pengembangan kawasan "KUNING EMAS". Sarana dan Prasarana yang di butuhkan adalah "*Gerbang Masuk Kawasan, Show Room & Workshop pusat krajan Serta Kantor Balai Desa*".

c. Dokumentasi

Data yang diperoleh berbentuk foto-foto yang menggambarkan kondisi dan suasana dari kawasan yang menjadi objek studi.

3.3. LOKASI PERENCANAAN

Berdasarkan hasil rembug warga dan perangkat desa Panggungrejo di Kawasan "KUNING EMAS", terdapat usulan mengenai penetapan lokasi sarana dan prasarana penunjang yang meliputi :

1. Gerbang Masuk Kawasan

Terdapat 2 (dua) Lokasi untuk pembangunan Gerbang Masuk Kawasan, lokasi yang pertama adalah berada di daerah perbatasan antara desa Talangagung-desa Panggungrejo, tepatnya berada di jalan Sumendang, dan lokasi yang kedua adalah berada di daerah perbatasan antara desa Panggungrejo-desa Mangunrejo, dan masih berada dalam satu jalur di jalan Sumendang.



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

3 - 3

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



Gambar 3. 1 Lokasi Rencana Pintu Gerbang 1 (Gapura 1) yang berada di daerah perbatasan antara desa Talangagung-desa Panggungrejo, tepatnya berada di jalan Sumedang



Gambar 3. 2 Lokasi Rencana Pintu Gerbang 2 (Gapura 2) yang berada di daerah perbatasan antara desa Panggungrejo-desa Mangunrejo, dan masih berada dalam satu jalur di jalan Sumedang.,



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers

3 - 4

LAPORAN HASIL SURVEY LAPAI

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Pa



Key Plan : Peta De



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl.Ahmad Yani Utara No 384 B Telp/Fax (0341)
408788

REVISI			
NO	PEMBAHASAN	TANGGAL	DIBETULKAN

PROYEK :

"KUNING EMAS"
DESA PANGGUNGREJO
KEC. KEPANJEN, KAB. MALANG

PEMILIK / PEMBERI TUGAS

REVISI/REVISI :

KONSULTAN PERENCANA :



KOPERASI INTI SEJAHTERA

JUDUL GAMBAR :

Lokasi jalan
Rencana Gapura 1

SKALA :	1 : 100	TANGGAL	
DIGAMBAR :			
DIPERIKSA :			
DIBETULKAN :			
KODE PROYEK		No. GAMBAR	
No. LEMBAR		JUMLAH LEMBAR	



KOPERASI INTI KE
Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPAI

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Pa



Key Plan : Pelc





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl.Ahmad Yani Utara No 384 B Telp/Fax (0341)
408788

REVISI			
REV	PERUBAHAN	TANGGAL	DISETUAJUI

PROYEK :

"KUNING EMAS"
DESA PANGGUNGREJO
KEC. KEPANJEN, KAB. MALANG

PEMILIK / PEMBERI TUGAS

DISETUAJUI :

KONSULTAN PERENCANA :



KOPERASI INTI SEJAHTERA

JUDUL GAMBAR :

Lokasi jalan
Rencana Gapura 2

SKALA : 1 : 1 To PH	TANGGAL
DIGAMBAR :	
DIPERIKSA :	
DISETUAJUI :	
KODE PROYEK	Nr. GAMBAR
Nr. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR

Ket









KOPERASI INTI KES
Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

2. Show Room & Workshop pusat krajan

Untuk mengenalkan produk tiap masing-masing pusat krajan, maka di butuhkan sebuah prasarana berupa showroom dan tempat workshop, lokasi yang menjadi pilihan adalah Kantor Balai Desa yang lama, dan sampai saat ini masih digunakan, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan posisinya yang strategis, mudah dicapai dan berada dipusat krajan desa Panggungrejo. Untuk menyesuaikan dengan fungsi yang nantinya akan menjadi Showroom dan workshop maka akan dilakukana renovasi sehingga bangunan yang ada dapat berfungsi secara maksimal.



Gambar 3. 5 Kantor Balai Desa lama yang akan di jadikan sebagai tempat Showroom dan workshop



Gambar 3. 6 Interior ruang dalam Kantor Balai Desa



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN
Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPAI

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Pa



Key Plan : Peta Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Ahmad Yani Utara No 384 B Telp/Fax (0341)
408788

REVISI			
REV	PERJELASAN	TANGGAL	DITETAPKAN

PROYEK :

"KUNING EMAS"
DESA PANGGUNGREJO
KEC. KEPANJEN, KAB. MALANG

PEMILIK / PEMBERI TUGAS

DITETAPKAN :

KONSULTAN PERENCANA :



KOPERASI INTI SEJAHTERA

JUDUL GAMBAR :

Denah Eksisting Kantor Desa
Panggungrejo yang akan
dijadikan "Showroom"

SKALA : 1 : 100	TANGGAL
DIGAMBAR :	
DIPERIKSA :	
DITETAPKAN :	
KODE PROYEK	No. GAMBAR
No. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR

Denah
Desa P
akan d



KOPERASI INTI KES

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen***3. Kantor Balai Desa (baru)**

Lokasi rencana Kantor Balai Desa yang baru berada di sebelah timur desa Bangunrejo, berbatasan langsung dengan desa Kedungpedaringan, tepatnya berada di jalan Turen-Kapanjen, mempunyai luas area kurang lebih mencapai 3500 meter persegi. Pemilihan lokasi ini di tunjuk langsung oleh Kepala Desa, di karenakan lokasinya yang strategis untuk perkantoran dan mempunyai area yang luas sehingga di harapkan nantinya dapat menampung warga ketika ada pertemuan antar warga.



Gambar 3. 8 Lokasi Rencana Kantor Balai Desa (baru)



Gambar 3. 9 Kondisi Eksisting Jalan dan Lingkungan Sekitar kawasan lokasi Kantor Balai Desa (baru)

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN**

Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPA
Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Pe

 Key Plan : Peta D		 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jl.Ahmad Yani Utara No 384 B Telp/Fax (0341) 408788												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">REVISI</th> </tr> <tr> <th>REV</th> <th>PERUBAHAN</th> <th>TANGGAL</th> <th>DIBETULI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			REVISI				REV	PERUBAHAN	TANGGAL	DIBETULI				
REVISI														
REV	PERUBAHAN	TANGGAL	DIBETULI											
PROYEK : "KUNING EMAS" DESA PANGGUNGREJO KEC. KEPANJEN, KAB. MALANG														
PEMILIK / PEMBERI TUGAS _____ _____														
SENYUTAN : _____ _____														
KONSULTAN PERENCANA :  KOPERASI INTI SEJAHTERA														
JUDUL GAMBAR : Lokasi eksisting Rencana Kantor Desa Panggungrejo														
SKALA : 1 : 1000		TANGGAL												
DIGAMBAR :														
DIPERIKSA :														
DIBETULI :														
KODE PROYEK		No. GAMBAR												
No. LEMBAR		JUMLAH LEMBAR												



KOPERASI INTI KES
Consulting Engineers

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN*Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kepanjen***BAB 4****KONDISI PLTMH KALI SUKUN****4.1. UMUM**

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) kali Sukun merupakan penyedia dan pendukung energy/daya listrik untuk kegiatan DME KUNING EMAS Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. PLTMH Kali sukun dibangun pada tahun 2006 dan mengalami rehabilitasi pada tahun 2008.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Sukun memiliki kapasitas daya terpasang 2x 50 kWH namun pada musim kering hanya berkisar 1 x 25 kWH. Pada PLTMH Kali sukun terdapat beberapa bangunan baik bangunan sipil, elektrik, maupun mekanikal. Pada bab ini dibahas hasil peninjauan pada PLTMH Kali Sukun.

4.2. KONDISI BANGUNAN SIPIL

PLTMH Kali Sukun merupakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bersumber dari Kali Sukun. Secara detail lokasi PLTMH Kali Sukun terletak pada Dusun Tegarun bersebelahan dengan jembatan Metro 2. Bangunan sipil pada PLTMH Kali Sukun berupa:

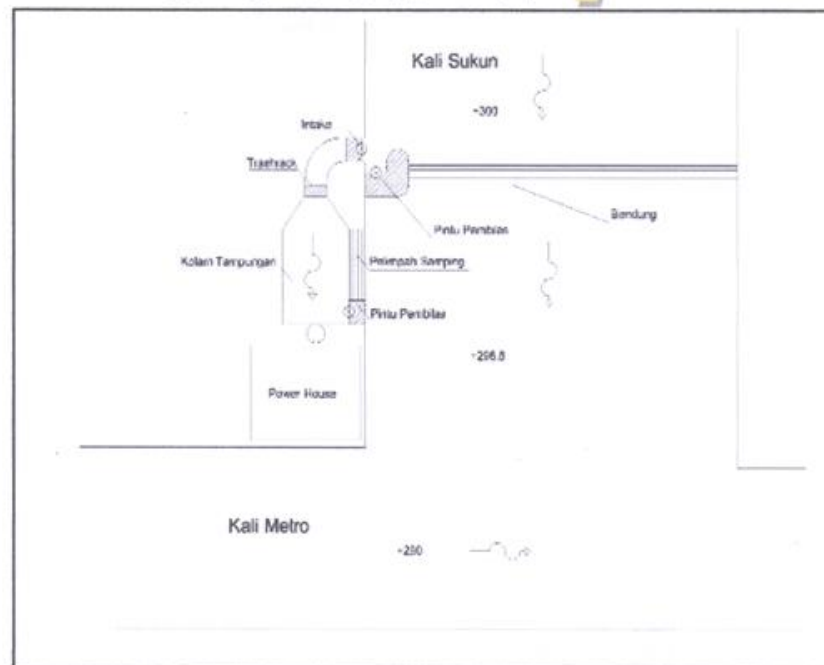
1. Bendung
2. Intake berupa pintu air yang dilengkapi dengan trashrack.
3. Pintu pembilas
4. Saluran hantar
5. Pelimpah samping
6. Penstock
7. Power House
8. Tailrace

Gambar 4.1. merupakan skema dari PLTMH Kali Sukun.

**KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN***Consulting Engineers***4 - 1**

LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen



Gambar 4. 1. Skema PLTMH Kali Sukun

Berikut adalah data-data mengenai bangunan sipil dari PLTMH Kali Sukun

1. Bendung
 - $b = 17 \text{ m}$
 - $p = 1,5 \text{ m}$
2. Pintu penguras
 - $b = 1,0 \text{ m}$
 - $h = 2,7 \text{ m}$
 - $h' = 4,1 \text{ m}$
3. Pintu intake
 - $b = 1,0 \text{ m}$
 - $h = 1,35 \text{ m}$
 - $h' = 3,2 \text{ m}$
4. Pelimpah samping
 - $b = 3 \text{ m}$
 - $p = 1 \text{ m}$



KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN

Consulting Engineers



LAPORAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Desa Mandiri Energi (Kuning Emas) Panggungrejo Kec. Kapanjen

5. Pintu penguras (sebelum pipa pesat)

$$b = 0,8 \text{ m}$$

$$h = 1,7 \text{ m}$$

$$h' = 2,9 \text{ m}$$

6. Pipa pesat

$$\text{Diameter pipa utama} = 0,8 \text{ m}$$

$$\text{Diamater pipa sekunder} = 0,6 \text{ m}$$

7. Debit saat survey

$$Q = c \cdot b \cdot h^{1,5}$$

$$= 2,1 \cdot 17 \cdot 0,1^{1,5}$$

$$= 1,1 \text{ m}^3/\text{dt}$$



KOPERASI INTI KESÉJAHTERAAN

Consulting Engineers

4-3

Lampiran I. Kuisisioner pada PKM I

Spesifikasi Krajan pada DME KUNING EMAS

No	Nama Krajan	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Krajan Pusat Makanan	- Sudah memiliki pasar tetap - Tinggal mengembangkan - Bahan Baku ada sendiri - Milik Individu	- Butuh Pengembangan Modal - Kurang promosi - Alat musik konvensional	Penjualan melalui Pesanan	
2.	Krajan Pusat Pertukangan	- Sudah Berjalan - Milik Pribadi - Hasil Produksi Paving, Batako	Bahan beli dari Luar		
3.	Krajan Pusat Konveksi	Fleksibel bagi para pekerja		- Khusus seragam - Pekerja mayoritas Ibu Rumah Tangga	Menggunakan PLN, mengurangi biaya produksi
4.	Krajan Pusat Percetakan		-Tidak berjalan	Belum ada pesaing (monopoli)	
5.	Krajan Pusat Perikanan	Dekat dengan sungai		Perlu adanya pengembangan	Usaha terhenti
6	Krajan Pusat Kerajinan (Industri Rebana)	-Milik Pribadi -Setiap hari produksi -Memakai mesin diesel -Merakitnya tanpa mesin	Bahan baku dari luar	Digunakan untuk keperluan pondok pesantren	Naiknya harga barang baku
7	Krajan Pusat Persewaan (alat pernikahan)	- Dimiliki oleh warga pribadi - Masih berjalan	-Masih dalam lingkup Desa - Bergerak skala kecil - Alat-alat masih model lama		
8	Krajan Pusat Bordir		Kurangnya karyawan Produksi Tergantung pesanan	Terima jasa masih berjalan	Tidak ada produksi sendiri selain pemesanan
9	Krajan Pusat Batik		-Belum adanya konsep	Tidak ada pesaing	
10	Krajan Pusat Perbengkelan	Letaknya strategis	Butuh Pengembangan SDM dan alat	Terletak dipbatasan desa	
11	Krajan Pusat Argo		Belum berjalan		

1. Dari ke 11 Krajan diatas, Krajan mana yang anda pilih untuk dikembangkan di Desa Panggungrejo :

- Krajan Pusat Makanan
- Krajan Pusat Pertukangan
- Krajan Pusat Konveksi
- Krajan Pusat Percetakan
- Krajan Pusat Perikanan
- Krajan Pusat Kerajinan
- Krajan Pusat Persewaan
- Krajan Pusat Bordir
- Krajan Pusat Batik
- Krajan Pusat Perbengkelan

Krajan Pusat Agro

2. Berikan alasan mengapa anda memilih krajan tersebut untuk dikembangkan? (boleh lebih dari satu).

KUESIONER

Nama :

Alamat :

1. Jenis Kelamin

- ☐ Laki-laki
- ☐ Perempuan

2. Tingkat Pendidikan

- ☐ SD/Sederajat
- ☐ SLTP/Sederajat
- ☐ SMA/Sederajat
- ☐ Sarjana/S1
- ☐ Magister/S2
- ☐ Doctor/S3

3. Pekerjaan

- ☐ Pegawai Negeri
- ☐ Pegawai Swasta
- ☐ Wiraswasta
- ☐ Lain-lain (.....)

4. Penghasilan tiap bulan

- ☐ 0 – Rp. 500.000,-
- ☐ Rp. 500.000, - Rp. 1.000.000,-
- ☐ Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-
- ☐ Rp. 2.000.000,- - Rp. 3.000.000,-
- ☐ Diatas Rp. 3.000.000,-

5. Menurut Anda dari kesebelas Zona dibawah ini, manakah zona yang paling berpotensi untuk dikembangkan

- ☐ Pusat Makanan
- ☐ Pusat Pertukangan
- ☐ Pusat Konveksi
- ☐ Pusat Percetakan
- ☐ Pusat Perikanan
- ☐ Pusat Kerajinan
- ☐ Pusat Persewaan
- ☐ Pusat Bordir
- ☐ Pusat Batik
- ☐ Pusat Perbengkelan
- ☐ Pusat Agro

6. Dari kesebelas zona, mengapa anda memilih zona tersebut untuk dikembangkan?

- ☐ Adanya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai
- ☐ Belum adanya zona tersebut (Tidak ada pesaing)
- ☐ Peluang Potensi pemasaran yang baik
- ☐ Lainnya (.....)



LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/293 /421.205/2014

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Kaprodi Ilmu Administrasi Pemerintahan UB Malang No : 1995/UN
10.3/PG/2014 Tanggal : 12 Februari 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Alitha Indraswari Gunur / Mhs. Fakultas Ilmu Administrasi
UB Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Pengembangan Program Desa Mandiri Energi (DME)
dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada
Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang)
Daerah/tempat kegiatan : Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang
Lamanya : 2 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 14 Februari 2014

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**
Kabid Idarong dan WASBANG

BUDIANTO HERMAWAN SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Kaprodi Ilmu Asministrasi Pemerintahan UB Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Malang
5. Sdr. Camat Kepanjen Kab. Malang
6. Sdr. Kepala Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang
7. Sdr. Mhs/Ybs
8. Arsip

cxxxviii



LAMPIRAN 5

CURRICULUM VITAE PENULIS

CURRICULUM VITAE

A. IdentitasDiri

Nama : AlithaIndraswariGunur
 Tempat, TanggalLahir : Ngawi, 8 Oktober 1991
 Umur : 22 tahun
 JenisKelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : BelumMenikah
 Alamat di Malang : Jalan Tata Surya Blok III Nomor 3
 Kec.Lowokwaru Kota Malang, 65144
 AlamatAsal : Ds. Ngrambe RT.03 RW.03
 Kec.NgrambeKab.Ngawi, 63263
 NIM : 105030500111021
 Fakultas/ Jurusan/ Minat : IlmuAdministrasi/ Publik/ Pemerintahan
 Universitas : Brawijaya, Malang
 Telepon/HP : 081217396775
 Email : tatha.alitha@gmail.com

B. RiwayatPendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1	SD Negeri 1 Ngrambe	1997-2003
2	SMP Negeri 1 Ngrambe	2003-2006
3	SMA Negeri 1 Jogorogo	2006-2009
4	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Minat Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang	2010-2014

C. Pengalaman Organisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1	Dirjen Keuangan Internal	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA-UB	2012-2013
2	Koordinator Teater	Sanggar Seni Mahasiswa (SSM) FIA-UB	2012-2013

